

KIAI DAN POLITIK
STUDI KASUS PERILAKU POLITIK KIAI DALAM KONFLIK
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
PASCA MUKTAMAR II SEMARANG



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Ilmu Politik
Pada Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro

Oleh:

ICHWAN ARIFIN
D4B005004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2008



Sertifikat

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Ichwan Arifin menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Ilmu Politik ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Ichwan Arifin
24 September 2008.

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa usulan penelitian berjudul:

KIAI DAN POLITIK: STUDI KASUS PERILAKU POLITIK KIAI DALAM KONFLIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PASCA MUKTAMAR II SEMARANG

Yang disusun oleh Ichwan Arifin, NIM D4B005004
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 September 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota Penguji

(Drs. Turtiantoro, MSi)

1. (Drs. Achmad Taufik, MSi)

Sekretaris Penguji

(Dra. Rina Martini, MSi)

2. (Drs. Priyatno Harsasto, MA)

Semarang, 24 September 2008
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Politik
Ketua Program

Drs. Purwoko, MS

MOTTO

*Read in the name of thy Lord and Cherisher, who created
Created man, out of a (mere) clot of congealed blood
Read! And thy Lord is Most Bountiful
He Who taught (the use of) the Pen
Taught man that which he knew not
(QS; Al-Alaq; 1-5)*

**Stand up, all the victims of oppression for the tyrant fear your might,
Don't cling to hard to your possessions for you have nothing if you have no right
Let's racist ignorance be ended for respect the empires fall
Freedom is merely privilege extended unless enjoyed by one and all
So come brothers and sisters for the struggle carries on...
(The Internationale)**

PERSEMBAHAN

*Puji Syukur Alhamdulillah pada Allah Penguasa Alam Semesta.
Tesis ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan selalu menjadi
inspirasi dalam hidup;
Est....my beloved wife who always be my candle in the dark,
yang penuh kesetiaan untuk menjadi malaikat penyelamat dalam hidupku.
Ibuku, orang yang paling kukagumi
Dan Ayah mertuaku Yudiono KS, panutan dalam hidup.*

ABSTRAKSI

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dideklarasikan pada 23 Juli 1998 oleh tokoh-tokoh terkemuka NU dan ditahbiskan sebagai satu-satunya wadah berpolitik bagi anggota organisasi sosial keagamaan tersebut. Berpijak pada AD/ART dan Mabda Syiasi, basis ideologi PKB adalah Pancasila dan memiliki sifat sebagai partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan.

Sejalan dengan kultur di NU, kiai menduduki posisi dan peran yang sangat penting di PKB. Secara struktural, kiai ditempatkan pada Dewan Syuro, lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi pergerakan partai dalam upaya menggapai cita-cita politiknya.

Dalam perjalanan politik selanjutnya, konflik demi konflik menerpa PKB. Sampai sekarang, ada tiga episode konflik. Pertama, Mathori Abdul Djali. Kedua, Alwi Shihab dan Ketiga, Muhaimin Iskandar. Setiap konflik berimbas pada keberadaan kiai, baik yang ada dalam struktur maupun di luar struktur partai.

Penelitian ini mencoba menguak peran politik kiai sekaligus menguraikan situasi yang terjadi dalam konflik PKB. Penelitian ini memakai model deskriptif kualitatif. Beberapa pokok kesimpulan dari penelitian ini, adalah: *Pertama*, PKB sebagai partai modern gagal melakukan konsolidasi dan membangun sistem. *Kedua*, akar konflik internal di tubuh PKB disebabkan oleh benturan kepentingan pragmatis dari masing-masing kader partai yang tengah memegang kekuasaan.

Ketiga, terjadi perubahan posisi dan peran kiai dalam konflik PKB. Semula keberadaan kiai dalam partai didesain sebagai sumber rujukan untuk pengambilan kebijakan strategis partai, menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan di internal maupun eksternal serta sebagai perekat keutuhan partai. Dalam perkembangannya, sebagian besar kiai justru menjadi bagian dari persoalan atau bagian dari konflik tersebut.

Keempat, pola konflik yang terbangun di PKB bersifat struktural dan kultural. Konflik yang membelah struktur partai mengakibatkan dualisme kepengurusan dan pertikaian sesama kader. Dalam tataran kultural, konflik telah membuat polarisasi di kalangan kiai dan santri. *Kelima*, konflik internal PKB memperkuat pandangan bahwa proses institusionalisasi dalam partai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Institusi berubah menjadi sangat personal. Imbasnya struktur partai tidak berfungsi secara optimal.

Dari serangkaian konflik dapat ditemukan tipologi kader PKB. *Pertama* adalah kader yang memegang teguh prinsip dan sikap. Misalnya, sekali menentukan sikap keberpihakannya maka akan seterusnya berada dalam posisi itu dengan segala konsekuensi dan resiko yang harus ditanggung. *Kedua* adalah kader yang dapat bermetamorfosis secara cepat sesuai dengan pergerakan bandul kekuasaan. Dalam area ini, seseorang yang semula membela mati-matian salah satu pihak dapat dengan mudah berpindah ke pihak yang berseberangan begitu angin kekuasaan berbalik arah. *Ketiga*, kader yang memiliki sikap untuk kemana-mana. Semua pihak diikuti sampai pada akhirnya muncul salah satu pihak sebagai pemenang, maka kader ini akan secepatnya menentukan sikap yang sejalan dengan sang pemenang.

Menilik catatan sejarah konflik PKB, pada akhirnya muara konflik tidak mencapai tahap integrasi namun justru memilih segregasi sebagai jalan terakhir penyelesaiannya.

Semarang, September 2008

ABSTRACT

The National Awakening Party (PKB) was declared by NU leaders in Jakarta on July 23, 2008 and designed as a political instrument for NU members. According to the “AD/ART (organization’s statue)” and “Mabda Syiasi” (organization principle), Pancasila is the party’s ideology. The statue also mentions that PKB is an inclusive party, of which any Indonesians can be members, not only Muslim or NU members.

As far as the NU’s tradition, “*kiais*” (the religious leaders) have special roles and position in the PKB’s structure. *Kiai* are positioned as members of the “Dewan Syuro” (Advisory Council), a council that has powerful role in formulating party’s policies as well as becomes the moral guardian of the party’s members in achieving their political goals.

Conflicts are part of the PKB’s history. There have been at least three episodes of conflicts so far. First, Mathori Abdul Djalil. Second, Alwi Shihab, and third, Muhaimin Iskandar. Each of those conflicts has some impacts to *kiais* regardless whether they are members or non members of PKB’s board.

This research is aimed at revealing the political roles of the *kiais* as well as describing the conflicts within PKB. The research method used is the descriptive qualitative method. Some of conclusions drawn from this research are: *First*, PKB as a modern political party has failed in consolidating supports and building its political system. *Second*, the root cause of the internal conflicts within PKB is the conflicting pragmatic interests of each party’s cadres who hold the power within the party.

Third, there have been changing of the *kiai*’s roles and positions during the conflict. Initially, the *kiai*’s presence in the party was designed to become source of reference in the PKB’s political decision making process, and also mediator in the internal and external conflicts, as well as become the figure to maintain party’s unity.

Fourth, the conflicts within PKB are both structural and cultural conflicts. The conflicts occurred within the PKB has caused dualism of party’s leadership. Culturally, the conflicts have caused polarization among the *kiais* and the *santris* (students). *Fifth*, the conflicts reinforced the views that institutionalization of the party had not been implemented correctly. The party institution turned to be very personal and is not functioning optimally.

Based on the description of the conflicts, there are three types of PKB cadres. *First*, those who truly uphold their principles and are willing to take risks and consequences. *Second*, those who are opportunistic in seeking power. *Third*, those who join different interest groups tend to be “wait and see”.

Finally, people involved in the conflicts prefers segregation to integration as the way to end the conflict.

Semarang, 24th September 2008

KATA PENGANTAR

Ditengah waktu yang terus memburu, pada akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Hanya ucapan syukur Alhamdulillah yang sepantasnya diungkapkan.

Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis terhadap keberadaan kiai dalam politik praktis. Sebenarnya pergerakan para kiai dalam dunia politik telah menorehkan jejak panjang yang telah ditapakkan sejak zaman kolonial Belanda. Didirikannya Nahdhatul Ulama (NU) yang artinya adalah Kebangkitan Ulama, tidak hanya didorong untuk mempertahankan paham *Ahlussunah waljama'ah* namun juga motif politik untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.

Sejarah panjang itu memberikan pemahaman bahwa relasi antara politik dan kiai nyaris tidak terpisahkan. Beragam asumsi berkembang untuk menilai relasi tersebut. Ada yang mendukung namun ada pula yang mencibir atau bahkan menggugatnya. Bagaimanapun relasi kiai dan dunia politik atau dengan para politisi dalam kehidupan politik di Indonesia tetap menjadi hal yang menarik.

Di Indonesia banyak partai politik yang aktifisnya terdiri dari kiai. Namun partai yang secara formal didirikan oleh NU adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Untuk itulah penulis memilih PKB sebagai studi kasus penelitian tesis ini. Alasan lainnya, PKB sebagai partai yang didirikan para ulama NU ternyata menyimpan potensi konflik yang luar biasa dahsyat. Konflik dan perpecahan demi perpecahan organisasi itu merupakan fakta tak terbantahkan. Sampai saat ini, ada tiga episode konflik. Pertama, Mathori Abdul Djilil. Kedua, Alwi Shihab dan Ketiga,

Muhaimin Iskandar. Dalam setiap episode konflik berimbas pada keberadaan kiai, baik yang ada dalam struktur PKB maupun yang berada di luar struktur partai.

Sejalan dengan kultur NU, kiai menduduki posisi dan peran yang sangat penting. Kiai telah ditahbiskan sebagai pemegang otoritas moral, pembawa “pesan langit” dan label surgawi lainnya. Dalam struktur PKB, kiai ditempatkan dalam posisi Dewan Syuro, lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi pergerakan politik dalam upaya menggapai cita-cita politik PKB. Konflik itu menumbuhkan citra yang kontradiksi terhadap keberadaan kiai. Antara citra pemersatu, *problem solver*, tokoh panutan dan label mulia lainnya yang melekat pada kiai dengan realitas politik di PKB yang justru penuh sesak dengan konflik. Fenomena itu menggenapi latar belakang penelitian ini.

Penelitian ini mencoba menguak peran politik kiai sekaligus menguraikan situasi yang terjadi dalam konflik PKB. Secara umum, hasil penelitian ini dipaparkan ke dalam lima bab. Bab pertama berbicara mengenai latar belakang yang mendasari penelitian ini. Bab kedua memaparkan jejak sejarah politik NU dan PKB. Bab ketiga menguraikan konflik yang terjadi dalam PKB, termasuk mengenai konfigurasi kiai dalam konflik. Bab keempat memaparkan pengaruh konflik dan rumusan pemikiran penyelesaian dan ditutup oleh kesimpulan dan saran yang dituangkan dalam bab lima.

Penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak yang peduli. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Undip:
Drs. Purwoko, MSi.

2. Pembimbing Tesis: Drs. Turtiantoro, MSi dan Dra. Rina Martini, MSi
3. Segenap narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berguna bagi penelitian ini, baik melalui wawancara formal, perbincangan informal, diskusi via email, telepon atau media komunikasi lainnya. Terimakasih kepada ; KH Mahfud Ridwan, KH Dimiyati Rois, Drs. H. Cholidy Ibhara, MA, Drs. Nursyamsuddin, MA, Dra. Hj. Saedah Sakwan, Abdul Kadir Karding, KH Yazid Mahfud, Saefullah Ma'shum, Drs. Choirul Annam, Hanif Dhakiri, H. Fauzi Fallas, Devi Faishal, Eman Hermawan, Hendry Wicaksono, Sukirman, SS. H. Hadi Yassin, Asrofi, SAg, serta narasumber lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Dosen dan staff Magister Ilmu politik Undip serta pihak-pihak lain yang membantu penelitian ini dengan penuh ketulusan hati.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak memuat kebenaran yang mutlak namun justru sangat terbuka untuk penambahan informasi, data dan fakta atau bahkan revisi sehingga menjadi sempurna.

Semarang, 24 September 2008

Ichwan Arifin

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	i
Persetujuan/Pengesahan Tesis	ii
Motto/Persembahan	iii
Abstract	iv
Abstraksi	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Bab I: Pendahuluan	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Kerangka Dasar Teori	15
1.5. Metode Penelitian	20
Bab II: Jejak Sejarah, Langkah Politik NU dan PKB	
2.1. Lintas Sejarah Politik Nahdlatul Ulama.....	25
2.2. Faktor Pendorong NU Memasuki Ranah Politik	35
2.3. Syahwat Politik Kader NU dan Pembentukan PKB	43
2.4. Dualisme PKB Sebagai Partai Terbuka	51
Bab III: Mengurai Akar Konflik PKB	
3.1. Kinerja Politik dan Bibit Konflik	59
3.2. Selintas Jejak Pondok Pesantren	70
3.3. Peta/Anatomi Konflik	74
3.4. Merunut Akar Konflik	106
3.5. Konflik Dalam Pandangan Pihak Luar	120

Bab IV: Pengaruh Konflik dan Pemikiran Penyelesaian

4.1. Pengaruh Konflik Bagi PKB	127
4.2. Peran Kiai dalam Konflik PKB	137
4.3. Pemikiran Solusi	144

Bab V: Penutup

5.1. Kesimpulan.....	150
5.2. Saran	153

Daftar Referensi.....	155
------------------------------	------------

Daftar Riwayat Hidup	160
-----------------------------------	------------

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	i
Persetujuan/Pengesahan Tesis	ii
Motto/Persembahan	iii
Abstract	iv
Abstraksi	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Bab I: Pendahuluan	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Kerangka Dasar Teori	15
1.5. Metode Penelitian	20
Bab II: Jejak Sejarah, Langkah Politik NU dan PKB	
2.1. Lintas Sejarah Politik Nahdlatul Ulama.....	25
2.2. Faktor Pendorong NU Memasuki Ranah Politik	35
2.3. Syahwat Politik Kader NU dan Pembentukan PKB	43
2.4. Dualisme PKB Sebagai Partai Terbuka	51
Bab III: Mengurai Akar Konflik PKB	
3.1. Kinerja Politik dan Bibit Konflik	59
3.2. Selintas Jejak Pondok Pesantren	70
3.3. Peta/Anatomi Konflik	74
3.4. Merunut Akar Konflik	106
3.5. Konflik Dalam Pandangan Pihak Luar	120

Bab IV: Pengaruh Konflik dan Pemikiran Penyelesaian

4.1. Pengaruh Konflik Bagi PKB	127
4.2. Peran Kiai dalam Konflik PKB	137
4.3. Pemikiran Solusi	144

Bab V: Penutup

5.1. Kesimpulan.....	150
5.2. Saran	153

Daftar Referensi.....	155
------------------------------	------------

Daftar Riwayat Hidup	160
-----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Reformasi politik telah berhasil menggulingkan konstruksi politik rezim lama yang monolitik, otoriter dan militeristik sekaligus membentangkan jalan bagi berlangsungnya demokratisasi dan transformasi sosial. Proses itu juga sering disebut sebagai transisi demokrasi. Titik tolaknya adalah peristiwa pemakzulan Presiden Soeharto dari pucuk kekuasaan pada bulan Mei 1998.

Reformasi merupakan bagian dari transisi demokrasi yang mencakup liberalisasi politik dan demokratisasi. Dalam tahap ini terjadi perubahan rezim serta meluasnya hak-hak politik rakyat. Muncul pula ledakan partisipasi politik yang ditandai dengan dilaksanakannya pemilu demokratis dan pergantian pemerintahan sebagai konsekuensi dari pemilu. Guilermo O'Donnel dan Philippe C. Schmitter¹ juga menambahkan, transisi demokrasi sering membuahkan situasi ketidakpastian. Dalam banyak kasus, situasi itu dapat menjadi peluang bagi munculnya kekuatan *status quo* maupun gerakan-gerakan arus balik demokratisasi.

Di negeri ini, transisi demokrasi telah menciptakan perubahan besar dalam bandul kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi “digenggam” secara absolut oleh militer namun telah beralih ke tangan para politisi sipil. Perubahan itu membawa implikasi yang sangat berarti bagi institusi kepartaian. Perubahan dalam lembaga-lembaga kenegaraan sebagaimana tertuang dalam amandemen UUD 45, menempatkan partai

¹ Proses transisi demokrasi dapat dibaca pada; Guilermo O'Donnel and Philippe C. Schmitter. *Transitions From Authoritarian Rule; Tentative Conclusions About Uncertain Democracies*. Baltimore; John Hopkins University Press, 1986.

sebagai institusi penting dan memiliki peran strategis dalam struktur politik di Indonesia. Selain itu perubahan ini menjadi titik kritis yang memiliki pengaruh besar terhadap masa depan partai politik dan demokratisasi. Kegagalan mengawal demokratisasi akan berakibat buruk bagi partai politik.

Transisi demokrasi yang gagal setidaknya membuahkan tiga hal²: *Pertama*, kembalinya kekuatan lama dalam panggung kekuasaan. Proses itu dapat berlangsung secara sistematis melalui jalan demokrasi maupun menggunakan kekerasan seperti kudeta militer. Jalan demokrasi akan ditempuh pada saat demokratisasi itu tidak dikawal secara tuntas oleh kelompok pembaharu sehingga memberikan kesempatan bagi kekuatan lama untuk melakukan konsolidasi, *mutasi* politik, *political laundry* terkait dengan citra *status quo* untuk kemudian berubah menjadi kekuatan reformis.

Kemungkinan *kedua* transisi akan menghasilkan penguasa baru yang populer di mata rakyat namun dengan pola dan model kekuasaan yang tidak beranjak dari model kekuasaan otoriter masa silam. *Ketiga* adalah terjadi pengambilalihan kekuasaan oleh militer baik melalui jalan damai atau perebutan paksa dengan mengatasnamakan ketertiban nasional dan menengahi konflik antar faksi sipil dalam proses pengelolaan kekuasaan negara.

Reformasi di Indonesia membuahkan situasi dilematis, yaitu antara pilihan untuk memangkas habis kekuatan lama yang masih menguasai sektor-sektor vital dan strategis dalam setiap aspek kehidupan masyarakat atau melakukan perubahan gradual melalui kompromi politik dengan kekuatan lama. Situasi dilematis itu telah membawa

² Ichwan Ar. *Jalan Baru Pergerakan Kebangsaan*, Buletin *Praksis*, Edisi 04, Mei 2006.

reformasi berjalan tersendat bahkan mengalami kecenderungan berbalik arah dengan munculnya gejala menguatnya arus balik demokratisasi.

Kekuatan reformis tidak mampu melakukan pemutusan hubungan secara frontal dengan rezim lama. Sebagian di antaranya bahkan melakukan kompromi atau kolaborasi politik dengan kekuatan lama untuk mengelola kekuasaan negara. Tidak dapat disangkal pula, gerakan reformasi belum memberikan sesuatu yang diharapkan rakyat. Reformasi belum memunculkan kemenangan ideologis. Sebagian masyarakat sering menyebutnya dengan istilah reformasi yang “dibajak” di tengah jalan.

Sinyalemen tersebut bukan tanpa dasar. Pasca reformasi, aparatus ideologi *pro status quo* masih berdiri kokoh tegak dan angkuh bagai batu karang. Di sisi lain, kesadaran kognitif rakyat dalam berpolitik belum terbangun secara utuh. Pada saat yang sama, partai politik tergambarkan dalam potret yang tidak baik. Sebagian partai politik terbelit dalam konflik internal yang tidak kunjung usai, sebagian lainnya tengah diluluhlantakkan dengan perilaku negatif yang diduga dilakukan kader partai seperti kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan serta perilaku lain yang semakin memperburuk citra partai politik. Dalam konteks itu, partai politik sebagai alat kekuatan sipil untuk membangun demokrasi tidak luput pula dari cengkeraman kekuatan lama.

Citra partai politik yang buruk akan membuat rakyat diliputi keraguan terhadap gagasan demokratisasi dan reformasi, yang sebelumnya sangat diyakini sebagai jalan keluar dari kegagalan rezim lama dalam mengelola kekuasaan negara. Keraguan itu telah dimanifestasikan dalam bentuk apatisisme, pragmatisme dan skeptisisme dalam memandang partai politik dan proses politik secara keseluruhan.

Situasi itu sangat rentan dan membahayakan bagi proses demokratisasi, terutama jika dimanfaatkan oleh kekuatan atau kelompok *status quo* untuk menggerakkan arus balik demokratisasi dan menghadirkan kembali otoritarianisme dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seburuk apapun kondisi partai politik, demokrasi tetap memerlukan partai politik. Tidak mungkin ada demokrasi tanpa partai politik.

Dalam masa reformasi, secara faktual banyak partai baru yang muncul. Namun banyaknya partai baru itu tidak kemudian berbanding lurus dengan akselerasi demokratisasi dan kualitas demokrasi. J. Kristiadi mengemukakan, banyak diantara partai baru itu lebih tepat disebut sebagai gerombolan politik daripada partai politik. Disebut demikian karena partai-partai baru itu sangat pragmatis dan sangat “lapar” terhadap kekuasaan daripada secara serius memperjuangkan demokratisasi dan reformasi di Indonesia. Partai-partai itu juga tidak memiliki ideologi dalam arti sebenarnya sebagai gugusan nilai yang diyakini sebagai cita-cita politik dan menjadi pijakan pergerakan partai. Ideologi tereduksi menjadi sekadar rangkaian kata-kata indah dalam anggaran dasar.³

Secara kuantitatif, menjelang Pemilu 1999 tak kurang dari 141 partai telah didaftarkan di Departemen Kehakiman. Sebanyak 106 diantaranya kemudian mendaftar ke Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) untuk menjadi kontestan Pemilu 1999. Namun pada tahap seleksi berikutnya, hanya 60 partai yang memenuhi syarat untuk verifikasi. Dari jumlah itu, P3KPU

³ J. Kristiadi. *Kehidupan Kepartaian di Indonesia*. Makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam Seminar politik pada acara Deklarasi Partai Pergerakan Kebangsaan, Semarang 2006.

memutuskan hanya 48 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 1999.⁴

Salah satu diantara partai baru itu didirikan oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU). NU sendiri sebagai organisasi sosial keagamaan memiliki sejarah panjang melebihi sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Latar belakang pendirian NU sangat kompleks dan proses pendiriannya pun tidak instan.⁵

Meskipun didirikan sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, dalam perjalanan sejarahnya NU sempat menjadi partai politik. Selama menjadi partai politik, para ulama itu pun ikut berkubang dalam pergulatan politik praktis di panggung politik dan kekuasaan di negeri ini. Setelah menyatakan kembali ke khittah 1926, secara organisasional, NU tidak lagi berperan dan memainkan diri sebagai organisasi politik.

⁴ Salomo Simanungkalit (Ed). *Indonesia Dalam Krisis. 1997-2002*. Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2002, hal; 185-189.

⁵ Sejarah berdirinya NU melalui proses panjang. Pergulatan panjang dari para pendirinya seperti KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Hasbullah dalam menyikapi perkembangan masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa dalam menghadapi kolonialisme Belanda serta perkembangan dunia Islam di Saudi Arabia terutama dikaitkan dengan menguatnya gerakan Wahabiah, runtuhnya kekhalifahan di Turki, timbul tenggelamnya gagasan Pan Islamisme dan pertentangan tajam diantara para pengikut aliran atau pemikiran Islam di Indonesia merupakan latarbelakang berdirinya NU. Sejarah itu dimulai sejak kepulangan KH Wahab Hasbullah dan Kiai Mas Mansur dari Mekkah setelah pecah perang dunia I. Perintisan itu dimulai dari pendirian Nahdhatul Watan (kebangkitan tanah air) pada 1914 dan Taswirul Afkar (representasi gagasan-gagasan) pada 1918 dan kemudian disusul berdirinya Nahdhatul Tujjar (kebangkitan usahawan). Fenomena menguatnya gerakan-gerakan dalam pengembangan agama Islam yang cenderung merugikan faham ahlussunah waljama'ah memunculkan keprihatinan tersendiri dikalangan para kiai dan tokoh muda Islam dari kalangan pesantren. Keberhasilan Ibnu Saud, yang dikenal beraliran Wahabi, menaklukkan Arab menimbulkan kecemasan akan membawa dampak perubahan tradisi keagamaan menurut ajaran mazhab. Menyikapi hal itu maka para pemuka pesantren terutama tokoh muda seperti KH Wahab Hasbullah dengan beberapa kiai lainnya dan dengan dukungan penuh dari ulama sepuh KH Hasyim Asyari, mendirikan Komite Hijaz. Pertemuan pertama komite itu dilaksanakan pada 31 Januari 1926. Hasil pertemuan tersebut antara lain mengirimkan utusan ke Mekkah untuk memperjuangkan kebebasan pengikut ahlussunah waljama'ah dalam melakukan tradisi keagamaannya. Selain itu, keputusan lainnya adalah membubarkan Komite Hijaz dan menggantinya dengan nama Nahdhatul Ulama (NU). Tanggal pertemuan kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya NU. Sejarah NU dikutip dari. M. Ali Haidar. *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1998 dan Choirul Anam. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhatul Ulama*. Surabaya. Bisma Satu, 1999.

Reformasi 1998 berimplikasi pada desakan kepada PBNU untuk kembali bermain dalam panggung politik. Menyikapi fenomena itu maka PBNU kemudian memfasilitasi berdirinya partai baru sebagai wadah berpolitik para kader NU. Partai itu dideklarasikan pada 23 Juli 1998 di Jakarta dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Deklaratornya adalah para tokoh terkemuka NU, yaitu; KH Ilyas Ruhiyat, KH Muchith Muzadi, KH Munasir Ali, KH Abdurrahman Wahid dan KH Mustofa Bisri.⁶

Meskipun dilahirkan oleh kalangan NU, PKB tidak didesain sebagai partai yang menempatkan agama sebagai ideologi atau lebih khusus lagi sebagai partai Islam. PKB, sebagaimana dituangkan dalam Mabda Syiasi adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan.⁷ Keterbukaan PKB tidak hanya disimbolkan dalam kehadiran kepengurusan atau keanggotaan yang pluralistik namun yang lebih substansial lagi adalah keterbukaan dalam sikap dan perilaku politik serta rumusan cita-cita partai tersebut.

Dalam perjalanan politiknya, PKB mampu memperoleh dukungan rakyat dalam jumlah yang cukup signifikan. Pemilu 1999 menempatkan PKB pada urutan ketiga perolehan suara tingkat nasional setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar dengan jumlah pemilih sebesar 13.336.982 (12,6%). Hanya saja dalam perolehan kursi DPR RI, PKB hanya menduduki posisi

⁶ Website DPP PKB diakses pada 1 September 2007, 11.00 WIB.

⁷ Mabda Syiasi Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta; DPP PKB, 2004.

keempat dengan meraih 51 kursi. Jumlah itu masih dibawah “seteru” politiknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh 58 kursi.⁸

Meskipun tidak memegang suara mayoritas, namun Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berhasil terpilih sebagai presiden keempat Republik Indonesia dalam Sidang Umum (SU) MPR. Dalam pemilihan presiden, Gus Dur mengalahkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri, partai yang berhasil memperoleh kursi terbanyak di DPR RI (153 kursi) pada pemilu 1999. Namun kekuasaan Gus Dur tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 1,5 tahun berkuasa, Gus Dur dijatuhkan melalui Sidang Istimewa (SI) MPR. Jatuhnya Gus Dur membawa pengaruh besar bagi kalangan pengikutnya termasuk bagi PKB. Kader partai itu sempat mengalami krisis kepercayaan. Di lembaga legislatif, PKB bahkan sempat menyatakan membekukan diri. Bagi para pendukung Gus Dur, perlu waktu lama untuk menerima kenyataan politik bahwa sosok yang menjadi ikon PKB dan NU itu harus mengalami tragedi politik yang pahit.

Pada Pemilu 2004, suara yang diperoleh PKB mengalami penurunan. Di tingkat nasional, perolehan suara PKB sebesar 11.989.564 (10,57%). Jumlah itu mengalami penurunan sekitar 1.347.418 suara (10%). Gus Dur juga gagal maju

⁸ PPP merupakan partai politik hasil fusi empat partai politik berazaskan Islam pada 1971, yaitu; Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Nahdhatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti). Fusi itu merupakan kebijakan Rezim Orde Baru sebagai sarana untuk mengontrol kehidupan politik dengan membatasi jumlah partai. Empat partai itu kemudian berubah menjadi unsur- unsur dalam PPP. Dalam perjalanan selanjutnya, konflik antar unsur mewarnai sepanjang sejarah politik PPP. Konflik itu berpangkal pada perebutan kekuasaan dan pengaruh terutama terjadi diantara NU dan Parmusi, dua unsur besar di PPP. Lihat Farchan Bulkin (Pengantar). *Analisa Kekuatan Politik diIndonesia, Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta; LP3ES, 1985. Hal 226-262. Pada akhirnya NU keluar dari PPP dan menyatakan diri kembali sebagai organisasi sosial keagamaan sesuai dengan Khittah 1926. Keluarnya NU itu bagi politisi PPP dianggap sebagai upaya pengembosan politik. Apalagi kemudian banyak politisi NU yang kemudian bergabung ke Golkar Setelah PKB dideklarasikan pada 1998, perseteruan itu semakin meningkat intensitasnya.

sebagai calon presiden setelah terganjal persyaratan kesehatan sebagaimana ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penurunan suara tidak hanya dialami PKB tetapi juga partai-partai lainnya. Namun dalam konteks PKB, konflik internal yang berlarut-larut, komunikasi politik yang buruk serta lemahnya kualitas kader banyak dinilai memberikan kontribusi bagi hilangnya dukungan rakyat. Konflik internal yang tidak kunjung selesai ditengarai menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kepercayaan rakyat terhadap PKB. Bibit konflik itu muncul sudah lama bahkan sejak rencana pendirian partai digagas oleh PBNU. Tarik menarik berbagai kekuatan/kelompok di lingkungan NU membuat PKB tidak hadir sendiri sebagai partai yang mencoba meraih dukungan suara dari kalangan nahdliyin.

Meskipun secara formal PBNU hanya mengakui PKB sebagai satu-satunya partai yang didirikannya, namun partai politik dari kalangan NU tidak hanya PKB. Dalam Pemilu 1999 muncul Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang mengusung KH Solahudin Wahid (adik Gus Dur) sebagai ikon partai itu. Kemudian muncul pula KH Syukron Makmun yang mendeklarasikan Partai Nahdhatul Umat (PNU). Namun kedua partai itu gagal memenuhi *electoral treshold*. PNU mendapat 679.174 suara (0,64%) dan 5 kursi DPR RI sedangkan PKU hanya memperoleh 300.049 suara (0,28%) dan 1 kursi DPR RI.⁹

Konflik internal partai bukan sesuatu yang baru dalam sejarah kepartaian di Indonesia. Situasi itu sudah ada sejak masa awal kemerdekaan. Partai-partai baru yang lahir di era reformasi pun tidak luput dari penyakit itu. Di PKB, konflik pertama

⁹ Salomo Simanungkalit (Ed). *Op cit.*

dalam skala nasional muncul melalui perpecahan antara Gus Dur dengan Mathori Abdul Djali. Pemakzulan Gus Dur dari jabatan presiden, menjadi pemicu munculnya konflik internal. Mathori sebagai Ketua Umum DPP PKB (waktu itu) dianggap mengkhianati garis politik partai dan lebih mendukung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri, orang yang kemudian menggantikan Gus Dur menjadi Presiden RI.

Kemudian, konflik semakin melebar dengan munculnya kepengurusan ganda versi Mathori dan versi Gus Dur. Konflik ini tidak berlangsung lama. Seusai peradilan memutuskan PKB pimpinan Gus Dur yang sah di mata hukum, konflik itupun berakhir. Selain itu juga, rencana politik Mathori untuk menciptakan “partai sekoci” mengalami kegagalan¹⁰. Partai Kejayaan Demokrasi (PKD) yang didirikan Mathori juga gagal memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu 2004.

Namun imbas konflik itu membuat citra PKB menjadi sangat buruk. Partai yang dipenuhi tokoh-tokoh spiritual dan menjadi panutan masyarakat ternyata justru saling berseteru satu sama lainnya untuk urusan-urusan yang bersifat profan dan materialistik. Slogan membela yang benar sering “diplesetkan” menjadi membela yang bayar. Sebuah stigmatisasi dan pembunuhan karakter yang berdampak luar biasa bagi membusuknya citra PKB. Stigmatisasi itu seolah mendapat pembenaran dan peneguhan ketika ditemukan kader-kader PKB yang tersangkut kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Istilah partai sekoci sempat populer di kalangan PKB pada waktu terjadi konflik Gus Dur dengan Mathori. Istilah itu untuk menyebut upaya untuk menciptakan alat atau organ alternative yang dapat digunakan untuk menyelamatkan dan memindahkan gerbong politik dari arena konflik di partai lama.

¹¹ Beberapa kader PKB yang menjadi anggota DPRD di sejumlah daerah telah dituduh terlibat dalam tindak korupsi APBD. Sebagian diantaranya divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara.

Citra itu semakin memburuk lagi setelah munculnya konflik baru yang berujung pada perpecahan pasca Muktamar II PKB di Semarang pada tahun 2004. Muktamar sebagai salah satu media konsolidasi justru membuahkan konflik baru. Imbas dari konflik di Muktamar II Semarang membuat PKB terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Gus Dur-Muhaimin Iskandar berhadapan dengan Alwi Shihab-Saefullah Yusuf¹². Drama konflik ini lebih panjang. Selain konflik melalui proses peradilan, perseteruan dalam proses politik juga terus dilakukan dua kelompok itu.

Muktamar II PKB di Semarang menghasilkan DPP PKB dibawah pimpinan Ketua Dewan Syuro KH Abdurahman Wahid dan Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar. Beberapa bulan kemudian kubu Alwi-Saeful menggelar Muktamar di Surabaya. Hasilnya, terbentuk DPP PKB dibawah kepemimpinan Ketua Dewan Syuro KH Abdurahman Chudori (Mbah Dur) dan Ketua Dewan Tanfidz Choirul Anam.¹³

Penyelesaian konflik melalui jalur hukum sempat mengalami pasang surut dan telah memunculkan dua gugatan. Pada kasus gugatan yang pertama, kubu Alwi Shihab-Saefullah Yusuf menggugat kubu Gus Dur-Muhaimin Iskandar tentang pemberhentian keduanya dari jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB. Di tingkat PN Jaksel, DPP PKB versi Gus Dur-Muhaimin Iskandar dinyatakan menang. Namun di tingkat kasasi, keputusan hakim kasasi justru membuat status

Meskipun bukan aktor tunggal serta melibatkan kader partai diluar PKB namun *blow up* kasus itu di media massa turut memberikan kontribusi bagi pembusukan citra partai.

¹² Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB yang diberhentikan dari jabatannya dari kepengurusan partai setelah diangkat menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menjelang pelaksanaan Muktamar II PKB di Semarang, keduanya melakukan gugatan atas pemberhentian tersebut. Gugatan itu kemudian menjadi salah satu pemicu konflik PKB.

¹³ KH Abdurahman Chudori sebelum terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB versi Muktamar Surabaya adalah Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Tengah. Sedangkan Choirul Anam adalah Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jawa Timur.

hukum kembali “mengambang” karena tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan keabsahan PKB.

Proses hukum yang kedua adalah gugatan DPP PKB Mukhtamar Semarang terhadap keabsahan penyelenggaraan Mukhtamar Surabaya. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 5 Juni 2006 menyatakan memenangkan gugatan DPP PKB hasil Mukhtamar Semarang. Termasuk dalam isi keputusan itu adalah penegasan bahwa hanya DPP PKB hasil Mukhtamar Semarang yang memiliki hak untuk menggunakan asset dan atribut PKB sekaligus melarang kubu Mukhtamar Surabaya untuk menggunakan asset dan atribut partai tersebut.¹⁴

Upaya penyatuan bukannya tidak dilakukan, namun ternyata perbedaan yang terjadi sulit untuk dijumpai. Apalagi konflik kali ini melibatkan banyak kiai senior dan berpengaruh dikalangan anggota NU. Para kiai tersebut lebih sering disebut dengan istilah kiai *sepuh* atau kiai *khos* dan memiliki pengaruh cukup besar di kalangan NU.

Beberapa kiai itu antara lain, KH Abdullah Faqih dari Langitan Jawa Timur, KH Idris Marzuki dari Jawa Timur, KH Muhaiminan Gunardo dari Parakan Jawa Tengah, KH Abdurahman Chudori dari Magelang Jawa Tengah dan sebagainya. Para kiai itu pada awalnya memiliki hubungan yang sangat dekat dan menjadi salah satu rujukan Gus Dur. Namun dalam konflik ini, para kiai itu memilih jalan yang berbeda. Bahkan kemudian melakukan konfrontasi secara terbuka dengan mendukung kubu

¹⁴ Keputusan itu tertuang dalam Putusan Kasasi MA No. 02/K/Parpol/2006 Tanggal 7 September 2006 yang mengukuhkan Putusan PN Jakarta Selatan No. 1445/PDT.G/2005/PN.JAKSEL, tanggal 5 Juni 2006. Putusan hukum itu kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) No. M.14-UM.06.08 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 yang berisi pencabutan SK Menkumham No M-11.UM.06.08 Tahun 2005 tentang pendaftaran DPP PKB dibawah kepemimpinan Ketua Dewan Syuro KH Abdurahman Chudluri dan Ketua Dewan Tanfidz Drs. Choirul Anam.

Alwi Shihab – Saefullah Yusuf. Beberapa diantara kiai itu masuk dalam struktur kepengurusan PKB, misalnya KH Abdurahman Chudori sedangkan yang lain merupakan tokoh kultural NU yang secara politik dekat dengan PKB.

Dalam kultur NU dan PKB, para kiai selama ini dipandang dan ditempatkan sebagai sosok yang suci, pewaris ajaran nabi dan segala tindak tanduknya harus diikuti. Selama ini, kiai telah ditahbiskan sebagai pemegang otoritas moral, pembawa “pesan langit” dan label-label surgawi lainnya. Masyarakat pun mengamini hal itu dan menjadikan para kiai/ulama sebagai panutan dalam kehidupannya. Namun yang tidak banyak disadari oleh umat adalah kesamaan situasi. Pada saat masuk politik, para kiai itu sama dengan politikus dan manusia lainnya yang lekat dengan ambisi, *vested of interest* serta tidak lepas dari tarik menarik kepentingan duniawi serta hal-hal yang bersifat profan lainnya.

Sejak memasuki dunia politik praktis, ada gejala deapresiasi terhadap peran dan eksistensi para kiai. Rusaknya citra kiai sudah dimulai sejak keterlibatan mereka dalam politik praktis. Gempuran dan godaan kepentingan-kepentingan pragmatis telah menyeret sebagian para kiai ke dalam ruang konflik dan semakin menjauh dari peran sosial di masyarakat. Politisasi agama merupakan pembodohan terhadap umat. Fatwa dan tafsir para kiai tidak lagi didasari oleh kejernihan nurani dan “bisikan langit” yang dapat dijadikan rujukan bagi umat untuk menentukan sikap, namun lebih banyak dilatarbelakangi oleh motif kalkulasi politik sebagai bagian dari politik dagang sapi. Di sisi lain, para elite partai juga banyak yang menginginkan atau menyeret kiai ke dalam politik praktis. Upaya itu dilatarbelakangi oleh asumsi yang selama ini melekat pada figur kiai terutama dikaitkan dengan mobilisasi dukungan politik. Asumsi

seperti; ketokohan di mata masyarakat serta pengaruhnya pada umat, merupakan nilai tambah untuk meningkatkan dukungan rakyat pada partai tersebut.

Sebenarnya, pergerakan para kiai dalam dunia politik telah menorehkan jejak panjang. Jejak itu bahkan telah ditapakkan sejak zaman kolonial Belanda. Didirikannya NU, tidak hanya didorong untuk mempertahankan paham ahlussunah waljama'ah namun juga motif nasionalisme untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pergerakan politik para kiai itu kemudian berlanjut sampai pada masa kemerdekaan. NU bahkan sempat menjadi partai politik tersendiri setelah sebelumnya bergabung dalam partai politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).¹⁵

Jejak politik partai NU juga tidak jelek. Pada pemilu 1955, NU memperoleh sekitar 7 juta suara (18,4%) dari total suara di tingkat nasional dan menempatkannya sebagai partai ketiga terbesar di belakang Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai yang dikelola para kiai itu memperoleh 45 kursi parlemen di tingkat nasional. PNI, Masyumi, NU dan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi empat partai politik terbesar dan berpengaruh dalam konstelasi politik nasional pada masa itu.¹⁶

Sejarah panjang itu memberikan pemahaman bahwa relasi antara politik dan kiai nyaris tidak terpisahkan. Beragam asumsi menilai relasi itu, ada yang mendukung namun ada pula yang mencibir atau bahkan menggugatny. Bagaimanapun relasi antara kiai dan dunia politik dalam kehidupan politik di Indonesia tetap menjadi hal yang menarik. Hal lainnya, PKB sebagai partai yang didirikan para ulama NU

¹⁵ Drs. Choirul Anam, *Opcit.* Hal; 18-27.

¹⁶ Greg Fealy. *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta. LKiS, 2003. Hal; 209-209.

ternyata menyimpan potensi konflik yang luar biasa dahsyat. Konflik dan perpecahan demi perpecahan dalam organisasi itu merupakan fakta tak terbantahkan dan menumbuhkan penilaian yang kontradiktif terhadap keberadaan kiai. Antara citra pemersatu, *problem solver*, tokoh panutan dan label mulia lainnya melekat pada kiai dengan realitas politik di PKB yang penuh sesak dengan konflik. Fenomena itu menggenapi latarbelakang penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah dalam yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana deskripsi relasi kiai dan politik?
- 1.2.2. Bagaimana konfigurasi politik kiai dalam konflik internal PKB?
- 1.2.3. Apa yang menjadi akar konflik di PKB pasca Muktamar II Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1. Memperoleh deskripsi konflik internal PKB.
- 1.3.2. Merumuskan pola hubungan kiai dan politik
- 1.3.3. Merumuskan perilaku politik dan konfigurasi kiai dalam konflik internal PKB

1.4. Kerangka Dasar Teori

Konflik dalam politik dapat dipahami melalui teori manajemen konflik. Teori manajemen konflik sebagaimana dikemukakan Parker menyatakan bahwa konflik merupakan keniscayaan. Dalam setiap masyarakat pasti ada konflik. Parker bahkan

menegaskan konflik tidak dapat dihilangkan. Konflik hanya dapat ditekan atau ditunda perkembangannya agar tidak menjadi hal yang kontraproduktif.

Kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan di antara individu atau aktor politik dapat menjadi pemicu konflik. Kompetisi yang ketat dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan menjadi bagian dari konflik. Setidaknya, ada tiga elemen kekuasaan yaitu; *authority, influence dan force* yang menjadi media atau ruang konflik.¹⁷ Di Indonesia, konflik internal partai politik hampir semuanya berawal dari pertarungan perebutan kepemimpinan dalam partai. Imbas konflik itu selalu membuahkan dualisme kepengurusan dan perpecahan organisasi.

Selain dari aspek teori politik, perilaku manusia dapat dilihat dari dari aspek psikologi. Menurut Carl Rogers perilaku manusia dapat dijabarkan sebagai berikut; setiap manusia hidup dalam pengalaman yang bersifat pribadi. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan dan mengaktualisasikan diri. Individu akan bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya. Ia bereaksi pada realitas seperti yang dipersepsikan olehnya dengan cara yang sesuai dengan konsep dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial sangat beragam. William Mc Dougal menyebutkan faktor personal, seperti instink, yang mempengaruhi perilaku manusia.

Dalam perspektif yang berbeda namun sebenarnya dapat melengkapi pandangan Dougal, Edward Ross mengemukakan faktor situasional merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku manusia. Ross memberikan gambaran sebagai berikut; seseorang bisa sangat terbuka pada istri atau suami namun dapat berjiwa

¹⁷ Couloumbis and Wolfe, 1985.

tertutup pada saat di kantor. Atau seseorang berlaku lemah lembut pada saat meminjam uang namun berubah menjadi “buas” pada saat ditagih. Di kantor, seseorang dapat bersikap sangat dominan, keras, kepala batu, galak dan sebagainya, namun pada saat di rumah tunduk pada istri seperti kerbau dicocok hidungnya¹⁸. Teori perilaku sebagaimana dikemukakan oleh Edward Ross itu dapat digunakan sebagai piranti teoritis untuk mengurai perilaku politik kiai pada saat bertindak sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan di lingkungan pesantren, tarekat dan sejenisnya dengan peran dan fungsi yang berbeda pada saat kiai itu berada dalam dunia politik praktis.

Sebagai pemimpin keagamaan, figur kiai dicitrakan sebagai orang yang bersih dari kepentingan (*free from value*) terutama dari hal-hal duniawi, menjadi panutan dalam tindakan dan perilakunya di mata umat serta diyakini sebagai pewaris ajaran nabi. Zamakhsyari Dhofier dalam penelitiannya tentang tradisi pesantren menyebutkan, kiai memperoleh tempat istimewa dalam struktur sosial di mata masyarakat. Meskipun kebanyakan kiai tinggal di daerah pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok elite dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat Jawa. Sebagai suatu kelompok mereka memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat dan merupakan kekuatan penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam agama Islam seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam,

¹⁸ Deskripsi teori perilaku sosial itu dikutip dari Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*. Bandung; Remadja Rosdakarya, 1985. Hal 40-54.

sehingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau terutama oleh orang awam.¹⁹

Kedudukan istimewa para kiai itu merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan secara optimal dalam politik. Dengan pemahaman keagamaan yang dimiliki para kiai itu, masyarakat berasumsi bahwa keberadaan kiai dalam politik dapat membantu “membersihkan” citra politik yang kotor sehingga hasil-hasil dari proses politik itu dapat memberikan kemanfaatan pada umat secara lebih baik. Namun dalam pergulatan politik dan berpijak pada teori perilaku Edward Ross, dapat dimungkinkan terjadi perubahan perilaku para kiai yang jauh berbeda jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemuka agama. Perubahan itu terjadi ketika para kiai mengalami pergeseran situasi pada saat berperan dalam ranah politik.

Kata kiai memuat beberapa makna. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, kata kiai dapat diartikan sebagai berikut; *pertama*, sebagai sebutan bagi alim ulama atau cerdik pandai dalam agama Islam. *Kedua*, sebutan bagi guru gaib (dukun, dan sebagainya). *Ketiga*, kepala distrik (di Kalimantan), *Keempat*, sebutan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dan sebagainya) dan *kelima*, sebutan samaran untuk harimau (jika orang melewati hutan).²⁰

Zamakhshari Dhofier dalam penelitiannya mengenai tradisi pesantren menyebutkan kiai sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pondok pesantren dan mengajar

¹⁹ Zamakhshari Dhofier. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, Cetakan Ketiga, 1984. Hal; 55-57.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988. Hal 437.

kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Meskipun dalam perkembangannya banyak ulama berpengaruh di masyarakat juga mendapat gelar kiai meskipun tidak memimpin pesantren namun merujuk pada tradisi pesantren maka makna kiai dipakai untuk menunjuk para ulama dari kelompok Islam tradisional.²¹

Dalam penelitian ini, makna kiai yang dipilih adalah makna yang pertama sebagaimana disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia serta makna yang sebangun seperti yang dikemukakan oleh Dhofier, yaitu cerdik pandai atau ulama dalam agama Islam dan memimpin pesantren. Lebih spesifik lagi adalah ulama yang tergabung dalam organisasi NU serta dalam pandangan politiknya berafiliasi pada PKB. Selain itu, ulama tersebut juga memiliki pengikut yang cukup besar atau berpengaruh dalam konfigurasi politik PKB.

Dalam struktur kepengurusan partai, para kiai yang aktif di PKB masuk dalam jajaran Mutasyar (penasehat) dan Dewan Syuro (lembaga perumus kebijakan partai). Diluar itu, ada pula kiai yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan partai namun memiliki kedekatan politik dengan PKB. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok kultural dan kadang-kadang dijadikan rujukan oleh para elite PKB dalam merumuskan kebijakan partai. Diantara kelompok itu ada yang disebut dengan istilah kiai *khos*, kiai *langitan*, dan sebagainya.

Dari sudut pandang kerangka teori penyelesaian konflik, El Fatih A. Abdel Salam mengemukakan, para ahli teori politik awal, dari Thucidydes dan Sun Tsu sampai Machiavelli dan Von Clausewitz, telah memilih satu unsur tertentu sebagai pusat perhatian: kekuasaan. Memakai dan menjalankan kekuasaan adalah konsep

²¹ Zamakhsyari Dhofier. *Opcit.* Hal; 55.

utama teori konflik makro. Para ahli teori makro sependapat bahwa kekuasaan itu datang dalam berbagai bentuk: ekonomi, politik, militer, bahkan budaya. Asumsi umum makro, atau teori klasik adalah bahwa akar konflik berasal dari persaingan kelompok dan pengejaran kekuasaan dan sumber-sumber. Asumsi-asumsi ini beroperasi pada faktor-faktor motivasi sadar dalam lingkungan yang berorientasi material.²² Teori resolusi konflik merupakan salah satu pijakan penyelesaian konflik. Dalam konsep ini, penyelesaian konflik diarahkan pada dari konsep "zero sum" menjadi "win-win solution."

Sebenarnya berpijak pada sejarah dan kultur NU, konflik hampir selalu berakhir dengan damai. Istilah yang sering dipakai dalam komunitas itu adalah awalnya "gegeran" (konflik) namun dengan pendekatan kultural dan nilai-nilai di NU pada akhirnya akan berakhir dengan "ger-geran"(canda hangat). Namun, situasi itu nampaknya sangat sulit diterapkan di PKB. Kasus-kasus konflik internal PKB selalu diselesaikan melalui proses peradilan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian, mengutip definisi penelitian dari Mudjahirin Tohir, merupakan seni berfikir dan bertindak secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ingin diketahui jawabannya lalu menginterpretasikan berdasarkan perangkat-perangkat teoritik, menyusun laporan dan menyebarkan

²² Dikutip dari El Fatih A. Abdel Salam, *Kerangka Teori Penyelesaian Konflik*, Associate Professor, Department of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia.

temuannya secara ilmiah. Penelitian sosial adalah penelitian tentang eksistensi manusia dengan dunianya sehingga bersifat empirik. Karena dunia yang dipelajari adalah dunia empirik maka data yang dikumpulkan pun berasal dari dunia empirik, yaitu data yang hidup dan riil dalam realitas seperti peristiwa yang bisa diamati maupun yang ada dalam keyakinan dan pikiran masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan kehidupan dan lingkungannya.²³ Beranjak dari sudut pandang seperti itu, maka penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, pokok penelitian tidak terletak pada gejala-gejala sosial tetapi pada makna yang terdapat dibalik tindakan-tindakan perorangan untuk mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data utama diperoleh dari buku atau literatur tertulis lainnya serta data dari informan. Informan dalam penelitian ini adalah kiai yang masuk dalam struktur kepengurusan PKB (Dewan syuro atau Mutasyar) serta kiai di luar struktur kepengurusan (dalam khasanah politik PKB disebut sebagai sayap kultural). Informan lainnya adalah pengurus PKB diluar kiai.

Dalam konteks konfigurasi dukungan politik rakyat yang terpetakan dalam hasil pemilu, dukungan politik terbesar bagi PKB berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada pemilu 1999, dari 51 kursi yang diperoleh PKB, 24 (47%) berasal dari Jawa Timur dan 10 (19,6%) dari Jawa Tengah.

²³ Mudjahirin Tohir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makalah tidak diterbitkan, disampaikan sebagai bahjan workshop Peneliti Tenaga Edukatif di IAIN Walisongo, Semarang, 2004.

Konfigurasi itu tidak jauh berubah pada pemilu 2004. Dari 52 kursi DPR RI, 23 (45%) berasal dari Jawa Timur dan 13 (25,5%) dari Jawa Tengah.²⁴ Artinya, kekuatan politik yang sangat menentukan sikap politik PKB berasal dari dua daerah itu. Untuk itu, dalam penelitian ini, informan akan difokuskan pada kiai yang masuk dalam struktur Dewan Syuro di PKB. Informan yang berasal dari pengurus juga akan difokuskan pada pengurus Tanfidz PKB. Informan dari kiai kultural akan difokuskan pada beberapa kiai. Informan itu terutama difokuskan pada figur yang jarang memperoleh ekspose publik. Pertimbangannya adalah; pertama, pendapat atau pemikiran dari tokoh-tokoh yang menjadi figur publik dapat diakses melalui media massa sedangkan pemikiran dari tokoh-tokoh non figur publik harus digali melalui wawancara atau informasi dari sumber lainnya.

1.5.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini juga membatasi “arena” konflik internal PKB hanya pada fase pasca Muktamar II Semarang sampai dengan terbitnya putusan kasasi MA dan surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia yang mencabut pendaftaran kepengurusan DPP PKB dibawah pimpinan Ketua Dewan Syuro KH Abdurahman Chudlori dan Ketua Dewan Tanfidz Drs. Choirul Anam. Fenomena lain pasca keluarnya putusan kasasi itu seperti berdirinya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang didirikan oleh para mantan kader PKB sebagai kelanjutan dari kubu Muktamar Surabaya dan bergabungnya beberapa mantan kader PKB ke PPP menjadi

²⁴ LP2KS DPW PKB Jawa Tengah. *Partai untuk Rakyat*. Semarang, DPW PKB Jawa Tengah dan Aneka Ilmu Semarang, 2003. Laporan Tim Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Tengah, 2004.

catatan tambahan dalam penelitian ini. Perkembangan baru PKB seperti konflik internal terbaru antara kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin Iskandar juga menjadi tambahan deskripsi dalam penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, observasi lapangan, cara-cara lainnya yang dapat memperkaya informasi terkait dengan tema penelitian.

1.5.5. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan Mudjahirin Tohir adalah menginterpretasi data dengan merujuk pada aktivitas penelitian yang melibatkan temuan-temuan penelitian. Ada beberapa varian analisa data. Dalam penelitian ini analisa yang dipergunakan Analisa tema Kultural (*Discovering Cultural Themes*). Analisa ini berpijak pada pemahaman bahwa gagasan bertumpu pada asumsi bahwa kegiatan maupun peristiwa sosial merupakan kesatuan yang terpola dalam suatu keseluruhan. Dalam keseluruhan itu terdapat tema yang dijadikan orientasi kognitif oleh para pelakunya. Analisa ini juga mencari keterkaitan (benang merah) yang mengintegrasikan lintas domain yang ada dikaitkan dengan konsep-konsep seperti *value*, *core values* dsb. Teknik yang dilakukan adalah; melarutkan diri kepada subyek yang diteliti sehingga menghayati alam pikiran, orientasi nilai dan sebagainya.

Kemudian mengihtisarkan segenap data/informasi yang telah ditemukan guna melihat “benang merah” yang menjalin satu dengan yang lain.²⁵

Alur dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan dalam *Metodologi Penelitian Sosial*²⁶ adalah; *pertama*, orientasi melalui bacaan, wawancara ke lapangan, *kedua*, eskplorasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan fokus penelitian yang sudah jelas dan *ketiga*, *member check*, yaitu memeriksakan laporan sementara penelitian responden atau kepada pembimbing. Tujuan member check ini agar responden dapat memberikan informasi baru lagi atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya.

Untuk memenuhi prasarat kesahihan data, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi yaitu;

a. Kredibilitas

Merupakan kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan. Untuk mencapai kredibilitas maka peneliti akan melakukan; triangulasi yaitu memeriksakan kebenaran data yang telah diperoleh kepada pihak-pihak lain yang dapat dipercaya. Langkah berikutnya adalah mendiskusikan dengan teman seprofesi. Kemudian juga menggunakan alat bantu seperti catatan, tape recorder dan sebagainya.

b. Dependabilitas

²⁵ Dr. Mudjahirin Tohir, MA, *Op cit.*

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung, PT Bumi Aksara, 2004. Hal 85-90.

Diperlukan *audit trial* atau konfirmasi dengan pihak diluar subyek penelitian. Dalam hal ini *audit trial* dilakukan dengan dosen pembimbing.

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah pelaporan data hasil penelitian.

BAB II

JEJAK SEJARAH, LANGKAH POLITIK NU DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2.1. Lintas Sejarah Politik Nahdlatul Ulama

Berbicara tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Nahdhatul Ulama (NU), sebuah *jam'iah diniyah* yang didirikan jauh hari sebelum keberadaan Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jika usia digunakan sebagai tolok ukur pengalaman maka NU telah memiliki “jam terbang” yang tinggi dalam mengarungi pergerakan di sektor keagamaan serta sosial politik di Indonesia. Jejak sejarah pergulatan politik NU ikut mewarnai perjalanan republik ini pada masa lalu dan sekarang.²⁷

Politik, meskipun acapkali diibaratkan sebagai rimba yang ganas namun tetap menjadi ruang yang menarik untuk dimasuki, baik bagi “pemain baru” maupun politisi lama. Pengalaman pahit di masa silam tidak menyurutkan langkah untuk memasuki kembali wilayah tersebut. Kondisi seperti itulah yang dialami politisi NU. Sejarah pergerakan politik organisasi Islam tradisional itu menorehkan banyak catatan penting. Diantaranya, pergeseran peran dan orientasi politik para aktifisnya, relasi pasang surut dengan kekuasaan dan jatuh bangun dalam perseteruannya dengan sayap politik Islam modernis mewarnai langkah NU sejak masa pra kemerdekaan sampai Indonesia merdeka.

²⁷ Salah satu pengakuan atas kontribusi NU kepada perjuangan kemerdekaan di kemukakan oleh Bung Karno melalui pidato berjudul *Saya Cinta sekali pada NU*. Pidato Presiden Soekarno itu disampaikan pada penutupan Muktamar NU di Sala, 28 Desember 1962. Naskah pidato dimuat dalam Iman Toto K Rahardjo dan Herdianto WK. *Bung Karno, Gerakan Massa dan Mahasiswa*. Jakarta, Grasindo, 2001.

PKB sebagai partai politik yang didirikan oleh elite NU, dapat dipastikan mewarisi sebagian atau keseluruhan karakter politik organisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai kelahiran dan perjalanan politik PKB didahului dengan memaparkan secara garis besar catatan sejarah NU.

Sejarah NU sebagaimana dituturkan oleh Choirul Anam dalam *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* serta Greg Barton dan Greg Fealy dalam *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, bermula dari kekhawatiran para pemuka agama Islam melihat perkembangan dinamika jaman pada masa itu.²⁸ NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama terkemuka dan pemimpin pesantren, diantaranya adalah KH Hasyim Asyari dan KH Wabah Chasbullah. Semula, kelahiran NU didorong oleh motif keagamaan, terutama semangat untuk mempertahankan paham *'Ahlussunah Wal Jama'ah (Aswaja)* ditengah desakan arus besar gerakan Wahabiyah yang mulai menguat setelah keberhasilan dinasti Saud menguasai Arab Saudi.

Pembentukan NU juga merupakan respon atas gerakan Kristenisasi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk menasranikan bangsa Indonesia disebut *Krestening Politiek*. Gubernur Jenderal AWF Indenburg (1909-1916) menyatakan, Belanda dapat mempertahankan Indonesia sebagai negara jajahannya tergantung dari Kristenisasi rakyatnya. Agresifitas Kristenisasi terutama di abad XX itu yang kemudian menumbuhkan kekhawatiran mendalam di kalangan ulama terhadap perkembangan Islam di Indonesia.

²⁸ Lintasan sejarah NU dikutip dari Choirul Anam. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* Surabaya; Bisma Satu Printing 1999 serta Greg Barton dan Greg Fealy. *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*; Yogyakarta. LKiS, 1997.

Dalam konteks Kristenisasi, disertasi H. Aqib Suminto yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul *Politik Islam Hindia Belanda* memaparkan dengan utuh tentang kebijakan tersebut.²⁹ Suminto mengemukakan, Kristenisasi didorong oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan. Disatu pihak Belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Sementara disisi lain sangat optimis bahwa keberhasilan Kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan. Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda itu disebut sebagai Islam Politiek dengan arsiteknya adalah Dr. Snouck Hurgronje. Pemikiran dasarnya adalah membagi masalah Islam atas tiga kategori; 1. Bidang agama atau ibadah murni, 2. Bidang sosial kemasyarakatan, 3. Bidang politik. Setiap bidang diberi atau ditangani dengan kebijakan yang berbeda. Terhadap dogma dan perintah hukum yang murni agama, pemerintah bersikap netral sepanjang ibadah itu tidak mengganggu kekuasaan Kolonial Belanda.

Dalam asumsi Hurgronje, akan terjadi evolusi agama pada rakyat Hindia Belanda. Secara perlahan pribumi akan meninggalkan Islam dan beralih memeluk agama Kristen. Kebijakan ini ditopang dengan berbagai aturan yang sangat diskriminatif terhadap golongan pribumi Islam, misalnya tentang pembatasan jumlah jemaah haji, hak hukum yang sama dengan golongan Eropa bagi pribumi Kristen, kenaikan pangkat bagi pegawai pemerintah dan alokasi anggaran bantuan yang lebih

²⁹ Suminto menjelaskan pelaksana kebijakan Islam Politiek adalah Kantoer voor Inlandsche zaken, yang berwenang memberi nasehat kepada pemerintah dalam masalah pribumi. Lembaga itu dibentuk pada 1899 dengan Dr. Snouck Hurgronje sebagai Penasehat Urusan Pribumi dan Arab. Oleh karena sebagian besar pribumi beragama Islam maka dengan sendirinya Islam menjadi garapan utama kantor ini. Keberhasilan politik Islam merupakan factor kunci bagi terjaminnya kedudukan pemerintah kolonial karena itu Kantoer voor Inlandsche zaken bahkan dinilai sebagai inti administrasi pemerintah Hindia Belanda. Lihat, H. Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda, Het Kantoer voor Inlandsche zaken*. Jakarta, LP3ES, 1985. Hal 99-113.

banyak dialokasikan untuk golongan Kristen. Dalam bidang ketatanegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat pada fanatisme Pan Islamisme. Pan Islamisme merupakan gagasan yang berkeinginan untuk menyatukan umat Islam seluruh dunia ke dalam satu persatuan Islam internasional. Sedangkan bidang kemasyarakatan, ditekankan untuk membawa rakyat Hindia Belanda menuju asosiasi dengan masyarakat Belanda dibawah kekuasaan Pemerintah Belanda melalui *Pax Neerlandica*.

Dalam persinggungannya dengan gerakan Wahabi, para pemuka Islam tradisional melihat gerakan itu sebagai salah satu ancaman dalam praktik kehidupan keagamaan mereka.³⁰ Aliran yang sering disebut gerakan permurnian ajaran Islam itu sampai ke Indonesia dan mampu menarik pengikut yang tidak sedikit. Di antara organisasi Islam di Indonesia yang berorientasi pada aliran Wahabi adalah Muhammadiyah.

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 Nopember 1912 di Yogyakarta atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa anggota Budi Utomo untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Muhammadiyah memiliki maksud menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi

³⁰ Gerakan Wahabi atau Muwahhidin (golongan yang meng Esakan Tuhan) didirikan oleh Muhammad Bin Abdul Wahab. Ajaran Wahabi pada prinsipnya adalah kembali pada Alqur'an dan Hadist. Dalam konteks ini keberadaan 4 mazhab (Syafii, Hambali, Hanafi dan Gozhali) tidak diakui sebagai sumber rujukan. Ajaran lainnya adalah memberantas bid'ah dan adat istiadat lama yang penuh fanatisme, melarang berdoa melalui perantara seperti wali atau kiai, mengharamkan permohonan *syafaat* (pertolongan) kepada selain Allah SWT. Lihat Anam, *ibid.* hal. 41. Sebagian besar ulama Indonesia yang bersandar pada 4 mazhab (selain Alqur'an dan Hadist) serta dalam ritual keagamaan memadukan ajaran Islam dengan adat istiadat masyarakat lokal, merasa terancam eksistensinya dengan keberadaan gerakan wahabi.

Muhammad SAW kepada penduduk bumiputera dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya.³¹

Latar belakang KH. Ahmad Dahlan sendiri sangat lekat dengan kultur Islam. Dahlan adalah anak dari KH Abubakar Sulaiman, khatib di mesjid Sultan Yogya. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam *nahu*, *fiqh* dan *tafsir* di Yogya dan sekitarnya, kemudian belajar ke Mekkah pada 1890. Salah seorang gurunya adalah Syaikh Ahmad Khatib. Dahlan telah menghayati cita-cita pembaruan sekembali dari haji pertamanya. Pembaharuan itu mula-mula dilakukan dalam praktek lahiriah seperti kiblat dan kebersihan kemudian diperluas lambat laun pada masalah-masalah fundamental dari masyarakat dan umat Islam. Upaya memperbarui arah kiblat di mesjid Sultan Yogya dan arah kiblat di langgar pribadinya memunculkan konflik dengan penghulu KH Mohammad Halil.³²

Konflik itu merupakan gambaran awal dari perbenturan yang panjang dengan kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat, budaya (terutama kejawen) dan kelompok Islam yang lebih kompromistis terhadap nilai-nilai lama itu.

Muhammadiyah kemudian juga dikenal sebagai kelompok Islam modernis. Perbedaan dengan komunitas NU yang dapat terlihat secara visual adalah dalam ritual keagamaan. NU cenderung mengakomodasi adat, tradisi dan budaya masyarakat lokal, sedangkan Muhammadiyah cenderung tidak memberi tempat pada praktik adat istiadat dan tradisi yang dinilai bertentangan dengan Islam.

Perbedaan itu juga terlihat dari simbol-simbol keagamaan seperti penggunaan *bedug* (penanda waktu sholat berbentuk seperti gendang raksasa yang dibunyikan

³¹ Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta, LP3ES, Cetakan kedua, 1982. Hal 84.

³² Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. *Ibid.* Hal 85.

sebelum adzan) di masjid-masjid NU, mimbar khotbah yang dilengkapi dengan tongkat bagi *khatib* (penceramah), pemakaian kain sarung sebagai identitas kultural warga NU serta perbedaan dalam beberapa ritual peribadatan. Perbedaan yang jamak terlihat, misalnya; warga NU dalam melakukan sholat shubuh lazim menggunakan doa *qunut*. Situasi yang tidak akan ditemukan bila sholat shubuh dengan warga Muhammadiyah.

Dalam sholat tarawih, jemaat NU lazim melaksanakan sebanyak 23 *rakaat* sedangkan Muhammadiyah hanya 11 *rakaat*. Perbedaan yang cukup tajam dan berdampak besar bagi ummat adalah penentuan hari pelaksanaan puasa dan Idul Fitri. Muhammadiyah menggunakan dasar *hisab* yang merujuk pada ilmu *falaq* sedangkan NU menggunakan metode *rukyat* dengan cara melakukan pengamatan langsung (mata telanjang maupun menggunakan alat bantuan penglihatan seperti teleskop) terhadap pergerakan Bulan dan Matahari.³³ Oleh karena itu, dalam *joke* politik, orang-orang NU sering disebut sebagai kaum sarungan, simbol dari tradisionalisme.

Dari sisi keanggotaan, Muhammadiyah memiliki banyak pengikut di kawasan perkotaan sedangkan NU berbasis masyarakat perdesaan. Meskipun NU juga melahirkan banyak pemikir atau lazim disebut kelompok intelektual, namun Muhammadiyah lebih tercitrakan sebagai kelompok intelektual Islam. Persinggungan perbedaan dan kepentingan antara NU dan Muhammadiyah seringkali disebut sebagai pertentangan antara kelompok Islam tradisional dengan Islam modernis.

³³ Kalender Islam disusun berdasarkan pergerakan Bulan. Karena periode perputaran Bulan mengelilingi Bumi sekitar 29,49 hari, maka umat Islam selalu melakukan *rukyatul hilal* (melihat bulan) pada hari ke-29 dari bulan Hijriah. Jika pada hari ke-29 saat Matahari terbenam Bulan terlihat, saat itu adalah tanggal 1 bulan berikutnya. Sebaliknya jika Bulan tidak terlihat, tanggal 1 bulan berikutnya adalah esok harinya setelah Matahari terbenam. Perbedaan dua metode itu dijabarkan secara detail oleh Ichwan melalui artikel berjudul *Hisab dan Rukyat* di harian Kompas, 12 September 2007.

Gesekan-gesekan itu yang dikemudian hari banyak mewarnai pergulatan NU dalam kancah politik maupun gerakan sosial keagamaan.

Pandangan seperti itu tidak sepenuhnya diterima, terutama dari kalangan NU. Stigma tradisional merupakan upaya mengkanalisasi peran warga NU dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Stigma itu juga merupakan upaya “pemenjaraan” warga NU untuk tidak bergelut dengan kemajuan jaman. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh terkemuka NU, menjawab kritik dan labelisasi ketradisionalan dengan menyatakan banyak pandangan yang keliru tentang NU. Diantaranya, ada anggapan bahwa orientasi kalangan tradisionalis pada umumnya dianggap terbelakang dan cenderung mapan dalam pemahaman mengenai masyarakat dan pemikiran Islam karena keteguhannya memegang hukum Islam ortodhoks. Dalam bidang teologi, mengikuti teologi skolastisisme Al As’ari dan Al Maturidi yang cenderung bersifat fatalistik. Kaum tradisionalis juga dituduh sebagai sekelompok masyarakat yang pasif terhadap dinamika modernitas, sebuah komunitas dimana para kiainya memegang ketat tradisi yang mati. Namun dengan merujuk pada sikap-sikap NU dalam perubahan, misalnya penerimaan terhadap azas tunggal Pancasila, Program Keluarga Berencana (KB) dan sebagainya telah membuktikan bahwa NU adalah komunitas dengan vitalitas yang cukup untuk menyerap dan berhubungan dengan perubahan sosial³⁴.

Secara tidak langsung Gus Dur hendak mengatakan bahwa perubahan-perubahan sikap NU bukanlah cerminan oportuniste namun justru memperlihatkan kelenturan, kekenyalan atau daya survival yang tinggi dari organisasi ini dalam

³⁴ Gus Dur dalam pengantar buku *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Opcit. Hal vii.

menghadapi perubahan. Kekenyalan itu pun tidak sekadar didorong pragmatisme politik namun yang lebih mengemuka adalah rujukan yang berasal dari keyakinan teologis.

Latar belakang seperti itulah yang kemudian melahirkan NU. Sehingga dapat dipahami jika konstitusi awalnya menyatakan organisasi ini merupakan *jam'iah diniyah* atau organisasi keagamaan. Lingkup aktifitasnya bergerak pada kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan ekonomi diantaranya meningkatkan komunikasi antar ulama, memperbaiki mutu sekolah Islam, menyeleksi kitab-kitab yang diajarkan di pesantren dan mendirikan badan-badan untuk membantu kegiatan pertanian dan perdagangan Islam.

Namun dibalik semua itu, ditengarai motif ekonomi dalam kerangka melindungi perdagangan kaum pribumi Islam merupakan salah satu motivasi didirikannya NU. Hal yang jamak pada masa itu, sebagian besar pendiri dan pemimpin NU merupakan saudagar, tuan tanah atau pebisnis yang sukses. Pendiri NU, KH Hasyim As'ari memiliki bisnis sebagai pedagang kuda, nila dan besi tua sekaligus produsen besar beras dan gula. KH Wahab Chasbullah adalah agen perjalanan haji dan pedagang ternama. KH Bisri Syamsuri memiliki banyak sawah dan juga berdagang. KH Wahid Hasyim, salah satu keturunan Hasyim Asy'ari, merupakan pengusaha dibidang tekstil dan impor.³⁵ KH. As'ad Syamsul Arifin meskipun dikenal sebagai penganut tarekat dan kiai yang hidup sederhana namun juga merupakan pengusaha sukses.³⁶ Data lainnya yang menunjukkan adanya motif

³⁵ Greg Fealy. *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta, LKiS, 1998. hal 56

³⁶ KH As'ad Syamsul Arifin meski dikenal sebagai kiai yang hidup sederhana namun memiliki kekayaan melimpah. Di Situbondo dan Asembagus, selain memiliki swah, tambak dan perahu, Kiai As'ad memiliki 7 toko besar, ada pula 2 restoran di kawasan Pasir Putih dan 1 restoran di Negara, Bali.

ekonomi dalam pembentukan NU adalah proses kesejarahan itu sendiri. Sebelum NU berdiri, KH Wahab Chasbullah pernah mencoba mendirikan organisasi bernama Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Pedagang) sebagai koperasi pedagang.³⁷

Semula Wahab juga menjadi anggota Syarekat Islam (SI) bahkan menjadi pengurus SI Cabang Mekkah.³⁸ SI didirikan di Solo pada 11 Nopember 1912. Organisasi ini merupakan pengembangan dari organisasi sebelumnya yaitu Syarekat Dagang Islam (SDI) yang dibentuk pada 16 Oktober 1905 oleh KH. Samanhoeddhi, M. Asmodimedjo, M. Kertotaruna, M. Sumowerdojo, dan M. Hadji Abdulradjak. Sesuai dengan namanya, latar belakang pembentukan SDI sangat kental dengan motif ekonomi.

Deliar Noer mengungkapkan, hal-hal yang melatarbelakangi berdirinya SDI. Yaitu, kompetisi yang meningkat dalam bidang perdagangan batik terutama dengan golongan Cina dan sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina dalam tahun 1911. Di samping itu, dirasakan pula tekanan oleh masyarakat Indonesia di Solo ketika itu dari kalangan bangsawan mereka sendiri. SDI dimaksudkan menjadi benteng bagi orang-orang Indonesia yang umumnya terdiri dari pedagang-pedagang batik di Solo terhadap orang-orang Cina dan para bangsawan tadi.³⁹ Gagasan Wahab untuk mendirikan Nahdlatul Tujjar mungkin juga diilhami dari pengalamannya menjadi

Selain itu juga memiliki rumah berlantai 7 di Mekkah yang disewakan sebagai penginapan haji. Lihat, KH. As'ad Syamsul Arifin, *Tokoh Karismatis yang Tampil di Saat Kritis* dalam Saefullah Ma'shum (Ed). *Karisma Ulama, Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung, Penerbit Mizan dan Yayasan Saefuddin Zuhri, 1998. Hal 158.

³⁷ Greg Fealy. *Ijtihad Politik Ulama, Opcit*, hal 30.

³⁸ Chorul Anam. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Opcit*, hal 28.

³⁹ Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Opcit*. Hal 115-116.

anggota SI selain refleksi pribadi sebagai pengusaha pribumi menghadapi persaingan dagang yang semakin kompetitif.

Di kalangan kader muda NU pada tahun 1970-an, muncul nama M Subchan ZE. Pada pertengahan tahun 1950-an, Subchan yang dikenal sebagai sosok karismatik dan flamboyan, telah berhasil menjadi pengusaha sukses dibidang *real estate*, perdagangan, penerbangan dan keuangan. Kekayaannya yang melimpah dibuktikan dengan kepemilikan beberapa rumah mewah di Jakarta dan Singapura dan juga villa-villa di beberapa tempat peristirahatan. Selain itu, Subchan juga menggemari mobil balap dan suka menerbangkan sendiri pesawat pribadinya. Hal yang sangat penting, Subchan dikenal memiliki koneksi luas di segala lapisan dan dengan sumber daya yang dimilikinya. Ia banyak membantu aktifitas NU, terutama dari segi pendanaan.⁴⁰ Melihat realitas itu tidak dapat dipungkiri bahwa dorongan, motif atau latarbelakang ekonomi turut berperan dalam proses kelahiran NU dan perkembangan organisasi selanjutnya.

2.2. Faktor Pendorong NU Memasuki Ranah Politik

Dalam perkembangan selanjutnya, NU juga memasuki wilayah pergerakan sosial politik. Keterlibatan itu dimulai dari bergabungnya NU ke dalam Al Majlisul Islami 'Ala Indonesia (MIAI) bersama Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al Irsyad dan beberapa organisasi Islam lainnya. NU juga mendukung berdirinya Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPPI) pada 1939. Secara formal, keterlibatan dalam dunia politik dimulai pada saat NU menjadi salah satu unsur organisasi dalam partai politik Islam

⁴⁰ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, *Opcit*, hal 304-305.

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Namun kiprah NU di Masyumi tidak berlangsung lama. Persinggungan kepentingan dan konflik lama antara kubu tradisional dengan modern kembali mengemuka di partai itu. Penggusuran peran politik kader NU di Masyumi yang dilakukan oleh kelompok Islam modernis dan intelektual Islam melahirkan kekecewaan politik pada kalangan NU.⁴¹

Setelah memutuskan keluar dari Masyumi, NU kemudian bermetamorfosis sebagai partai politik sendiri. Sebuah kondisi yang mungkin tidak pernah terbayang dalam benak pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari bahwa kelak dikemudian hari, organisasi yang dirintisnya itu akan bergerak dalam wilayah politik dan terlibat dalam pergulatan politik yang bersifat sekularistik dan dipenuhi dengan kepentingan pragmatis. Hasyim Asyari sendiri sejak awal juga terlibat dalam pergulatan politik itu. Pada saat bergabung dengan Masyumi, Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro. Pada masa perjuangan kemerdekaan, pendiri NU itu juga menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu kemudian berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Momentum penting pada masa itu adalah persetujuan dari golongan Islam (didalamnya termasuk KH Hasyim Asy'ari) untuk menghapus kalimat "*dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" dalam Piagam Jakarta. Pasca penghapusan kalimat itu, naskah Piagam Jakarta kemudian ditetapkan

⁴¹ Pada awalnya, peranan NU di Masyumi sangat dominan. Status NU secara organisatoris merupakan anggota istimewa Masyumi. Ketua Majelis Syuro Masyumi (dewan tertinggi partai) secara tradisi dijabat oleh orang-orang NU. Pengerdilan peran aktifis NU mulai semakin meningkat pasca Kongres Masyumi di Yogyakarta tahun 1949. Salah satu hasilnya, kewenangan Dewan Syuro di kerdilkan menjadi sebatas badan penasehat partai belaka. Kekecewaan itu yang ditengarai mendorong keluarnya NU dari Masyumi dan mendeklarasikan sendiri sebagai partai politik, partai NU. Lihat; Bahrul 'Ulum. *Bodohnya NU apa NU Di Bodohi? Jejak Langkah NU Era Reformasi; Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*. Semarang: Ar Ruzz Press & PW IPNU Jawa Tengah. 2002. hal 55-80.

menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta sering dimaknai sebagai pengurbanan, toleransi dan sumbangsih kelompok Islam terhadap republik ini.⁴²

Keraguan dari sebagian kalangan kadernya terhadap keputusan NU untuk menjadi partai politik, terjawab melalui pemilu 1955. NU berhasil membuktikan dirinya sebagai partai politik yang harus diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional. Dalam pemilu itu, NU mampu menempati posisi ketiga setelah PNI dan Masyumi dengan memperoleh 45 kursi DPR (18,4% suara). Di satu sisi, hasil itu semakin meneguhkan kepercayaan diri warga NU, namun disisi lain semakin menjadi magnet untuk menyeret NU ke dalam pergulatan politik yang lebih pragmatis dan mengabaikan khittah awal sebagai organisasi sosial keagamaan.

Tabel 2.1.
Hasil Pemilu 1955

Partai Politik	Jml Suara	%	Jml Kursi
PNI	8.434.653	22.3	57
Masyumi	7.903.886	20.9	57
NU	6.955.141	18.4	45
PKI	6.176.914	16.4	39

Sumber: Ichwan Ar. Kaderisasi, Konsolidasi dan Reformasi Internal Partai; PKB, Politik dan Kekuasaan

⁴² Proses lahirnya Pancasila dapat dibaca di A. Dahlan Ranuwihardjo. *Revolusi, Anti Imperialisme dan Pancasila*. Jakarta, Instrans, 2002. hal 55, 171 serta pidato Bung Karno di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, dicetak ulang oleh DPP PDI Perjuangan dengan judul *Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945*.

Pertarungan ketat dalam arena politik sampai-sampai membuat ulama NU terjebak dalam banalitas transformasi nilai keagamaan. Hal itu tercermin dalam tema dan pola kampanye yang sangat dangkal dan membodohi umat dengan cara mencampuradukkan subyektifitas politik dengan doktrin agama. Misalnya, sebagaimana diungkap Greg Fealy, dalam pemilu 1955 para juru kampanye Partai NU menyatakan kepada rakyat bahwa memilih partainya merupakan tiket masuk surga. Masih ditambah lagi dengan pernyataan bahwa mencoblos gambar NU berarti telah menjalankan amal saleh sebagai bukti berjuang di jalan Allah (*jihad fisabillah*). Sedangkan mendukung partai yang bertentangan dengan Islam adalah dosa.⁴³

Meskipun situasi politik pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin sangat fluktuatif namun kader NU ikut mengecap manisnya kekuasaan politik. Politik akomodatif yang dilakukan NU membuahkan hasil dengan mengintegrasikan diri menjadi bagian dari kekuasaan. Meskipun belum pernah menjadi partai penguasa, selama periode 1950-1967, kader NU cukup banyak yang duduk dalam kabinet sebagai menteri. Seperti dikutip dari buku *Ijtihad Ulama*,⁴⁴ diantaranya adalah KH Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama (Menag) pada Kabinet Natsir (6/9/1950-27/4/1951) dan Kabinet Sukiman (27/4/1951-3/4/1952). Kabinet Ali Sastroamidjoyo Pertama (30/7/1953-12/8/1955) melibatkan Zaenal Arifin sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam), KH Masjkur sebagai Menteri Agama, Mohammad Hanafiah dan Mr. Sunarjo sebagai Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kemudian, hanya dua orang NU duduk dalam Kabinet

⁴³ Greg Fealy. *Ijtihad Politik Ulama, Opcit*, hal 188.

⁴⁴ Greg Fealy. *Ijtihad Politik Ulama, Opcit*, lampiran 1.

Burhanuddin Harahap (12/8/1955-24/3/1956), yaitu Mr. Sunarjo menjabat Mendagri dan KH Mohammad Ilyas sebagai Menag.

Kabinet Ali Sastroamidjoyo Kedua (24/3/1956-9/4/1957) melibatkan KH Idham Chalid sebagai Waperdam Kedua, Mendagri Mr. Sunarjo, Menteri Perekonomian Mr. Burhanuddin, Menteri Sosial (Mensos) KH. Fatah Jasin dan Menag Mohammad Iljas. Pada Kabinet Karya (9/4/1957-10/7/1959) menteri-menteri dari NU adalah KH Idham Chalid (Waperdam), Prof. Drs. Sunardjo (Menteri Perdagangan), KH Mohammad Iljas (Menag), Mr. Sunarjo (Menteri Agraria) yang kemudian diganti Rahmat Muljomiseno dan kemudian ditambah dengan KH Wahid Wahab sebagai Menteri Kerjasama Sipil-Militer.

Menteri-menteri NU pada Kabinet Kerja (10/7/1959-27/8/1954) adalah KH Fatah Jasin (Menteri Muda untuk Hubungan dengan Ulama), KH Wahid Wahab (Menag) kemudian diganti KH Saefuddin Zuhri, Zaenul Arifin (Juru Bicara DPR Gotong Royong), KH Idham Chalid (Wakil Juru Bicara Kedua MPRS), KH Achmad Sjaechu (Wakil Juru Bicara Keempat DPR Gotong Royong).

Terdapat 5 menteri dan 2 orang pejabat setingkat menteri dari NU pada Kabinet Dwikora (27/8/1964-28/3/1966) yaitu; H. Aminudin Azis (Menteri Sekretaris Negara), KH Saefuddin Zuhri (Menteri Koordinator Urusan Agama), KH Mohammad Iljas (Menteri Hubungan Ulama-Pemerintah), KH Fatah Jasin (Menteri Negara Pembantu Menteri Koordinator Urusan Agama), KH Idham Chalid (Wakil Juru Bicara Kedua MPRS), H. Achmad Sjaichu (Wakil Juru Bicara Keempat DPR Gotong Royong) dan H. Mohammad Hasan (Tan Kiem Liong) sebagai Menteri Pendapatan, Pendanaan dan Pengawasan.

Setelah mengalami reshuffle, menteri NU yang bertahan di kabinet tinggal KH Idham Chalid (Waperdam Kedua), KH Saefuddin Zuhri (Menag) dan H. Aminuddin Aziz (Menteri Pengembangan Masyarakat Desa) serta H. Achmad Sjaichu sebagai Sekretaris Front Nasional. Jumlah itu menyusut lagi menjadi 2 orang pada Kabinet Ampera (25/7/1966-6/6/1968), yaitu; KH Idham Chalid (Menteri Utama Kesejahteraan Rakyat) dan KH Saefuddin Zuhri (Menag). Zuhri kemudian diganti oleh KH Mohammad Dachlan pada 17/10/1967.

Meskipun partai-partai politik besar dihabisi oleh rejim Orba pasca perubahan politik 1965⁴⁵, NU dapat selamat dalam masa perubahan itu. Hal itu tidak lepas dari sikap politik NU yang berubah total dari sikap loyal kepada Bung Karno kemudian berbalik badan menjadi bagian dari kekuatan yang menamakan dirinya Orde Baru. Keterlibatan itu termasuk dalam operasi penumpasan PKI pasca peristiwa G30S/1965. Dalam kerangka itu, PBNU mendirikan Badan Koordinasi Keamanan Jam'yah Nahdlatul Ulama (BKKJNU) dengan tujuan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kampanye anti PKI.⁴⁶ Namun lebih dari sekadar kampanye, tindakan kekerasan pun gerakan NU tersebut. Dalam konteks itu, Greg Fealy menulis sebagai berikut:

Tidak diragukan, para anggota NU telah mendapatkan pengarahan dari pimpinannya mengenai aksi kekerasan massal melawan PKI. PBNU sejak lama menyadari adanya kebencian yang mendalam terhadap komunis yang berkembang di tingkat cabang sehingga hanya diperlukan sedikit dorongan untuk mengobarkan

⁴⁵ Partai besar yang menjadi korban pembersihan Orba adalah PKI dan PNI. PKI dibubarkan dan dijadikan partai terlarang. Sebagian besar aktifisnya ditangkap, dipenjara dan dibuang ke Pulau Buru, sebagian diantaranya dibunuh secara massal dalam upaya pemberantasan PKI pasca G30S/1965. PNI terpecah menjadi 2 faksi, Osa-Usep dan Ali-Surachman. Faksi Ali-Surachman yang kemudian distempel sebagai PNI Asu menjadi target pembersihan. Menjelang pemilu 1971, PNI merupakan korban utama kebijakan politik bulldoser dari penguasa Orba. Selengkapnya dapat dibaca pada; Ichwan Ar, *Pembersihan Kaum Kiri Nasionalis Radikal* dalam *Sketsa Pergolakan GMNI*. Semarang, BP UNDIP, DPC GMNI Semarang, Patriot Centre, 2006. Hal 31-37.

⁴⁶ Greg Fealy. *Ijtihad Politik Ulama, Opcit*, hal 330.

*amarah para santri. Walaupun kata **pembunuhan** atau **pembantaian** tidak digunakan secara terang-terangan, instruksi tertulis yang ditujukan kepada setiap cabang seringkali memuat kata-kata **menumpas, membersihkan, menghabisi, mengganyang** dan **mengikis habis**....bagi anggota NU yang sangat antikomunis, kata-kata itu merupakan seruan untuk benar-benar secara fisik menghapus jejak komunisme.⁴⁷*

Meskipun menjadi bagian dari kekuatan Orba, bahkan memberikan kontribusi besar dalam penghancuran PKI, pada akhirnya NU tetap tidak dapat masuk dalam lingkaran kekuasaan. Bahkan selepas pemilu 1971, Partai NU dipaksa menelan “pil pahit” dari penguasa Orba untuk melakukan fusi dengan partai-partai Islam lainnya. Kebijakan fusi pada 1973 itu telah mengubur eksistensi NU sebagai partai politik. Statusnya berubah menjadi sekadar salah satu unsur dalam partai baru hasil fusi, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pergulatan politik kader NU di PPP juga tidak lebih baik. Persaingan lama dengan kelompok Islam modernis pun tidak lantas berakhir. Pertarungan ketat dengan unsur Muslimin Indonesia (MI) menciptakan momentum-momentum politik yang seringkali dimaknai sebagai marginalisasi terhadap NU.⁴⁸

Akumulasi marginalisasi politik yang dialami kader-kader NU membuahkan refleksi untuk perubahan. Diantara hasil refleksi itu adalah mengkaji ulang keberadaan NU di PPP. Selain itu, sikap politik PPP, khususnya yang berasal dari unsur NU yang dinilai tidak selalu sejalan dengan kehendak pemerintah bahkan cenderung bersikap oposan ikut mendorong terjadinya alienasi politik yang lebih

⁴⁷ Greg Fealy. *Ijtihad Politik Ulama, Opcit*, hal 333.

⁴⁸ Marginalisasi antara lain dilakukan oleh Ketua Umum PPP HJ Naro dengan cara melakukan pengusuran calon legislatif (caleg) PPP dari unsur NU pada pemilu 1982. Pengusuran itu terutama ditujukan pada tokoh-tokoh terkemuka NU yang bersikap kritis terhadap kepemimpinan Naro. Selain itu, selalu terjadi persaingan sengit antara MI dan NU dalam memperebutkan jabatan Ketua Umum PPP. Pada pemilu 1987 (pasca kembali ke khittah 1926) NU melakukan tindakan yang sering disebut penggemosan terhadap PPP dengan hasil yang cukup signifikan. Perolehan suara PPP merosot drastis. Suara NU diperkirakan banyak lari ke Golkar.

dalam terhadap NU.⁴⁹ Keterkucilan NU dari perhatian pemerintah membuat perkembangan organisasi ini (khususnya dari sisi kelengkapan sarana prasarana) bergerak lebih lamban di banding organisasi massa serupa yang mendapat *back up* penuh dari pemerintah.

Kebijakan rezim Orde Baru untuk merangkul kalangan Islam dilakukan melalui penyaluran bantuan keuangan kepada ormas-ormas Islam yang dinilai akomodatif terhadap penguasa, pembentukan ormas-ormas Islam yang berafiliasi kepada Golkar dan melakukan tindakan represif terhadap kelompok Islam yang dinilai radikal dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Selain itu, penerapan Pancasila sebagai azas tunggal bagi semua partai politik dan ormas merupakan cara untuk menghalangi munculnya kelompok-kelompok radikal yang berbasis agama, khususnya Islam.⁵⁰

Sinkretisme motif ditambah dengan kebutuhan membangun hubungan strategis dengan penguasa menjadi latar belakang untuk mengembalikan peran organisasi itu sebagaimana semangat awal pendirian. Sikap itu yang kemudian dikenal dengan slogan kembali ke *khittah 1926*. Setelah melalui proses refleksi dan pergulatan pemikiran yang panjang, keputusan untuk kembali ke *khittah 1926* itu ditetapkan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo Jawa Timur pada 1984. Keputusan politik lainnya dalam muktamar itu adalah penerimaan azas tunggal Pancasila.⁵¹

⁴⁹ Sikap oposisi itu misalnya, dalam SU MPR 1978, Fraksi PPP melalui anggota-anggota dari unsur NU melakukan *walk out* karena tidak menyetujui rancangan Ketetapan MPR Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Laode Ida. *Anatomi Konflik NU, Elite Islam dan Negara*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan., 1980. Hal 44.

⁵⁰ Mengenai penyikapan kalangan Islam terhadap kebijakan azas tunggal, lihat; Deliar Noer. *Islam, Pancasila dan Azas Tunggal*. Jakarta, Yayasan Perkhidmatan 1983.

⁵¹ Penyusunan konsep Khittah 1926 dilakukan oleh *Tim Tujuh Untuk Pemulihan Khittah NU 1926*. Tim itu terdiri dari; Abdurrahman Wahid, HM Zamroni, Said Buairy, Mahbub Junaedi, Fahmi Saefuddin,

Lintas sejarah (terutama dimasa Orba) yang sebenarnya penuh dengan cerita kekalahan dan marginalisasi politik tidak cukup kuat untuk mengubur hasrat politik warga NU. Pasca penerapan Khittah 1926, kader-kader NU dalam melakukan aktualisasi politik tidak lagi terpaksa di PPP. Politisi NU mulai banyak “bertebaran” di Golkar dan sebagian kecil di PDI. Gejolak politik itu terus berlanjut dan memperoleh saluran yang lebih terbuka setelah terjadi perubahan politik pada tahun 1998.

2.3. Syahwat Politik NU dan Pembentukan PKB

Reformasi politik 1998 memunculkan kebijakan liberalisasi politik yang ditandai dengan perubahan 5 Paket UU Politik.⁵² Perubahan itu membuka kesempatan untuk memunculkan partai baru. Sejalan dengan hal itu, desakan agar NU bermain kembali dalam ranah politik mulai menguat kembali, terutama dari lapisan elite dan kalangan muda NU. Gejolak itu semakin memperoleh dukungan luas seiring dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto. Dalam konteks itu, KH Yusuf Muhammad mengemukakan, *“Warga NU itu mempunyai nafsu bahkan syahwat politik cukup besar. Khittah 1926 sebenarnya bagian dari sikap politik warga NU untuk menyasiasi keadaan saat itu. Ketika Soeharto lengser, nafsu politik itu tercurah dalam keinginan membuat partai. Saya ingat betul, dalam pertemuan pertama di Rembang yang*

Daniel Tanjung dan Ahmad Bagya. Lihat; Kacung Marijan. *Quo Vadis NU setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta, Erlangga, 1992. Hal 40.

⁵² Lima Paket UU Politik itu adalah; (1) UU No. 1 Tahun 1985 Tentang Pemilu Badan Permusyawaratan/Perwakilan. (2) UU No. 2 Tahun 1985 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. (3) UU No. 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya. (4) UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (5) UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Referendum. Menjelang Pemilu 1999, UU Politik itu mengalami perubahan dengan terbitnya UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu dan UU no. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Sebagai imbas perubahan itu adalah terciptanya sistem politik multi partai dan pemilu yang lebih demokratis.

*digelar sekitar setengah bulan setelah Soeharto lengser, ulama dan semua tokoh NU dari semua aliran hadir disana”.*⁵³

Syahwat politik yang tinggi dikuatkan lagi oleh fakta-fakta sebagaimana dituturkan dalam kronologi berdirinya PKB.⁵⁴ Sehari setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur, PBNU mulai kebanjiran usulan untuk mendirikan partai politik. Usulannya beragam, ada yang hanya mengusulkan agar membentuk partai politik, ada pula yang mengusulkan nama partai politik namun ada pula yang mengusulkan secara lengkap mulai dari konsep/*platform*, nama dan lambang partai serta hubungan kelembagaan antara NU dengan partai baru tersebut.

Dalam kronologi itu disebutkan, ada 39 nama yang diusulkan. Nama yang paling banyak muncul adalah Partai Nahdhatul Ummah, Partai Kebangkitan Umat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan unsur-unsur yang banyak diusulkan untuk lambang partai adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada pula yang mengusulkan bentuk hubungan partai baru dengan NU, visi misi dan AD/ART partai baru serta sekaligus nama-nama calon pengurus. Usulan paling lengkap muncul dari Lajnah Sebelas Rembang dan PWNNU Jawa Barat.

PBNU cenderung bersikap hati-hati dalam menanggapi usulan tersebut. Alasan yang dikemukakan secara formal adalah kenyataan hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo telah menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun demikian, sikap itu dapat dibaca sebagai bentuk *test case* untuk menguji seberapa besar kekuatan politik warga NU mengingat membuat partai baru

⁵³ Petikan dikutip dari Bahrul ‘Ulum. *Opcit.* Hal 8. Cetak miring dari penulis.

⁵⁴ Kronologi berdirinya PKB dikutip dari situs DPP PKB. <http://www//dpp-pkb.org>, diakses pada 1 September 2007.

tidak seperti pertunjukan sulap, *sim salabim* langsung terjadi perubahan wujud. *Test case* itu juga ditujukan pada kekuatan politik yang dapat kompetitor bagi partai baru yang akan didirikan. Sikap PBNU itu dinilai lamban sehingga banyak pihak yang tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya partai politik baru untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantaranya adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Melihat perkembangan itu, akhirnya PBNU mengadakan rapat Syuriyah dan Tanfidziyah pada 3 Juni 1998. Hasil rapat itu memutuskan dibentuk Tim Lima dengan tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Susunan Tim Lima sebagai berikut; Ketua; KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU) dengan anggota terdiri dari KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU).

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 20 Juni 1998 memberi surat tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi terdiri dari Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Arifin Djunaedi sebagai ketua dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima

menginventarisasi dan merangkum usulan pembentukan partai politik baru serta menyusun konsep partai yang dapat menampung aspirasi warga NU.⁵⁵

Jejak sejarah terus berlanjut, pada 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Kemudian, pada 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan partai politik baru. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pada akhirnya, partai baru itu dideklarasikan pada 23 Juli 1998 di rumah Gus Dur di Ciganjur, Jakarta dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Deklaratornya adalah para tokoh terkemuka NU, yaitu; KH Ilyas Ruhiyat, KH Muchith Muzadi, KH Munasir Ali, KH Abdurrahman Wahid dan KH Mustofa Bisri. Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur tidak masuk dalam struktur awal kepengurusan PKB. Posisi-posisi kunci diduduki oleh sebagian besar anggota Tim Lima dan Tim Asistensi. Namun tindakan dan kebijakan Gus Dur selaku Ketua Umum PBNU jelas terlihat *mbackup* penuh partai baru itu. Dalam berbagai kesempatan Gus Dur selalu menyatakan PKB sebagai satu-satunya partai yang

⁵⁵ Tentang Tim Lima dan Tim Asistensi, PBNU mengeluarkan surat tugas No. 925/A.II.03/6/1998 tanggal 22 Juni 1998. Surat itu merupakan mandat yang diberikan PBNU kepada Tim Lima dan Tim Asistensi dalam memfasilitasi pembentukan partai baru bagi warga NU. Nama-nama yang menjadi anggota Tim Lima dan Tim Asistensi tercantum dalam surat tersebut.

didirikan oleh PBNU. Ia juga menegaskan pada saatnya akan cuti dari jabatan Ketua Umum PBNU untuk melakukan kampanye bagi PKB.⁵⁶

Hal menarik dalam pendirian partai baru itu antara lain keputusan untuk tidak mendirikan partai politik yang berazaskan Islam. Rujukan atau narasi awal yang dijadikan sebagai dasar pembentukan partai sebagaimana tertuang dalam naskah deklarasi dan *Mabda' Siyasiy* PKB adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bukan nilai atau cita-cita politik negara Islam. Petikan naskah itu sebagai berikut:⁵⁷

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi; tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/keputusan yang telah disepakati bersama.

..... Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah Swt, serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa. (Petikan Naskah Deklarasi PKB)

Sedangkan dalam Mabda' Siyasiy ditulis sebagai berikut:

⁵⁶ Dalam susunan kepengurusan PKB periode 1998-2000, Ketua Dewan Syuro dijabat oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Syuriah PBNU), Sekretaris Dewan Syuro diduduki oleh KH. Drs. Moh. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU). Sedangkan pada jajaran Dewan Tanfidz, Ketua Umum dijabat oleh mantan Sekretaris Jenderal PPP Mathori Abdul Djaliil. Muhaimin Iskandar (mantan Ketua Umum PB PMII) ditempatkan sebagai Sekretaris Jenderal. Lihat lampiran susunan kepengurusan DPP PKB periode 1998-2000. Gus Dur secara resmi menjadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB setelah terpilih pada Mukhtamar I PKB di Surabaya tahun 2000.

⁵⁷ Naskah Deklarasi merupakan ungkapan komitmen terhadap nilai-nilai yang akan diperjuangkan dan cerminan cita-cita politik yang hendak diwujudkan oleh sebuah organisasi. *Mabda' Siyasiy* merupakan ruh atau jiwa dan merupakan sumber nilai dari segala kegiatan PKB.

1. *Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.*

2. *Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicitakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-'adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta'awun) dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus selalu ditegakkan...*

Banyak hal yang dapat dianalisa dibalik keputusan itu. *Pertama*, Gus Dur menginginkan citra politik personalnya sebagai tokoh pejuang demokrasi dan pluralis tetap terjaga⁵⁸. Selain itu, citra NU sebagai kelompok Islam moderat dan inklusif juga tidak terganggu. Maka akan terasa sangat kontradiktif jika partai yang dibentuk oleh NU justru bersifat sektarian dan eksklusif.

Kedua, meskipun NU dikenal sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia namun realitas politik mengungkapkan bahwa belum pernah ada dalam sejarah

⁵⁸ Gus Dur dikenal sebagai sosok/ikon demokrasi, tokoh pluralis maupun pembela hak azasi manusia serta sangat dekat dengan kelompok-kelompok minoritas di Indonesia. Sikap itu seringkali mengundang kritik dan kecaman dari kalangan Islam serta sebagian kalangan NU. Stigma negatif itu muncul dalam bentuk hujatan, rumor dan isu negatif tentang Gus Dur, seperti tuduhan sebagai agen Yahudi, agen Kristenisasi dan sebagainya. Stigma itu merupakan reaksi terhadap aktifitas Gus Dur yang dinilai kontroversial dan kadangtidak mengindahkan saran/pandangan para ulama NU. Keterlibatan Gus Dur sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Forum Demokrasi (FD) semakin meneguhkan citra dirinya sebagai pejuang demokrasi dan tokoh alternatif untuk perubahan. Forum ini dibentuk pada 16-17 maret 1991 di Cisarua Bogor. FD beranggotakan orang-orang dari latarbelakang sosial politik, etnis dan agama yang berbeda-beda. Tercatat diantaranya, seperti Daniel Dakhidae, Rahman Toleng, Romo Mangunwijaya, Magnis Soeseno, Manuel Kassieppo dan sebagainya. Pada saat yang sama, pemerintah sedang memfasilitasi berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Gus Dur menolak keberadaan ICMI dan memilih mendirikan FD. Forum ini sempat dikecam oleh pemerintah orde baru sebagai upaya untuk menjatuhkan citra pemerintah.

pergerakan politik di Indonesia, kekuatan politik Islam dapat memenangkan pertarungan politik nasional. Apalagi pentahbisan sebagai ormas terbesar itu lebih banyak bersifat klaim atau pencitraan belaka. Klaim itu pun sulit untuk dibuktikan dengan dukungan secara administratif, misalnya daftar anggota. Hal lainnya, perolehan suara NU pada pemilu 1955 dan 1971 serta perolehan suara PPP selama pemilu di masa Orba tidak berbanding lurus dengan klaim jumlah anggota NU. Oleh karena itu, partai yang didirikan harus dapat memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok Islam di luar NU.⁵⁹

Ketiga, pilihan sebagai partai terbuka juga sebagai strategi untuk memperoleh dukungan dari kelompok minoritas dan dukungan pemilih dari luar Jawa. Kenyataan memperlihatkan, basis dukungan NU terkonsentrasi di Jawa, itupun hanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selebihnya membentuk pola kantong-kantong yang tidak merata. Dukungan itu diharapkan tidak hanya dalam bentuk afiliasi politik namun juga logistik, terutama dari minoritas etnis Tionghoa yang banyak bersimpati pada Gus Dur.

2.4. Dualisme PKB Sebagai Partai Terbuka

Namun keterbukaan itu juga masih memuat kontradiksi dan bersifat setengah hati. Setidaknya masih menimbulkan tanda tanya bagi kalangan di luar NU. Salah satu hal yang memancing pertanyaan itu adalah simbolisme Islam atau NU yang masih diekspose secara jelas dalam lambang, istilah-istilah politik, struktur partai dan ritual

⁵⁹ Warga NU sering menyebut dirinya sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota sekitar 30-49 juta. Namun data itu sulit dibuktikan secara riil karena lemahnya sisi administrasi. Hasil pemilu 1955 dan 1977 Partai NU memperoleh dukungan sekitar 18% suara. Sedangkan perolehan suara PKB pada Pemilu 1999 dan 2004 hanya dibawah 15%.

seremoni kegiatan partai. Lambang PKB sangat jelas mengadopsi dari lambang NU (bola dunia dan bintang sembilan). Istilah-istilah politik dalam komunikasi politik keseharian para aktifisnya sangat kental dengan nuansa NU. Struktur partai terdiri dari lembaga Syuro sebagai lembaga tertinggi dengan kewenangan ada pada perumusan kebijakan secara umum dan lembaga Tanfidz sebagai institusi pelaksana (eksekutif), merupakan adopsi serupa dari NU (Syuriah dan Tanfidziah). Kosakata politik banyak memakai bahasa Arab yang bagi sebagian besar masyarakat kita masih memandangnya sebagai hal yang lekat dengan Islam.

Seremoni kegiatan partai kental dengan nuansa Islam dan tradisi NU. Misalnya, pembukaan acara selalu diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al Qur'an. Pidato-pidato pimpinan partai selalu diawali dengan mukadimah berbahasa Arab sebagaimana lazimnya dalam forum pengajian NU. Hampir semua aktifisnya (laki-laki dan perempuan) dalam kegiatan partai selalu memakai baju muslim. Pemakaian peci dengan memperlihatkan dahi bagi laki-laki dan jilbab bagi perempuan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas itu. Ulama/kiai, yang berada di struktur partai maupun di luar struktur, kebanyakan memakai sarung, surban atau peci haji dan kain (mirip selendang) yang diselempangkan di bahu. Kadang-kadang atribut itu masih ditambah dengan untaian tasbeih yang selalu terenggam ditangannya.

Kegiatan-kegiatan partai banyak dilakukan di pesantren meskipun hanya sekadar ritual pembukaan acara. Selain itu, secara pribadi, sebagian elite PKB sering menyelenggarakan acara-acara bersifat ritual keagamaan seperti *mujahadah*, *ziarah kubur* dan sebagainya. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar misalnya, menyelenggarakan *mujahadah* di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI setiap hari rabu

dengan interval waktu 35 hari. Begitupula Wakil Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB H. Arifin Junaedi, dalam kurun waktu tertentu ia juga menyelenggarakan *mujahadah* di rumah pribadinya dengan mengundang tokoh-tokoh partai dan tokoh masyarakat lainnya.

Elite-elite PKB di daerah pun melakukan hal yang sama. Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dan Ketua DPW PKB Jawa Tengah secara rutin menggelar *mujahadah* di rumah dinasny. Selain sebagai forum doa bersama, forum-forum itu sering dijadikan ajang konsolidasi politik secara institusional maupun personal. Dalam konteks itu, kehadiran peserta *mujahadah* terutama dari kalangan kiai akan semakin meneguhkan citra akseptabilitas, legitimasi sekaligus dukungan politik dari kalangan ulama terhadap kapasitas, posisi dan peran politik dari elite PKB tersebut.

Merujuk penjelasan dari Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah Drs. Cholidy Ibhar, MA, bagi sebagian tokoh partai terutama kiai, pilihan ayat Al Qur'an dan mukadimah yang dibaca dalam pembukaan suatu acara menjadi hal utama yang sangat diperhatikan. Bahkan menjadi menjadi dasar penilaian terhadap yang figur bersangkutan, terutama menyangkut kadar keislaman dan ke-NU-an. Pilihan ayat Al Qur'an itu harus sesuai dengan tema acara, sedangkan mukadimah pidato selain harus memenuhi kaidah seperti layaknya puisi (memakai kaidah aa/bb, suku kata terakhir harus berbunyi sama, misalnya; *bismillah alhamdulillah washolatuwassalu'ala*

rasulillah wa'ala alihi wasobihi wama wallah) juga ada tema-tema tertentu. Kefasihan pelafalan bahasa Arab itu menjadi menjadi hal yang sensitif.⁶⁰

Hal lain yang semakin melekatkan citra PKB sebagai partai terbuka setengah hati adalah dalam ikrar pengurus. Naskah janji atau ikrar pengurus (dalam istilah resmi PKB adalah *bai'at* Pengurus) secara tegas menyebutkan bahwa anggota dewan pengurus PKB berkewajiban mengikuti garis perjuangan NU dan *As Salafus Shalih* dalam melaksanakan *amar ma'ruf dan nahi munkar*. Berikut ini naskah Bai'at Pengurus DPP PKB:

Dengan memohon rahmat, taufiq dan maghfirah Allah Subhanahu wata'ala, dengan ini berikrar:

Sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, kami senantiasa siap untuk berjuang demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, kami siap melaksanakan segala tugas, wewenang dan tanggungjawab sebaik-baiknya dan senantiasa taat kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, kami selalu setia kepada prinsip perjuangan partai; yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wata'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan, sesuai nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal jama'ah.

Sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, kami senantiasa mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin, serta terciptanya tatatan internasional yang demokratis, terbuka dan berakhalul karimah.

*Sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, kami senantiasa mengikuti garis perjuangan Nahdlatul Ulama dan As Salafus Shalih dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar.*⁶¹

Kata-kata kunci dalam bai'at itu adalah NKRI, Islam *Ahlussunnah wal jam'ah*, NU dan *As Salafus Shalih*. Bagi kader PKB yang berangkat dari NU tentu tidak sulit

⁶⁰ Wawancara dengan Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah Drs. Cholidy Ibar, MA pada 1-5 September 2007.

⁶¹ Naskah Bai'at Pengurus DPP PKB dalam dokumen Partai, Menyambut Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa 1998.

menerima bai'at itu. Namun hal yang sama belum tentu didapat dari kader-kader PKB yang berlatarbelakang non NU atau non muslim. Sulit diterima dalam logika, seorang non muslim menjadi bagian dari kaum *Ahlussunah wal jama'ah* sementara keyakinan spiritualnya berbeda dengan hal itu.

Di tingkat basis massa, terutama di daerah-daerah basis PKB, konsep partai terbuka ini pun belum sepenuhnya diterima. Sebagian diantaranya justru mengkritik keras sikap atau pandangan yang menyebutkan PKB sebagai partai non Islam, lebih dikatakannya partai sekuler. Mereka memandang bahwa PKB sama dan sebangun dengan NU. Sehingga sulit dibayangkan bagi kader PKB non muslim atau muslim non NU menghadapi basis massa seperti itu. Dorongan pilihan atau motivasi utama memilih PKB pun lebih banyak karena merasa sebagai warga NU, sehingga wajib untuk mendukung dan memilih PKB.⁶²

Kondisi itu sudah terjadi pada saat proses berdirinya PKB. Sebagian tokoh NU yang tidak setuju dengan PKB disebabkan oleh persoalan azas non Islam. Alasan lainnya adalah konsistensi Khittah 1926 dan kuatnya nepotisme dalam pembentukan PKB. Tuduhan nepotisme itu berpijak pada struktur pengurus yang didominasi kalangan dekat Gus Dur. Misalnya Ketua Umum DPP PKB dijabat oleh Mathori Abdul Djalil. Sejak lama orang mengenalnya sebagai tangan kanan dan operator kebijakan politik Gus Dur. Posisi Sekretaris Jenderal diduduki Muhaimin Iskandar. Selain sebagai mantan Ketua Umum PB PMII, Muhaimin merupakan salah satu

⁶² Pengalaman penulis memberikan materi kaderisasi di hadapan kader-kader PKB tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Pengurus Ranting (PRt) di Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Tegal pada pertengahan tahun 2006 selalu mendapat respon yang keras pada saat menjelaskan jati diri PKB sebagai partai terbuka dengan segala konsekuensi, konsistensi dalam sikap dan perilaku politiknya.

keponakan Gus Dur. Di jajaran Dewan Syuro, posisi strategis juga diduduki orang dekat Gus Dur seperti KH Ma'ruf Amin dan KH Cholil Bisri.

Penilaian nepotisme itu semakin kuat pada saat, Yenny Wahid, puteri Gus Dur menjadi salah satu pengurus DPP PKB. Yenny bahkan kemudian menggantikan posisi Ir. HM Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasil Muktamar II Semarang tahun 2004. Edy diberhentikan sebagai Sekretaris Jenderal setelah diangkat menjadi Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) pada Kabinet Indonesia Bersatu menggantikan Saefullah Yusuf, mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Diantara kelompok kontra itu muncul nama-nama seperti KH Yusuf Hasyim (paman Gus Dur) yang sejak dulu dikenal selalu berseberangan dengan Gus Dur, Solahudin Wahid (adik kandung Gus Dur), Abu Hasan (rival terberat Gus Dur dalam Muktamar NU di Cipasung Tahun 1994), KH Alawy Muhammad, KH Syukron Makmun dan beberapa ulama lainnya. Tokoh-tokoh itu kemudian mendirikan partai sendiri. Solahudin dengan Partai Kebangkitan Umat (PKU), Syukron Makmun mendeklarasikan Partai Nahdlatul Ummat (PKNU) dan Abu Hasan mendirikan partai Serikat Uni Nasional Indonesia (SUNI), sedangkan Alaway menyatakan tetap di PPP.

Namun jika dilihat lebih jauh, motif utama adalah kekecewaan terhadap PBNU (dalam hal ini lebih kepada personal Gus Dur) yang tidak mengakomodasi faksi-faksi itu ke dalam partai baru. Pada masa itu, pengaruh Gus Dur di kalangan NU sangat kuat dan memiliki pendukung di tingkat basis massa yang fanatik. Oleh karena itu, Gus Dur cenderung mengabaikan suara-suara minor dari tokoh-tokoh tersebut.

Di kalangan elite PKB pun masih ada sikap resistensi terhadap rekrutmen pengurus yang berasal dari kalangan non NU. Sentimen NU dan non NU sangat

mengental, apalagi menjelang proses pemilihan kepengurusan dan pemilihan calon legislatif seperti muktamar, musyawarah wilayah dan forum-forum sejenis itu. Beberapa aktifis muda non NU yang tertarik untuk masuk PKB merasakan sikap seperti itu. Isu PKB asli, PKB *kos-kosan, minna dan minhum (kita dan mereka)*, dan sebagainya menjadi bagian dari ekspresi resistensi tersebut.⁶³

Fenomena itu dapat dianalisa sebagai berikut; *Pertama*, elite PKB masih belum meyakini adanya dukungan dari luar NU. Oleh karena itu partai baru ini masih harus dicitrakan sebagai partainya orang NU. Sebagai partai baru, PKB harus memanfaatkan jaringan dan infrastruktur NU yang sudah mengakar sampai tingkat basis massa. *Kedua*, elite-elite PKB belum siap secara konsisten menerapkan keterbukaan partainya dalam pengertian partai terbuka secara utuh. Karena salah satu konsekuensinya, semua posisi dalam partai dapat diisi oleh siapapun tak terkecuali berasal kader partai non NU. Dalam konteks ini, bukan rahasia lagi jika dari sisi aspek kualitas dan kapasitas politik, sebagian besar kader NU masih lemah dan sulit untuk bersaing secara terbuka dengan kelompok lainnya.

Ketiga, PKB harus berhadapan dengan kompetitor yang memperebutkan konstituen dalam ruang dan wilayah yang sama. Dalam konteks itu, masih banyak kader NU yang tetap bertahan di PPP. Ada pula yang di Partai Golkar dan beberapa

⁶³ Dalam penuturannya kepada penulis, Sukirman salah satu kader PKB mengemukakan, meskipun sudah lama aktif dalam kegiatan politik di PKB Kota Semarang dan Jawa Tengah, namun sampai saat perbincangan ini dilakukan, namanya selalu gagal masuk jajaran pengurus. Ia merasa latarbelakang sebagai mantan aktifis Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi ganjalannya. Alasan itu pula yang diterimanya dari salah satu anggota formatur pada saat penyusunan pengurus DPW PKB Jawa Tengah hasil Muswilub di Kudus tahun 2005. Selain itu, Sukirman menceritakan, meskipun dalam seleksi caleg PKB untuk DPRD Kota Semarang pada pemilu 2004, ia memperoleh nilai tertinggi namun namanya tetap ditaruh pada urutan bawah daftar caleg. Pasca Muswilub PKB Jawa Tengah di Kudus tahun 2005, Sukirman dikenal dekat dengan Abdul Kadir Karding yang terpilih sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Belakangan ini, setelah konflik episode Muhaimin Iskandar memasuki babak kasasi, Sukirman diangkat menjadi Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Jawa Tengah dan menjadi Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Daerah Pemilihan Jateng X dengan No urut 1.

partai lainnya. Namun, melihat jejak sejarah dan segmen konstituen, kompetitor paling utama adalah PPP. Selain tokoh-tokoh NU di PPP memiliki basis tersendiri. Elite partai itu juga mempropagandakan diri sebagai partainya orang NU, partainya orang Islam dan menegaskan perbedaannya dengan PKB sebagai partai sekuler. Begitu kerasnya persaingan dengan PPP sampai menimbulkan konflik dan gesekan fisik diantara para pendukungnya. Misalnya pada masa kampanye pemilu 1999 di Pekalongan, Jepara dan Demak, muncul konflik fisik yang sangat keras di antara para pendukung PPP dan PKB. Konflik itu tidak lepas dari peran elite kedua partai, termasuk para kiai yang melakukan agitasi atau pidato-pidato secara provokatif dalam kampanyenya.⁶⁴

Sejarah membuktikan, dalam dua kali pemilu (1999 dan 2004), perolehan kursi PKB untuk DPR selalu kalah jumlah dari PPP. Pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca runtuhnya rezim Soeharto diikuti 48 partai. Pemilu itu menghasilkan 6 partai besar, yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, PPP, PKB, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Kemudian diikuti partai-partai kecil seperti Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis (PNI FM), Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen (PNI MM), Partai Nadhlatul Ummah (PNU), Partai Persatuan (PP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta beberapa partai kecil lain yang tidak memperoleh kursi. Hasil

⁶⁴ Cerita mengenai kerasnya pidato dan letupan konflik dalam kampanye PPP dan PKB sebagian diantaranya dituturkan oleh beberapa kader partai itu maupun tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan Dongos Kabupaten Jepara. Wedung dan Dongos merupakan wilayah perbatasan dua kabupaten itu. Cerita serupa dikemukakan H Fauzi dan Hadi Yassin, tokoh masyarakat yang melihat langsung peristiwa konflik PKB dan PPP di Buaran Pekalongan. Wilayah-wilayah itu merupakan basis NU yang memiliki orientasi politik fanatik ke PPP dan PKB.

pemilu 1999 menunjukkan, tidak ada satu partai yang mampu memperoleh suara mayoritas (lebih dari 50%). Meskipun memenangkan pemilu 1999, PDIP hanya dapat menguasai sekitar 30% kursi parlemen.

Peta dukungan tidak jauh bergeser dengan masa pemilu 1955. PDIP sangat kuat di Jawa, didukung kelompok abangan, pengusaha dan mantan pendukung PNI. Golkar, masih kuat baik di Jawa maupun luar Jawa, terutama Indonesia Timur, didukung kelompok profesional, birokrat, pengusaha. PPP setelah berdirinya PKB tinggal memperoleh dukungan dari muslim modernis di luar Jawa, terutama di Sumatera dan Sulawesi. PKB membasiskan diri pada muslim tradisional di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. PAN, didukung sebagian Islam modernis dan intelektual. PBB memperoleh dukungan kuat dari luar Jawa, terutama basis massa eks Masyumi.

BAB III

MENGURAI AKAR KONFLIK PKB

3.1. Kinerja Politik dan Bibit Konflik

Amandemen UUD 1945 mempengaruhi sistem pemilu 2004. Pemilu itu selain diikuti oleh 24 partai juga diikuti oleh calon independen untuk DPD (lembaga baru sebagai perwakilan daerah). Hasilnya cukup mengejutkan, Partai Golkar mampu meraih suara terbanyak (21,58%) 128 kursi DPR, disusul PDIP (18,53%) 109 kursi, PKB (10,57%) 52 kursi, PPP (8,15%) 58 kursi. Kejutan lainnya Partai Demokrat mampu meraih (7,45%) 57 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perolehan suaranya melejit menjadi (7,34%) 45 kursi. Untuk pertamakali dalam sejarah politik Indonesia, Presiden RI dipilih langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono, ikon Partai Demokrat terpilih sebagai presiden.

Sistem pemilu dan konfigurasi geografis basis massa pendukung PKB memang tidak menguntungkan partai itu dalam perolehan kursi parlemen. Secara teoritis,⁶⁵ faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kemenangan partai politik dalam pemilu, antara lain; *Pertama*, perilaku pemilih. Faktor ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain; isu dan kebijakan partai yang ditawarkan kepada rakyat, citra partai dan kandidat, ikatan emosional pemilih dengan partai dan kandidat, serta situasi kondisi masyarakat pada saat pemilu. *Kedua*, sistem kepartaian. Dalam konteks ini dikenal *single party*, *dwi party*, *multi party*. Di Indonesia sistem yang dipilih adalah *multi party*. Konsekuensinya, kompetisi antar partai politik berjalan ketat, namun

⁶⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan pemilu disarikan dari Peter Schroder. *Strategi Politik*. Jakarta, Friedrich Naumann Stiftung Indonesia, 2005 dan Adam Rainer. *Menangkan Pemilu! Petunjuk Praktis Bagi Kandidat*. Friedrich Naumann Stiftung Indonesia, 2005

makna positifnya rakyat memiliki banyak pilihan. *Ketiga*, sistem pemilu, meliputi model atau tipe pemilu, penentuan daerah pemilihan (DP) dan sebagainya.

Bagi PKB, sistem pemilu terutama pembagian DP menjadi tidak menguntungkan. Kerugian itu dilihat dari penggabungan daerah-daerah (kabupaten/kota) ke dalam satu DP tidak melihat peta basis dukungan partai. Pada akhirnya, terbentuk DP “kering” (non basis) dan DP yang penuh dengan daerah basis (gemuk). Konsekuensinya, di DP yang gemuk banyak sisa suara PKB yang tidak dapat dikonversi menjadi perolehan kursi (suara hilang) sedangkan di DP yang kering, PKB mengalami banyak kekurangan suara. Namun sisa suara di DP gemuk itu tidak dapat digabung menjadi satu untuk diperhitungan/dikonversi kursi DPR⁶⁶

Permasalahan PKB antara lain; Peta basis dukungan politik (terutama pendukung tradisional) tidak menyebar/merata secara geografis namun terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu (membentuk kantung-kantung dukungan) menyebabkan konfigurasi suara PKB sangat sempit dan tidak menguntungkan bagi perolehan kursi. Diperparah lagi dengan pilihan sistem pemilu yang juga tidak menguntungkan bagi PKB. Partai ini juga belum memiliki data riil yang mampu memotret perilaku memilih (*voter behavior*) sebagai basis untuk merumuskan strategi kemenangan pemilu 2009. Asumsi lama seperti karakteristik trikotomi santri abangan priyayi tidak bisa lagi dipergunakan secara absolut untuk melakukan pemetaan politik dan perumusan strategi politik kemenangan pemilu.⁶⁷

⁶⁶ Perbincangan penulis dengan anggota FKB DPR RI sekaligus anggota pansus UU politik DPR Saefullah Ma'shum di sela-sela Workshop Sistem Pemilu, Jakarta 14 Desember 2006.

⁶⁷ Ichwan Ar. *Mencari Sistem Pemilu Berbasis Suara Rakyat*. Makalah tidak diterbitkan disampaikan sebagai laporan DPW PKB Jawa Tengah dalam Workshop Sistem Pemilu. Jakarta, 14 Desember 2006 dan Ichwan Ar. *Sistem Pemilu Berbasis Suara Rakyat*. Radar Surabaya, 17 Juli 2007.

Sistem pemilu selama ini, terutama dalam aspek penentuan harga kursi dan representasi perwakilan yang mendasarkan diri pada keterwakilan secara kewilayahan bukan pada perwakilan orang, menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi PKB. Akibatnya muncul kontradiksi antara jumlah pemilih dengan perolehan kursi PKB. Selain itu juga ada selisih harga kursi yang cukup tajam antara Jawa dengan luar Jawa.

Dalam kacamata pengamat, hasil pemilu 1999 dan 2004 juga menyisakan pertanyaan. Dr. Adam Rainer dari Friedrich Naumann Stiftung (FNS) Indonesia dalam Workshop Sistem Pemilu yang diselenggarakan oleh DPP PKB mengemukakan tidak ada keadilan dalam penghitungan suara. Ia menunjuk pada perbedaan yang cukup tinggi antara hasil perolehan suara partai dengan jumlah kursi parlemen yang diperoleh partai bersangkutan. Sebagai contoh; perolehan suara secara nasional PKB pada pemilu 2004 sebesar 11.989.564 (10,57%). Jumlah itu lebih besar daripada suara yang didapat PPP sebanyak 9.248.764 (8,15%).

Namun dalam perolehan kursi DPR RI terdapat perbedaan yang cukup kontradiktif, PPP memperoleh 58 sedangkan PKB hanya 52 kursi. Suara yang diperoleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 7.303.324 (6,44%) jauh lebih kecil dari PKB, namun kursi yang didapat jumlahnya sama. Jika dibuat tabel tertinggi dan terendah antara perolehan suara dibagi jumlah kursi maka “harga kursi paling mahal” diperoleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), 1.424.240 suara untuk 1 kursi, sedangkan harga terendah diperoleh PAN dengan perbandingan 140.448 suara untuk 1 kursi. Jumlah suara dari berbagai partai politik yang tidak memperoleh kursi DPR sebanyak 5.457.851 (4%).

Langkah politik PKB yang mengejutkan sekaligus dikemudian hari membuahkan perpecahan di internal partai adalah pemunculan Gus Dur sebagai calon presiden pada SU MPR 1999. Pada masa kampanye, Ketua Umum DPP PKB Mathori Abdul Djalil berulang kali menegaskan dukungannya terhadap pencalonan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri sebagai calon presiden. Tindakan dan ucapan Gus Dur dalam berbagai kesempatan pun dapat dimaknai sebagai sikap yang sama dengan sikap Mathori.

Situasi itu ditambah dengan keterbatasan secara fisik, terutama ketidakmampuan dari indera penglihatan, yang dimiliki Gus Dur. Oleh karena itu, publik termasuk konstituen PKB tidak menduga kesediaan Gus Dur untuk maju sebagai calon presiden sebagai hal serius bukan merupakan *joke* politik. Alasan itu cukup masuk akal mengingat Gus Dur dikenal piawai dalam melontarkan *joke-joke* seperti itu. Ditambah dengan jumlah kursi DPR RI yang diperoleh PKB hanya 52 semakin mendukung sikap politik itu.

Namun berbagai manuver yang dilakukan Poros Tengah mampu membalikkan peta politik MPR pada saat pemilihan presiden. Poros Tengah merupakan aliansi kekuatan politik Islam yang dimotori oleh Amien Rais (Ketua Umum DPP PAN pada saat itu), Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum DPP PBB pada saat itu), dan beberapa tokoh politik lainnya seperti Hartono Mardjono, AM Fatwa dan sebagainya. Rivalitas Gus Dur dengan Megawati dicitrakan oleh politisi Poros Tengah sebagai pertarungan faksi Islam versus kelompok sekuler. Gus Dur pun kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Sedangkan Amien Rais beberapa waktu sebelumnya telah terpilih sebagai Ketua MPR. Seusai penghitungan dan penetapan suara, para pendukung Gus

Dur mengumandangkan *sholawat badar*,⁶⁸ seolah memperteguh kemenangan politik kelompok Islam.

Namun kekuasaan Gus Dur tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 1,5 tahun berkuasa, Gus Dur dijatuhkan melalui Sidang Istimewa (SI) MPR. Ironisnya, penggulingan Gus Dur dimotori oleh Poros Tengah, kekuatan politik yang dulu mengusungnya menjadi presiden. Gus Dur memilih tidak hadir dalam SI MPR bahkan mengeluarkan dekrit yang berisi pembubaran parlemen. Namun dekrit itu tidak kuasa menghalangi proses politik penggulingan dirinya dari jabatan presiden.

Dekrit justru menjadi bumerang bagi Gus Dur setelah nyata-nyata militer tidak mendukung keputusan politik presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Reaksi keras pendukung Gus Dur tidak mampu menggoyahkan keputusan politik di tingkat elite Jakarta. Pembentukan pasukan berani mati, penebangan pohon-pohon di sepanjang jalan daerah yang dikenal sebagai tapal kuda (Pasuruan, Banyuwangi, Situbondo dan daerah sekitarnya) Jawa Timur justru semakin memperburuk citra PKB dan NU.

Pemakzulan Gus Dur menjadi pemicu munculnya konflik internal PKB. Ketua Umum DPP PKB Mathori Abdul Djalil dianggap mengkhianati garis politik partai. Mathori juga dinilai lebih mendukung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri untuk menggantikan Gus Dur menjadi presiden. Konflik semakin melebar dengan munculnya kepengurusan ganda PKB versi Mathori (berkantor di

⁶⁸ Dalam khazanah Islam, *sholawat badar* merupakan “syair peperangan”. Gus Dur dalam artikel berjudul *Islam, Ideologis Ataukah Kultural?* mengemukakan, *sholawat* itu digubah oleh KH Ali Mansyur dari Tuban. Penciptaan syair itu diilhami/inspirasi oleh peristiwa kemenangan umat Islam dalam perang Badar. Lihat KH Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta, Wahid Institut, Cetakan Kedua, 2006. Hal 42. Dalam masa sekarang, syair itu biasanya dikumandangkan untuk menyambut tokoh-tokoh yang sangat dihormati.

Batu Tulis) dan versi Gus Dur (berkantor di Kuningan). Aksi saling pecat terjadi. Gus Dur dipecat Mathori dari posisi Ketua Dewan Syuro dan digantikan oleh Ibrahim Lakoni. Pihak Gus Dur pun memecat Mathori dari posisi Ketua Umum DPP PKB.

Dalam konflik sebagian besar kiai *sepuh*, berada dibelakang Gus Dur. Diantaranya adalah KH Abdullah Fakhri, KH Idris Marzuki, KH Abdullah Abbas, KH Cholil Bisri dan sebagainya. Gus Dur secara jeli memanfaatkan dukungan para kiai itu untuk mendelegitimasi Mathori secara moral dan kultural. Kiai sepuh yang berada dibelakang Mathori diantaranya adalah KH Dimiyati Rois, salah satu anggota Dewan Syuro DPP PKB. Dalam wawancara dengan penulis, KH Dimiyati menuturkan latarbelakang keberpihakan pada Mathori untuk menjaga agar konflik tidak berlarut-larut dan merugikan ummat. Sehingga jika ia masuk ke dalam sistem dan PKB versi Batu Tulis akan dapat mengendalikan perilaku politik Mathori⁶⁹.

Merespon perpecahan itu DPP PKB menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di Yogyakarta pada 16-19 Januari 2002. MLB Yogyakarta memutuskan beberapa langkah, yaitu; *Pertama*, mempertahankan habis-habisan hak hukum atas PKB. *Kedua*, menyelesaikan secara kekeluargaan jika dimungkinkan. *Ketiga*, menyiapkan “sekoci” dengan membentuk partai baru yang akan menjadi pengganti PKB jika kalah di pengadilan.⁷⁰

Konflik internal PKB babak pertama ini tidak berlangsung lama dan diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam proses peradilan sempat terjadi putusan menang-kalah di kedua pihak. Semula Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan gugatan Mathori “tidak diterima”. Kubu Gus Dur kemudian naik

⁶⁹ Wawancara dengan KH Dimiyati Rois, 6 September 2007 di Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

⁷⁰ Laporan Pertanggungjawaban DPP PKB Periode 2002-2005 pada Muktamar II PKB di Semarang 16-18 April 2005. Lihat, Dokumentasi Hasil Muktamar II PKB, Jakarta, DPP PKB, 2005.

banding ke tingkat Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Keputusan banding adalah “menolak” gugatan Mathori. Namun pada saat yang sama, kubu Mathori di tingkat PN Jakarta Selatan juga memenangkan gugatan kedua. Namun se usai terbitnya Putusan Kasasi MA yang memutuskan PKB pimpinan Gus Dur-Alwi Shihab yang sah di mata hukum, maka konflik itupun berakhir. Selain itu, rencana politik Mathori untuk menciptakan Partai Kejayaan Demokrasi (PKD) juga gagal memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu 2004.

Dalam MLB Yogyakarta, terpilih sebagai pengganti Mathori adalah Alwi Shihab. Posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Saefullah Yusuf yang juga masih menjabat Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Anshor. Saefullah sebelum masuk pengurus PKB, tercatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Pengunduran diri Saefullah dari keanggotaan FPDIP DPR RI disampaikan pada detik-detik akhir menjelang pelaksanaan MLB. Hasil MLB lainnya adalah posisi Gus Dur tetap sebagai Ketua Dewan Syuro sedangkan Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Periode 1999-2000, Muhaimin Iskandar, terpental ke jajaran ketua.

Menyikapi perpecahan itu, para kiai juga terlibat aktif dalam upaya penyelesaian masalah. Beberapa pertemuan para kiai dilaksanakan, antara lain; pertemuan Langitan I di Langitan, 4 Desember 2001, pertemuan Ploso di Ploso Kediri, 20 Desember 2001 dan Langitan II, 7 Januari 2002. Dari serangkaian pertemuan itu dan setelah melalui musyawarah, *istigotsah* dan berdoa menyimpulkan bahwa PKB yang sah adalah PKB yang dipimpin oleh Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro dan Alwi Shihab selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz. Alwi Shihab merupakan orang dekat dan kepercayaan Gus Dur. Semasa Gus Dur menjabat presiden, Alwi

dipercaya sebagai menteri luar negeri. Meskipun pada akhirnya, konflik itu selesai namun bibit-bibit konflik yang lebih panjang sesungguhnya baru akan dimulai.

Persaingan keras antara Saefullah Yusuf dengan Muhaimin Iskandar dan ketidakcocokan Gus Dur dengan Saefullah, mewarnai babak baru langkah politik PKB. Posisi Saefullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB tidak lama. Atas desakan Gus Dur dengan delegitimasi dari para kiai sepuh, Saefullah Yusuf dimutasi ke jajaran ketua dan posisi Sekretaris Jenderal DPP PKB dipegang kembali oleh Muhaimin Iskandar.⁷¹

Pada pemilu 2004, hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PKB pada 28-29 Mei 2003 memutuskan KH Abdurrahman Wahid sebagai satu-satunya calon presiden (capres) dari PKB. Untuk melaksanakan amanat mukernas, DPP PKB membentuk tim sembilan, terdiri dari KH Abdurrahman Wahid sebagai ketua dengan anggota; KH Abdullah Faqih, Dr. H. Alwi Shihab, Prof. Dr. Mahfud MD, HZ. Arifin Junaedi, Dr. H. Muhammad AS Hikam, HA. Muhaimin Iskandar, Prof. H. Cecep Syarifuddin dan Hj. Khofifah Indar Parawansa.

Tim ini berhasil merumuskan pasangan capres dan cawapres PKB, yaitu KH Abdurrahman Wahid - Dr. Marwah Daud Ibrahim (politisi perempuan Partai Golkar). Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui SK No.36 Tahun 2004 menyatakan pasangan capres dan cawapres PKB tidak memenuhi syarat. Panitia Pengawas Pemilu

⁷¹ Menurut beberapa sumber, Saefullah Yusuf sebenarnya berpeluang besar menjadi Ketua Umum DPP PKB dengan mengalahkan Alwi Shihab dalam MLB di Yogyakarta. Salah satu bukti kuat adalah mayoritas peserta Muktamar menyetujui perubahan AD/ART (syarat-syarat menjadi pengurus) yang menguntungkan Saefullah. Namun karena intervensi Gus Dur dan para kiai, akhirnya Alwi yang memenangkan persaingan itu sedangkan Saefullah Yusuf diposisikan sebagai Sekretaris Jenderal. Namun tidak berapa lama kemudian, kedudukan Saefullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal direposisi menjadi salah satu Ketua DPP PKB. Isu yang berkembang, reposisi itu ditengarai oleh tuduhan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan Saefullah Yusuf. Namun tidak pernah ada kejelasan atau penjelasan secara resmi dari DPP PKB mengenai hal itu. Informasi lainnya, reposisi itu merupakan salah satu imbas persaingan keras antara Saefullah Yusuf dengan Muhaimin Iskandar.

(panwaslu) melalui Putusan No 01/sengketa-panwas/V/2004 memutuskan hal yang sama. Upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat juga gagal. Pada 5 Oktober 2004 PN Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan itu.

Patut di duga, kegagalan menjadi calon presiden menimbulkan kekecewaan luar biasa bagi Gus Dur. Eskpresi kekecewaan itu dapat dilihat dari pernyataan Gus Dur yang terus diulang-ulang, bahwa KPU telah melanggar UU. Dalam pidato pertanggungjawaban pada Muktamar II PKB di Semarang, Gus Dur kembali menyampaikan bahwa KPU telah melanggar 5 UU (tanpa merinci undang-undang yang dimaksud) dan ancaman hukuman penjara yang dapat dihadapi anggota KPU. Dalam kesempatan itu Gus Dur juga mengemukakan alasan pemberhentian Alwi dan Saefullah dari kepengurusan DPP PKB, yaitu untuk menghindari *conflict of interest*. Berikut ini kutipan pidato pertanggungjawaban Gus Dur dalam Muktamar II di Semarang;

...Perlu saya ingatkan kepada Alwi Shihab, yang menuntut di Pengadilan Jakarta Selatan terhadap DPP PKB, bahwa langkah ini akan merugikan bos dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau sampai dia yang disangka, naudzubillah kan? Mengapa Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf tidak boleh merangkap untuk jadi menteri dan PKB? Bukan karena ada apa-apa, biar tidak ada conflict of interest, jangan sampai ada tabrakan kepentingan di PKB dan menteri....

Selain itu, jika menurut hukum, KPU telah melanggar lima buah undang-undang. Kalau diperiksa di pengadilan, para anggota KPU itu bisa dipenjara 15 tahun.⁷²

Kekecewaan itu juga berpengaruh pada keputusan politik PKB dalam pemilu presiden. Seusai pasangan Gus Dur-Marwah Daud dinyatakan tidak memenuhi syarat,

⁷² Pidato Pertanggungjawaban DPP PKB Periode 2002-2005, Dokumentasi Hasil Muktamar II PKB, *ibid.*

DPP PKB memutuskan mendukung pasangan Wiranto-Sholahudin Wahid (adik kandung Gus Dur sekaligus mantan Ketua Umum DPP PKU) yang diajukan Partai Golkar.⁷³ Keputusan itu menimbulkan situasi sulit di tingkat basis massa NU dan PKB. Karena pada saat yang sama, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi juga mencalonkan diri sebagai cawapres berpasangan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati. Dilema itu harus dihadapi sebagai kader NU dan sekaligus aktifis PKB terutama bagi elite-elite lokal yang terlibat sebagai tim sukses.

Pada saat pasangan Wiranto-Solahudin gagal maju ke putaran kedua pemilu presiden, secara formal DPP PKB menyatakan membebaskan kadernya untuk memilih calon presiden sesuai hati nuraninya masing-masing. Dalam kenyataannya, bagi sebagian elite PKB dukungan itu lebih mengarah kepada Mega-Hasyim. Dalam pandangan publik, pilihan itu lebih didorong oleh sentimen ke-NU-an yang ada pada Hasyim Muzadi. Hanya saja, elite PKB tidak berani menyatakan secara formal dukungan politik itu mengingat Gus Dur kurang sepakat dengan figur Hasyim.

Bagi Gus Dur tidak ada pilihan yang nyaman diantara kedua pasangan itu. Keduanya memiliki catatan sejarah pernah “bergesekan” dengan Gus Dur. Megawati berkonflik dengan dirinya pada saat pemakzulan Gus Dur dari presiden. Hasyim juga setali tiga uang. Di masa lalu, mantan Ketua PWNU Jawa Timur itu dikenal sebagai orang dekat Gus Dur. Keberhasilan Hasyim menduduki jabatan Ketua Umum PBNU tidak lepas dari dukungan Gus Dur. Kemudian pada saat Gus Dur menjabat presiden, Hasyim banyak membela Gus Dur dari serangan lawan-lawan politiknya. Namun

⁷³ Pada pemilihan presiden (pilpres) putaran I, pasangan yang berkompetisi terdiri dari; Wiranto-Solahudin Wahid, Megawati-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Pada pilpres putaran II, pasangan yang berkompetisi adalah Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-JK.

pasca pemakzulan Gus Dur, hubungan kedua orang ini menjadi buruk. Hasyim menjadi orang yang sangat tidak disukai Gus Dur. Begitupula sebaliknya, Hasyim terkesan tidak mengindahkan keberadaan Gus Dur. Sedangkan pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK), resistensi Gus Dur terletak pada figur Jusuf Kalla, orang yang pernah dipecat Gus Dur dari jabatan menteri pada kabinetnya.

Kekecewaan itu bertambah kuat, dengan masuknya Alwi Sihab dan Saefullah Yusuf pada kabinet SBY – JK. Pada satu sisi sebagai pemegang otoritas tertinggi PKB, Gus Dur menghendaki sikap kritis dan menjaga jarak dengan kekuasaan. Namun pada saat yang sama, dua kader PKB justru masuk dalam lingkaran Kabinet SBY-JK. Sikap ini dapat dibaca sebagai kekecewaan Gus Dur karena merasa dilangkahi dan ditinggal secara politik. Situasi inilah yang menghantarkan PKB pada Muktamar II Semarang. Muktamar yang diselenggarakan sebagai sarana konsolidasi pada akhirnya melahirkan konflik baru yang lebih panjang dari konflik babak sebelumnya.

3.2. Selintas Jejak Pondok Pesantren

Salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan ketika melakukan kajian mengenai PKB adalah keberadaan pondok pesantren (ponpes), model relasi antara santri dan kiai serta hubungan diantara ponpes tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurai problem PKB harus diawali dengan pembicaraan tentang lembaga pendidikan agama tersebut.

Dari aspek historis, keberadaan pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa berjalan paralel dengan perkembangan Islam dan telah berlangsung dalam kurun

waktu yang cukup lama. Dalam berbagai penuturan sejarah, Islam diyakini mulai memasuki kehidupan masyarakat Indonesia sekitar abad 11 masehi. Beberapa peninggalan sejarah seperti prasasti, makam dan sebagainya menjadi bukti keberadaan peradaban Islam.

Denys Lombard dalam buku *Nusa Jawa; Silang Budaya*⁷⁴ mengemukakan, dua daerah di Indonesia yang lebih dini menjadi pemukiman Islam adalah Semenanjung Melayu dan daerah timur Pulau Jawa. Di Jawa Timur ditemukan prasasti Arab tertua yaitu batu prasasti Leran dari abad 11. Ditambah pula adanya prasasti pada makam Malik Ibrahim yang diperkirakan seorang pedagang muslim dari Gujarat. Prasasti itu berangka tahun 1419 terletak di Gresik. Sedangkan di daerah Sumatra selain ditemukan makam para sultan yang berkuasa di Kerajaan Islam Samudera Pasai juga ditemukan prasasti dari abad 14 yang menceritakan adanya kesultanan di daerah tersebut.

Perkembangan Islam di Jawa lebih khas lagi dibandingkan dengan daerah lainnya. Keberadaan para penyebar ajaran Islam yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *wali songo* (wali sembilan) berpengaruh besar pada pola atau model praktek keagamaan masyarakat Jawa. Para wali dipersonifikasikan sebagai figur suci serta memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masyarakat awam lainnya. Keistimewaan itu berupa penguasaan ilmu agama yang tinggi dan kadang-kadang disertai dengan kekuatan yang bersifat magis.⁷⁵

⁷⁴ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1996, hal 47-67.

⁷⁵ Cerita penyebaran Islam oleh walisongo dan mitos yang mengiringinya telah menjadi cerita rakyat. Penyebaran melalui media massa seperti buku, film, sinetron dan sebagainya semakin menguatkan persepsi orang mengenai keistimewaan yang dimiliki para wali.

Di masa kehidupan para nabi, kekuatan itu disebut sebagai mukjizat. Sedangkan yang dimiliki para wali disebut sebagai '*karomah*' (suatu keistimewaan yang terberi (*taken for granted*) dari Tuhan YME). Para wali itu bukanlah penduduk asli Jawa, namun para pendatang yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang. Mereka datang ke Jawa untuk berniaga, kemudian bermukim di suatu tempat dan mulai menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam perkembangannya keberadaan wali berhenti sampai pada *wali songo*. Selepas itu tidak ada lagi sebutan wali bagi para penyebar agama Islam di Jawa atau di Indonesia. Sosok dan sebutan para penyebar agama Islam itu kemudian digantikan atau lebih dikenal dengan sebutan kiai atau ulama.

Istilah pondok pesantren itu sendiri sebagaimana dituturkan oleh Zamakhsyari Dhofier,⁷⁶ berasal dari kata Arab yaitu *fundug* yang dapat diterjemahkan sebagai asrama/hotel. Sedangkan pesantren dari kata dasar santri yang dengan awala *pe* di depan dan akhiran *an* dibelakang berarti tempat tinggal santri. Elemen-elemen pesantren terdiri dari pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, santri dan kiai. Di antara elemen itu, kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren.

Proses berdirinya sebuah pesantren biasanya mengikuti alur sebagai berikut; santri se usai menempuh pendidikan di ponpes kemudian bermukim di suatu wilayah tertentu dan membentuk lembaga pendidikan agama. Lembaga itu dimulai dari lingkup kecil di sekitar tempat tinggal santri tersebut. Sejalan dengan menguatnya pengaruh pengasuh lembaga pengajaran itu (yang kemudian dikenal dengan sebutan kiai), lembaga itu berkembang dan kemudian tumbuh menjadi pesantren. Basis

⁷⁶ Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta; LP3ES. Cetakan Ketiga, 1984. Hal; 44-55.

pengembangan pertamakali adalah masyarakat di sekitar pondok. Kondisi itu yang membuat pesantren memiliki akar pada lingkungan sekitarnya. Keberadaan pesantren yang mengakar di tengah-tengah masyarakat membuat pesantren memiliki ikatan sosial yang kuat dengan lingkungannya.

Dalam konteks itu bahkan terjadi perluasan fungsi pesantren. Tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, namun berkembang menjadi sumber pranata sosial bagi masyarakat. Masyarakat kerap memosisikan kiai sebagai tokoh yang bisa memberikan arahan terhadap semua aspek kehidupan, dari mulai masalah rumah tangga, mengurus sawah, dan tentunya masalah ritual-ritual keagamaan. Dalam bahasa intelektualnya, pesantren menjelma sebagai makelar budaya. Selain memberi petunjuk kepada masyarakat, pesantren juga menjadi penerjemah tunggal terhadap permasalahan sosial yang terjadi.⁷⁷ Kondisi itu kemudian sangat mempengaruhi posisi dan peran kiai di masyarakat. Kiai menjadi figur sentral dan memiliki otoritas kultural yang membuatnya menjadi bagian dari lapisan elite masyarakat.

Situasi dan kondisi itu secara politis sangat menguntungkan bagi kiai. Meskipun tidak pernah terbersit secara verbal namun para kiai akan bekerja keras untuk tetap menjamin keberlangsungan pondok pesantrennya maupun tatanan kemasyarakatan yang sudah berjalan. Sarana utama untuk melestarikan tradisi pesantren ialah membangun solidaritas dan kerjasama sekuat-kuatnya diantara sesama kiai.

Sebagaimana diungkap Dhofier⁷⁸, cara praktis yang ditempuh ialah : *Pertama*, mengembangkan suatu tradisi bahwa keluarga yang terdekat harus menjadi calon kuat

⁷⁷ Acep Zamzam Noor. *Pesantren Rusak karena Politik*. Republika.co.id, 7 sept 2007

⁷⁸ Zamakhsyari Dhofier. *Ibid*, hal 62-63.

pengganti kepemimpinan pesantren. *Kedua*, mengembangkan suatu jaringan aliansi perkawinan *endogamous* antara keluarga kiai. *Ketiga*, mengembangkan tradisi transmisi pengetahuan dan rantai transmisi intelektual antara sesama kiai dan keluarganya. Melalui ketiga cara itulah keberadaan pesantren dapat dipertahankan. Dari sudut politis, ketiga cara itu juga secara tidak langsung akan melestraikan kekuasaan dan kepemimpinan keluarga kiai di masyarakat. Jika melihat salah satu contoh rantai *endogamous* seperti yang di ilustrasikan oleh Dhofier, hampir semua kiai di Jawa memiliki hubungan kekerabatan.

3.3. Peta/Anatomi Konflik

Melihat anatomi PKB ibarat melihat pondok pesantren. Hal yang wajar mengingat "isi perut" PKB terdiri dari aktifis ponpes, mulai dari kiai sampai santri. Dalam konteks itu, PKB ibarat konfederasi ponpes dengan beragam kiai dan santri serta varian ritual spiritualisme tradisionalisme Islam.

Ponpes-ponpes itu sebagian diantaranya memiliki nama resmi seperti Ponpes Edi Mancoro milik KH Mahfud Ridwan di Gedangan Salatiga, Akademi Perguruan Islam (API) di Tegalrejo Kabupaten Magelang dan sebagainya. Kadangkala, nama resmi itu 'tenggelam' dibawah bayang-bayang nama tidak resmi yang biasanya melekat pada domisili pesantren tersebut, misalnya Edi Mancoro kemudian lebih dikenal dengan Ponpes Gedangan. Contoh lainnya, masyarakat lebih merasa familiar dengan Ponpes Tegalrejo dari pada API. Oleh karena itu, dalam pembicaraan mengenai PKB, nama yang akan sering dipergunakan adalah sebutan ponpes sesuai dengan nama daerah domisilinya.

Konflik internal seolah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan politik PKB. Partai ini sejak awal berdirinya berkubang dalam konflik yang terus berkelanjutan. Sebenarnya situasi itu tidak aneh dan sudah dapat diprediksikan dari awal terutama dilihat dari sisi anatomi PKB sebagai konfederasi ponpes.

Sebagai wadah aspirasi berpolitik, mereka menyatukan diri dalam satu ikatan bernama PKB. Perikatan itu kadangkala memunculkan kontradiksi. Di satu sisi konsep partai politik yang ideal menganut sistem organisasi yang ketat, kaku, berpijak pada hirarki struktural dan ditopang manajemen pengelolaan keorganisasian secara modern. Hubungan antar kader partai atau individu-individu di dalamnya dibangun dalam pola relasi yang bersifat rasional. Komitmen politik dibangun atas dasar kesamaan ideologi dan kepentingan yang mengiringinya.

Di sisi lain, sebagian besar pesantren masih bergulat dengan manajemen pengelolaan ponpes secara tradisional dan sangat kental dengan nuansa kekerabatan. Status kepemilikan pesantren rata-rata dimonopoli keluarga kiai yang menjadi episentrum dalam ponpes itu. Hubungan yang terjadi antara kiai dan santri dibangun dalam pola patron klien dan bersifat irasional. Kesetiaan dibangun atas dasar ikatan emosional, psikologis dan kadangkala imbas hutang budi yang bersifat ekonomis dari santri pada kiai.⁷⁹

Salah satu karakter ponpes adalah adanya otonomi diantara masing-masing pesantren. Tidak ada satu ikatan struktural organisatoris antara satu ponpes dengan

⁷⁹ Menurut H Wicaksono, santri yang pernah mengenyam pendidikan di Ponpes Tegalrejo dan beberapa ponpes lainnya di Jawa Tengah mengemukakan, sebagian besar santri rata-rata datang dari keluarga yang tidak mampu secara sosial ekonomi. Selama proses belajar, para santri tinggal di pondok. Kiai pemilik pondok biasanya menyediakan sarana kebutuhan belajar seperti penginapan, makan dan sebagainya. Para santri membayar dengan biaya rendah, bahkan kadang ada pula yang tidak dipungut biaya samasekali. Santri merasa memiliki hutang budi, tidak hanya karena faktor ilmu yang didapat namun juga faktor-faktor ekonomis yang diperoleh dari kiai.

ponpes lainnya. Bahkan ada kecenderungan munculnya ego yang kuat diantara masing-masing kiai pemilik ponpes. Jika ada hubungan yang mengarah pada patron klien antara satu pesantren dengan pesantren lainnya, biasanya terpengaruh dari hubungan antara kiai pemilik ponpes tersebut. Hal yang sering terjadi, satu ponpes menjadi patron dari ponpes lainnya karena pemilik atau pengasuh ponpes yang dijadikan patron itu merupakan bekas guru dari kiai yang kemudian mendirikan ponpes baru.

Hubungan emosional antara guru dan murid (kiai dan santri) masih terjaga dengan baik manakala santri sudah lepas dari ponpes. Sebagaimana dituturkan oleh Asrofi⁸⁰, santri yang pernah mengenyam pendidikan di Ponpes Edi Mancoro Salatiga Semarang, relasi diantara guru dan murid itu yang kemudian akan banyak menentukan pola hubungan diantara ponpes.

Sifat otonomi dan ego dari masing-masing kiai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konflik di PKB. Perebutan pengaruh diantara para kiai (terutama kiai-kiai besar) sebagian besar bersifat *latent*. Konflik itu jarang yang terekspose ke publik secara “gamblang”. Namun menurut penjelasan beberapa politisi PKB, dalam konteks perebutan pengaruh itu memunculkan jalur-jalur pengaruh yang sering disebut dengan istilah poros. Misalnya, di Jawa Tengah, episentrum pengaruh itu ada di Ponpes Tegalrejo, Rembang dan sebagian di Brebes. Di Jawa Timur, poros itu ada di Ponpes Tebu Ireng, Lirboyo, Tambakberas dan sebagainya.

Pada saat terjadi perbedaan pendapat, khususnya dalam orientasi politik para santri cenderung mengesyampingkan pilihan pribadinya. Santri akan tunduk dan patuh

⁸⁰ Wawancara dengan Asrofi, Santri Ponpes Edi Mancoro Salatiga Semarang pada 20 November 2007.

pada apa yang menjadi pilihan politik kiainya meskipun para santri tidak pernah mengetahui hal-hal yang mendasari sikap politik kiainya. Sikap itu dimaknai sebagai bagian dari “*taqlid*” (kepatuhan tanpa *reserve* pada kiai). Menurut Asrofi, biasanya perbedaan orientasi politik itu antara santri dan kiai akan muncul pada saat santri sudah lepas dari pondok. Selama masih mengenyam pendidikan di ponpes, santri akan sangat sulit untuk dapat mengekspresikan sikap politiknya secara mandiri.

Kadang-kadang santri tidak hanya mengenyam pendidikan di satu ponpes. Sebagaimana tradisi para ulama/kiai besar NU di masa silam, pengembaraan dari satu ponpes ke ponpes lainnya, dari satu guru/kiai ke kiai lainnya, merupakan pola atau model pembelajaran santri yang jamak dilakukan. Pola berguru seperti itu disebut sebagai santri kelana dan sampai saat ini masih bertahan meskipun hanya dilakukan oleh sebagian kecil santri. Kiai-kiai besar NU seperti Hasyim Asy’ari, Wahab Chasbullah dan sebagainya merupakan santri-santri yang tidak pernah puas belajar pada satu guru atau pondok pesantren.

Terkait dengan pilihan atau orientasi politik, sebagian besar santri yang berguru pada lebih dari satu kiai akan memilih rujukan itu berdasarkan pada faktor-faktor seperti; senioritas, kharisma dan ketinggian ilmu agama dari kiai yang bersangkutan, dan kedekatan secara personal selama berguru di pondok maupun selepas lulus dari ponpes itu. Oleh karena itu, ukurannya menjadi sangat relatif, subyektif dan bersifat personal.

Oleh karena itu, anatomi konflik tidak dapat dilepaskan dari anatomi pondok pesantren yang berpengaruh di daerah (khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur). Berpijak pada perolehan suara PKB pada pemilu 1999 dan 2004, pusran pengaruh itu

hanya ada di dua propinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, pusaran pengaruh itu berada di empat pondok pesantren, yaitu:

1. Tegalrejo Kabupaten Magelang

Ponpes ini terletak di Desa Tegalrejo Kabupaten Magelang. Dikenal sebagai pondok dengan spesialisasi pada tafsir alqur'an. Dalam pengembaraan keilmuannya, Gus Dur pernah menjadi santri dan berguru pada KH Chudlori, pengasuh Ponpes Tegalrejo pada masa itu. Pada saat PBNU mendirikan PKB, kepemimpinan pesantren dipegang oleh KH Abdurrahman Chudlori, salah satu anak lelaki dari KH Chudlori. KH. Abdurrahman Chudlori atau lebih dikenal sebagai Mbah Dur kemudian memimpin DPW PKB Jawa Tengah dan duduk sebagai Ketua Dewan Syuro. Pada saat yang sama, adik kandung Mbah Dur, Yusuf Chudlori menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Magelang.

Pengaruh politik Ponpes Tegalrejo semakin kuat seiring dengan intensitas Gus Dur berkunjung ke ponpes tersebut. Pada saat Gus Dur melakukan konsolidasi kekuatan para kiai sepuh melalui pembentukan Poros Kiai Langitan, Mbah Dur termasuk menjadi bagian dari poros kiai itu. Pamor Ponpes Tegalrejo semakin berkibar manakala Gus Dur pada saat menjabat presiden sering menempatkan Mbah Dur sebagai salah satu rujukan sikap politiknya.

Dalam konteks tarik menarik pengaruh dikalangan ponpes, Tegalrejo menjadi salah satu sumbu yang pengaruhnya menyebar pada ponpes-ponpes di sekitar Karesidenan Kedu dan wilayah di sekelilingnya. Pada saat meletup konflik internal pasca pengusuran Gus Dur dari jabatan presiden, Mbah Dur termasuk

salah satu kiai “*sepuh*” yang berada dibelakang Gus Dur bersama “*kai langitan*” lainnya berhadapan dengan Mathori Abdul Djalil.

Namun, posisi politik itu berubah secara drastis pasca Muktamar II Semarang. Selepas konflik dalam Muktamar itu, Mbah Dur justru merupakan salah satu figur terdepan yang berhadapan dengan Gus Dur. Salah satu ekspresi politik dari perbedaan itu, Mbah Dur kemudian menjadi Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Partai yang didirikan oleh politisi PKB yang tidak puas dengan kepemimpinan Gus Dur. Uniknya, Yusuf Chudlori, adik kandung Mbah Dur tetap berada di barisan PKB. Yusuf Chudlori bahkan kemudian diangkat oleh DPP PKB menjadi Pjs Ketua DPW PKB Jawa Tengah menggantikan Abdul Kadir Karding.

Ada beberapa asumsi yang mendasari hal itu: *Pertama*, pilihan sikap itu merupakan strategi di tingkat internal keluarga Chudlori. Dengan demikian, kelompok manapun yang akan memenangkan pertarungan, keluarga itu tetap memiliki akses ke pusaran kekuasaan. *Kedua*, situasi itu tidak dapat dilepaskan dari strategi politik Gus Dur untuk memecah kekuatan namun juga tidak ingin kehilangan kekuatan. Ponpes Tegalorejo merupakan salah satu pilar penyangga kekuatan PKB di Jawa Tengah dan secara nasional. Bagaimanapun besarnya pengaruh itu, namun tetap harus dapat dikendalikan oleh Gus Dur. Konflik ini merupakan bagian dari proses pengendalian tersebut. *Ketiga*, kondisi itu terbentuk dari kematangan sikap politik Mbah Dur dan Yusuf Chudlori. Meskipun terdapat perbedaan pilihan politik namun relasi keduanya tetap dalam hubungan yang baik sebagai kakak beradik.

Salah satu fakta yang membuktikan kekuatan pengaruh Tegalorejo adalah terbelahnya loyalitas anggota-anggota parlemen dari PKB. Misalnya; sebagian anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (DP) Jawa Tengah dan DPRD Jawa Tengah mendukung jejak politik Mbah Dur di PKNU. Ada yang mendukung secara terbuka seperti KH Hanif Muslih (pengasuh Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak), Muhamad Muzamil, Kautsar Asofia (anak dari KH Muhaiman Gunardo Parakan) dan KH Yazid Mahfud, pengasuh Ponpes Kebumen. Para politisi itu rata-rata memiliki kedekatan secara personal dengan Mbah Dur.

2. Kabupaten Rembang

Ponpes di Rembang seolah menjadi milik keluarga (Bani) Bisri yang sangat dihormati oleh masyarakat Rembang. Pada saat PKB didirikan, KH Cholil Bisri, salah pengasuh Ponpes Rembang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Adiknya, KH Mustofa Bisri, meskipun tidak masuk dalam jajaran struktur partai, merupakan sahabat dekat Gus Dur yang sangat dihormati dan sering dijadikan sebagai tempat rujukan. Mustofa Bisri selain sebagai kiai juga dikenal sebagai budayawan dan penulis.

Meskipun pemikiran dan pandangan politik Kiai Cholil tidak selalu sejalan dengan Gus Dur, pengaruh dari Bani Bisri tetap diperhitungkan. Posisi Wakil Ketua MPR pun diduduki oleh KH Cholil Bisri untuk menggantikan Mathori Abdul Djali. Bahkan pada saat Gus Dur menjabat presiden, Yahya Cholil Staquf, salah satu anak Cholil Bisri diangkat sebagai juru bicara presiden.

Kekuatan pengaruh dari keluarga Rembang ini menjadi kompetitor bagi Tegalrejo. Meskipun tidak terlihat di permukaan publik namun persaingan itu dapat dirasakan di kalangan internal. Rembang seolah olah menguasai daerah pesisir Jawa Tengah bagian pesisir utara sedangkan Tegalrejo menjadi pusat pengaruh bagi pesantren dan kiai yang berada di Jawa Tengah bagian tengah dan selatan. Meskipun kadang berbeda sikap namun kedua pesantren ini juga dapat berjalan beriringan. Misalnya dalam kasus PKNU. Sebagian politisi PKB menilai poros Rembang memilih jalan aman dengan mengikuti berdiri pada 'dua kaki'. kaki yang satu tetap di PKB, kaki lainnya berada di PKNU.

Sepeninggal Cholil Bisri, pengaruh keluarga Bani Bisri mulai surut. Gus Dur dan DPP PKB pun tidak terlalu memperhitungkan hal ini. Lebih-lebih setelah Yenny Wahid mulai mengendalikan PKB. Pengurus-pengurus partai yang dianggap bermasalah disikapi secara tegas oleh DPP, misalnya melalui kebijakan pembekuan. Kebijakan itupun diberlakukan terhadap DPC PKB Rembang yang *notabene* dikuasai oleh keluarga Bisri. Salah satu contoh, Musyawarah Cabang (Muscab) untuk memilih pengurus baru bisa diijinkan oleh DPP PKB jika ada jaminan keluarga Bisri tidak maju dalam pencalonan. Bahkan pada saat muscab telah dilakukan dan salah satu keluarga Bisri terpilih sebagai Ketua DPC, DPP tidak mengakui hasil muscab. Kebijakan selanjutnya adalah memperpanjang pembekuan dan meminta diadakan muscab ulang.

3. Kaliwungu Kabupaten Kendal

Ponpes ini terletak di pesisir utara Jawa Tengah bagian barat. Kekuatan pengaruh ponpes ini secara kultural merambah sepanjang pesisir tersebut mulai dari Demak, Kendal hingga Weleri bahkan sampai di Tegal dan wilayah sekitarnya. Pengasuh ponpes Kaliwungu saat ini adalah KH Dimiyati Rois atau lebih sering dikenal dengan sebutan Mbah Dim. Figur yang satu ini merupakan salah satu kiai yang sangat dihormati dan dijadikan banyak rujukan oleh para politisi NU.

Banyak politisi NU, tidak hanya dari PKB namun juga PPP, yang pernah menjadi santri di ponpes Kaliwungu. Di antara politisi NU yang dikenal dekat dengan Mbah Dim adalah Mathori Abdul Djalil. Kedekatan Mathori dengan Mbah Dim sudah berlangsung lama sejak keduanya masih aktif di PPP. Kedekatan itu terus berlanjut sampai pada saat PBNU mendirikan PKB dan Mathori dipilih Gus Dur menjadi ketua umum.

Pada awal berdirinya PKB, Mbah Dim bersama sejumlah kiai lainnya menjadi anggota Dewan Syuro DPP PKB. Sejalan dengan perkembangan politik dan kedekatannya dengan Mathori Abdul Djalil, kebersamaan Mbah Dim dengan politisi NU lainnya di PKB tidak berlangsung lama. Pada saat Mathori mendirikan Partai Kejayaan Demokrasi (PKD) sebagai imbas konflik internal PKB, Mbah Dim termasuk salah satu figur kiai berpengaruh yang duduk dalam kepengurusan partai baru itu.

PKD pada akhirnya mengalami nasib layu sebelum berkembang setelah dinyatakan tidak lulus oleh KPU pada saat verifikasi partai politik peserta pemilu. Namun figur Mbah Dim tetap menjadi rujukan dan basis untuk mencari legitimasi tindakan dan sikap politik dai politisi NU. Meskipun secara organisatoris pernah

berseberangan, namun Ketua DPW PKB Jawa Tengah semasa dijabat oleh Abdul Kadir Karding maupun pada saat dijabat oleh Yusuf Chudlori, tetap merasa perlu menemui Mbah Dim⁸¹.

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah Bambang Sadono- Muhammad Adnan yang diusung Partai Golkar pun merasa perlu mendapat dukungan dari Mbah Dim. Pernyataan Mbah Dim, yang dapat dipersepsikan sebagai kampanye/dukungan bagi pasangan itu, dalam salah satu acara di Masjid Agung Jawa Tengah sempat menimbulkan kontroversi di kalangan warga nahdliyin.

Pada saat kiai-kiai yang berseberangan dengan Gus Dur mendirikan PKNU, sikap politik Mbah Dim adalah tidak kemana-mana namun ingin berada dimana-mana.⁸²

4. Ponpes Benda Kabupaten Brebes.

Ponpes Benda dengan pengasuh KH Masruri Mugni merupakan ponpes yang memiliki pengaruh cukup kuat di Brebes dan sekitarnya. KH Masruri Mugni merupakan Rois Aam Syuriah PWNU Jawa Tengah. Meskipun tidak masuk dalam struktur PKB karena terkait dengan jabatannya di struktural NU, figur Kiai Mugni tetap menjadi patron dari para politisi PKB terutama di lingkaran daerah Brebes.

Peran kiai ini tidak terlalu menonjol ke publik namun nasehat dan tausiyah politiknya banyak diikuti oleh para politisi. Dalam konflik internal PKB, Kiai

⁸¹ Dalam tradisi NU, menemui atau mendatangi rumah kiai sering disebut dengan istilah "sowan". Artinya bersilaturahmi, menyampaikan kabar baik dan sekaligus minta petunjuk terutama bimbingan spiritual untuk menentukan langkah-langkah ke depan.

⁸² Wawancara dengan KH Dimiyati Rois, 6 September 2007 di Ponpes Kaliwungu Kendal.

Mugni juga tidak banyak bersuara. Namun dari sikap diamnya dapat dibaca bahwa yang bersangkutan tidak menginginkan konflik melebar dan cenderung mendorong terjadinya islah sebagai salah satu jalan penyelesaian konflik.⁸³

Diluar empat ponpes itu masih banyak ponpes atau kiai lain yang memiliki pengaruh cukup kuat meskipun tidak sekuat keempat ponpes besar tersebut, diantaranya adalah KH Muhaimainan Gunardo dari Parakan, KH Muslim Rivai Imampuro dari Klaten, Kiai Mahfud Ridwan dari Ponpes Edi Mancoro Salatiga dan beberapa kiai di daerah Cilacap, Banyumas dan sekitarnya. Kiai-kiai itu memiliki otoritas secara mandiri termasuk dalam sikap politiknya. Namun dalam situasi tertentu, para kiai itu dapat berada dalam satu barisan atau kepentingan yang sama.

Secara sederhana, pusran pengaruh dari kiai dan pondok pesantren di Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut;

⁸³ Informasi ini dituturkan oleh Cholidy Ibhar, pakar perbandingan agama dan staf ahli DPRD Jawa Tengah serta dikenal cukup dekat dengan KH Masruri Mugni.

Tabel 3.1.
Pusaran Pengaruh Ponpes dan Kiai di Jawa Tengah

Wilayah	Ponpes	Kiai atau klan
Pantai utara (pantura) Jawa Tengah	Rembang	<p>Klan berpengaruh adalah Bani Bisri. Sesepeuh dari keluarga ini, KH Cholil Bisri menjadi salah satu penggagas berdirinya partai baru bagi warga NU. Pada awal berdirinya PKB, KH Cholil termasuk dalam jajaran Dewan Syuro DPP PKB. Meskipun pemikiran dan pandangan politik Kiai Cholil tidak selalu sejalan dengan Gus Dur, pengaruh dari Bani Bisri tetap diperhitungkan.</p> <p>Bahkan pada saat Gus Dur menjabat presiden, Yahya Cholil Staquf, salah satu anak Cholil Bisri diangkat sebagai juru bicara presiden. Pada saat konflik episode Mathori, KH Cholil dan ponpes Rembang berada di pihak Gus Dur. Selepas konflik itu, KH Cholil menggantikan kedudukan Mathori sebagai Wakil Ketua MPR.</p> <p>Pada masa konflik episode Alwi Sihab, klan ini tidak begitu jelas keberpihakannya. Sikap yang diambil adalah mendukung kedua pihak yang berkonflik. DPC PKB Rembang dengan pimpinan dari keluarga/bani Bisri bahkan sempat dibekukan oleh DPP PKB kubu Alwi maupun kubu Gus Dur. Pada konflik episode Muhaimin, Rembang tidak banyak dibicarakan.</p> <p>Kekuatan pengaruh dari keluarga Rembang ini menjadi kompetitor bagi Tegalrejo. Meskipun tidak terlihat di permukaan publik namun persaingan itu dapat dirasakan di kalangan internal. Rembang seolah olah menguasai daerah pesisir Jawa Tengah bagian pesisir utara sedangkan Tegalrejo menjadi pusat pengaruh</p>

		bagi pesantren dan kiai yang berada di Jawa Tengah bagian tengah dan selatan.
	Kendal	KH Dimiyati Rois atau lebih sering disapa dengan sebutan Mbah Dim merupakan pengasuh ponpes dan ulama yang disegani di Jawa Tengah dan sempat menjadi anggota Dewan Syuro DPP PKB. Mathori Abdul Djalil dikenal sebagai santri yang memiliki hubungan dekat dengan Mbah Dim. Oleh karena itu pada saat Mathori mendirikan PKD, Mbah Dim memilih berdiri dibelakang santrinya itu. Selepas Mathori, secara formal Mbah Dim tidak terlalu banyak berkecimpung dalam politik praktis, termasuk pada saat muncul konflik episode Alwi maupun Muhaimin Iskandar. Namun, figur Mbah Dim tetap dihormati dan dijadikan rujukan bagi para politisi PKB.
	Brebes	Ponpes Benda dengan pengasuh KH Masruri Mugni merupakan ponpes yang memiliki pengaruh cukup kuat di Brebes dan sekitarnya. KH Masruri Mugni merupakan Rois Aam Syuriah PWNU Jawa Tengah. Meskipun tidak masuk dalam struktur PKB karena terkait dengan jabatannya di struktural NU, figur Kiai Mugni tetap menjadi patron dari para politisi PKB terutama di lingkaran daerah Brebes. Peran kiai ini tidak terlalu menonjol ke publik namun nasehat dan tausiyah politiknya banyak diikuti oleh para politisi. Dalam konflik internal PKB, Kiai Mugni juga tidak banyak bersuara. Namun dari sikap diamnya dapat dibaca bahwa yang bersangkutan tidak menginginkan konflik melebar dan cenderung mendorong terjadinya islah sebagai salah satu jalan penyelesaian konflik. KH Mugni merupakan ulama yang disegani di daerah Brebes. Meski tidak secara aktif terlibat dalam politik namun banya dijadikan

		rujukan oleh para politisi, khususnya dari kalangan NU. Oleh karena itu dalam konflik PKB, posisi Kiai Mugni dipandang netral oleh berbagai pihak yang berseteru.
Jawa Tengah bagian tengah	Tegalrejo	Ponpes Tegalrejo termasuk pesantren yang memiliki jejak sejarah panjang. Gus Dur pun pernah menjadi santri di Tegalrejo dan “nyantri” pada KH Chuldori. Pada awal berdirinya PKB, penerus KH Chudlori yaitu Abdurahman Chudlori (Mbah Dur) dan Yusuf Chudlori menjadi bagian dari para pendiri PKB di Jawa Tengah. Mbah Dur kemudian menjadi Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Tengah sedangkan adiknya Yusuf menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Magelang. Pada konflik fase Mathori, Mbah Dur memiliki pandangan yang sama dengan Gus Dur. Namun pada saat konflik Alwi Shihab, Mbah Dur memilih jalan berbeda dengan mendukung kubu Alwi dan Saeful. Mbah Dur kemudian terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKNU. Sedangkan Yusuf Chudlori tetap berada di PKB bahkan kemudian menggantikan posisi Abdul Kadir Karding sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Pada saat konflik episode Muhaimin, Yusuf berada pada barisan Gus Dur.
	Salatiga	KH Mahfud Ridwan merupakan pengasuh ponpes Edi Mancoro Salatiga dan teman dekat Gus Dur semasa kuliah di Kairo. Meskipun tidak masuk dalam struktur PKB atau namun Kiai Mahfud memiliki pengaruh besar. Dikenal sebagai tokoh pluralis. Dalam pemikiran, terutama tentang demokrasi dan pluralisme banyak sejalan dengan Gus Dur. Dalam masa konflik episode Mathori maupun Alwi, Kiai Mahfud sering dijadikan sebagai rujukan atau bahkan diminta sebagai penghubung dengan Gus Dur.
	Parakan	KH Muhaiminan Gunardo merupakan figur kiai kharismatis dari daerah Kedu dan termasuk dalam lingkaran kiai langitan. Karena

		itu, pada saat konflik episode Alwi, Kiai Muhaiminan memilih berseberangan dengan Gus Dur.
	Klaten	KH Muslim Rivai Imampuro merupakan salah satu kiai yang memiliki kharisma tersendiri. Meskipun mengalami gangguan dalam berkomunikasi secara lisan namun para pengikutnya meyakini bahwa Kiai Muslim memiliki "kelebihan" dalam olah batin sehingga bisa memprediksikan situasi yang belum terjadi. Oleh karena itu banyak pejabat yang datang berkunjung ke kediaman Kiai Muslim. Pada saat PKB berdiri, Kiai Muslim termasuk yang mendukung gerak langkah PKB. Namun secara struktural namanya tidak masuk dalam jajaran pengurus partai. Dalam jejak langkah selanjutnya, pengaruh Kiai Muslim perlahan surut.

Anatomi konflik PKB di di Jawa Timur berada dalam pusaran pengaruh sembilan pondok pesantren;

1. Tebuireng

Keberadaan Ponpes Tebu Ireng tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelahiran NU. Ponpes ini termasuk salah satu pesantren tertua di Jawa Timur, didirikan pada 1916 oleh KH Hasyim Asyari, pendiri NU. Sejalan dengan ketokohan sang pendiri, ponpes Tebu Ireng kemudian menjadi rujukan dari berbagai ponpes lainnya di Jawa Timur maupun di Indonesia.

Peran strategis dan jejak sejarah Tebu Ireng menempatkan ponpes ini selalu menjadi perhatian dari berbagai kelompok kepentingan, termasuk pemerintah. Pada masa kepemimpinan KH Yusuf Hasyim, anak dari KH Hasyim Asyari dan paman dari KH Abdurrahman Wahid, Tebu Ireng berkembang pesat dan tumbuh menjadi pesantren modern.

Yusuf Hasyim mampu mendobrak tradisi kaku pesantren dengan mengenalkan metode klasikal dalam pengajaran. Dia menggabungkan teori pendidikan modern dengan pendidikan tradisional ala pesantren. Meskipun pada awalnya mendapat tantangan dari sebagian kiai *sepuh* dan kiai yang memiliki pemikiran orthodox lainnya, Yusuf Hasyim tetap bersikeras menerapkan model pengajaran baru itu. Usaha dan sikap keras itu tidak sia-sia, terbukti saat ini banyak ponpes yang mengikuti jejak Tebu Ireng dalam model pengajarannya.

Meskipun memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Gus Dur, namun dalam orientasi politik, kedua orang itu dikenal memiliki perbedaan sikap dan pandangan yang cukup tajam. Bahkan seringkali berbenturan keras. Perbedaan pendapat yang tajam antara paman dan keponakan itu sering mengemuka ke publik.

Pada masa Orba, di saat Yusuf Hasyim mendekati ke pemerintah, Gus Dur lebih banyak berseberangan. Sedangkan pada saat Gus Dur dekat dengan kekuasaan, Yusuf Hasyim mengambil posisi yang tidak sama. Meskipun tidak secara resmi menjadi anggota Golkar namun keduanya pernah dekat dengan partai berlambang beringin itu. Gus Dur bahkan pernah menjadi anggota MPR yang diusulkan oleh Golkar. Sedangkan Yusuf Hasyim dikenal dekat dengan pejabat birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah, yang pada masa Orba hampir semuanya merupakan kader Golkar.

Perbedaan itu tetap ada pada saat Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU. Banyak sikap dan pandangan Gus Dur yang berbeda dengan sang paman. Sikap *nyeleneh* dari Gus Dur bagi Yusuf Hasyim merupakan hal yang kurang disukainya.

Pada saat PBNU mendirikan PKB, pengasuh ponpes Tebu Ireng ini juga tidak masuk dalam jajaran struktural partai. Gus Dur memang bersikap keras dan tegas. Orang-orang yang dianggap berseberangan secara pemikiran dan politik, meskipun itu sanak saudara, secara tegas tidak dimasukkan dalam partai baru buatan PBNU itu. Sikap ini yang kemudian mendorong KH

Solahudin Wahid, salah satu adik kandung Gus Dur, untuk ikut mendirikan Partai Kebangkitan Umat (PKU). Solahudin Wahid (Gus Solah) pernah menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan menjadi calon wakil presiden pada pemilu presiden 2004 bersama Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Pasangan capres dan cawapres dari Partai Golkar ini hanya mampu bertahan sampai putaran pertama.

2. Asembagus Situbondo

Figur utama dari Ponpes Sukorejo Banyuputih Asembagus Situbondo adalah KH As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad merupakan salah satu murid dari KH Cholil di Bangkalan Madura. Dalam sejarah kelahiran NU, As'ad muda dikenal sebagai utusan Kiai Cholil Bangkalan yang datang menemui KH Hasyim Asyari dengan membawa tongkat dan tasbih. As'ad membawa pesan dari KH Cholil bahwa guru dari KH Hasim Asyari itu merestui upaya-upaya mendirikan organisasi bagi kalangan Islam tradisional. Peran As'ad sangat penting, tanpa kehadirannya, mungkin NU tidak akan pernah didirikan oleh Hasyim Asyari.

Kiai As'ad juga dikenal sebagai penggagas ide untuk menerima Pancasila sebagai azas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan di kalangan NU. Sikap politik yang pada saat itu masih menjadi ajang tarik menarik di antara para kiai pendukung Islam formalis

dengan Islam kulturalis. Dukungan Kiai As'ad sangat mempengaruhi sikap muktamirin (peserta muktamar) NU pada 1984. Sebagai hasilnya, dalam Muktamar itu, NU menegaskan untuk menerima Pancasila sebagai azas organisasi dan menyatakan sikap kembali ke Khittah 1926. Berpijak pada keputusan Muktamar 1984 NU secara kelembagaan kemudian meninggalkan gelanggang politik dan kembali memfokuskan diri untuk berperan sebagai organisasi sosial keagamaan.

Dikemudian hari, diantara Gus Dur dan Kiai As'ad terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Sangat tajamnya perbedaan itu menyebabkan Kiai As'ad kemudian mengambil sikap untuk memutuskan hubungan politik dan organisatoris dengan Gus Dur. Dalam khazanah NU, dikenal dengan istilah *mufaraqah*. Sikap Kiai As'ad ini disampaikan satu minggu setelah Muktamar NU ke 28 di Pesantren Krapyak Yogyakarta pada 1989.

Namun pada PBNU mendirikan PKB, KH Fawaid, salah satu putera Kiai As'ad ikut berpartisipasi secara aktif di PKB Jawa Timur. Keterlibatan keluarga As'ad memiliki pengaruh cukup kuat untuk mendongkrak perolehan suara PKB pada pemilu 1999. Namun, sejalan dengan konflik internal yang terjadi di PKB, Kiai Fawaid kemudian berpindah kandang ke PPP. Ekses kepindahan itu sangat signifikan bagi penurunan suara PKB pada pemilu 2004 terutama di Situbondo dan sekitarnya.

3. Denanyar

Ponpes Mambaul Maarif Denanyar merupakan salah satu ponpes tertua di Jawa Timur. Keberadaan ponpes ini sangat dihormati oleh warga NU. Penghormatan itu berangkat dari kenyataan mengenai peran yang cukup besar dari pemimpin ponpes Denanyar dalam sejarah perkembangan NU.

Tokoh terkemuka dari Ponpes Denanyar adalah KH Bisri Syansuri yang juga dikenal sebagai salah satu pendiri NU. Sebagai soko guru NU banyak alumni Denanyar yang menjadi pemimpin NU dan PKB. Salah satunya adalah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Muhaimin merupakan santri Denanyar yang memiliki karier politik cemerlang. Berbekal kelimuan selama menjadi santri di Denanyar serta pengalaman berorganisasi di PMII, Muhaimin melejit menjadi Sekretaris Jenderal DPP PKB mendampingi Mathori Abdul Djalil.

Sepeninggal Bisri Samsuri, pengaruh Denanyar mulai surut. Meskipun demikian, peran dan sejarah tidak terhapus dari benak para santri-santri Denanyar.

4. Ploso

Jejak sejarah ponpes Ploso tidak dapat dilepaskan dari keberadaan KH Idris Marzuki. Dalam percaturan politik, ponpes ini menjadi lebih dikenal pada publik terutama di luar komunitas NU setelah bergabung dalam wadah komunikasi non formal diantara para kiai, yaitu Poros Langitan.

KH Idris Marzuki adalah pengasuh Ponpes Ploso. Pada awal berdirinya PKB, Kiai Idris merupakan salah satu anggota Dewan Syuro DPP PKB. Di masa-masa itulah Kiai Idris memiliki hubungan yang dekat dengan Gus Dur. Bobot kedekatan itu semakin erat pada saat Gus Dur diusulkan oleh kelompok politik yang menyebut dirinya Poros Tengah⁸⁴ sebagai calon presiden. Oleh karena itu, pada saat Gus Dur melakukan konsolidasi kekuatan kiai dengan membentuk Poros Langitan, Kiai Idris pun menjadi salah satu anggota poros tersebut.

Sejalan dengan menguatnya perbedaan pandangan politik dengan Gus Dur, Kiai Idris bersama kiai-kiai yang selama ini bergabung dalam poros Langitan memutuskan mendukung Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf. Hingga saat ini, Kiai Idris termasuk dalam eksponen PKNU.

5. Lirboyo

Keberadaan Ponpes Lirboyo tidak dapat dipisahkan dari sosok KH Mahruz Ali, pendiri sekaligus pengasuh ponpes. Kia Mahruz dikenal sebagai kiai moderat dan juru islah. Selain itu juga diyakini memiliki kekuatan batin yang luarbiasa. Oleh karena itu, Ponpes Lirboyo dikenal tidak hanya sebagai pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama namun juga ilmu kanuragan

⁸⁴ Poros Tengah merupakan koalisi taktis diantara kekuatan politik beraliran Islam dan tengah kanan seperti PAN, PBB, PPP dan sebagainya yang dimotori oleh Ketua Umum DPP PAN Amien Rais. Pada SU MPR 1999, Poros Tengah berhasil menghadang Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati terpilih sebagai presiden setelah dengan gemilang mengusung Gus Dur untuk berhadapan dengan Megawati. Sejarah kemudian mencatat, masa kekuasaan Gus Dur sebagai presiden tidak berlangsung lama. Poros Tengah pula yang menjadi inisiator untuk *melengserkan* Gus Dur dari kursi kepresidenan.

bagi para santrinya. Banyak mitos yang mengiringi kehidupan Kiai Mahruz terutama terkait dengan ilmu batin yang dimilikinya. Dalam masa pergolakan kemerdekaan, KH Mahruz membekali para santrinya dengan ilmu kanuragan dan kekuatan batin untuk menghadapi pertempuran dengan tentara Belanda. Kiai ini juga termasuk salah satu tokoh NU yang ikut melahirkan revolusi jihad yang dicetuskan pada Mukthamar NU Jawa-Madura 1945.

Seperinggal Kiai Mahruz, kepemimpinan pondok dilanjutkan oleh salah satu puteranya, yaitu KH Imam Mahruz. Dalam dunia politik, sejalan dengan pembentukan partai baru oleh PBNU, Kiai Imam Mahruz pun ikut memperkuat barisan politisi PKB. Pada saat konflik internal membuahkan PKNU, Kiai Imam ikut terlibat di partai baru itu. Namun keterlibatan itu tidak lama, Kiai Imam kemudian masuk kembali ke jajaran PKB. Dalam konflik PKB episode ketiga yang memunculkan kubu Gus Dur versus Muhamin Iskandar, salah satu pengasuh Ponpes Lirboyo, KH Aziz Mansur terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB versi Muhamin Iskandar.

6. Langitan Tuban

Ponpes Langitan dikenal masyarakat secara luas dalam konteks politik sejak Gus Dur memunculkan istilah Kiai Langitan sebagai sebutan untuk beberapa kiai *sepuh* yang dihormati dan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan politik. Penyebutan ini bukan tanpa maksud. Dalam teks politik, penyebutan ini dapat dimaknai sebagai berikut: *Pertama*, Gus Dur ingin

terlihat atau tercipta sebagai figur yang selalu mengedepankan peran dan suara dari para kiai. Sebuah sikap yang selama ini menjadi ciri dan karakter warga NU. *Kedua*, Gus Dur sekaligus ingin memperoleh dukungan politik dari para kiai dan santri. Ibaratnya sekali langkah dua tiga pulau terlampaui. Melalui pengorganisasian para kiai *sepuh* akan lebih memudahkan bagi Gus Dur untuk menguatkan dukungan politik dari warga NU pada dirinya. Ketiga, istilah Langitan, selain merujuk pada nama tempat (lokasi salah satu ponpes di daerah Tuban Jawa Timur) juga sekaligus simbolisasi bahwa dukungan itu juga merupakan hasil permenungan dan cerminan suara langit (Tuhan). Artinya, membawa kebenaran yang hakiki.

Figur dari ponpes ini adalah KH Abdullah Faqih. Diantara para kiai sepu itu, Kiai Faqih merupakan salah satu figur yang dihormati. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan para kiai sering diselenggarakan di Ponpes Langitan. Pada masa awal konsolidasi, Gus Dur pun beberapakali berkunjung ke Langitan. Ponpes ini menjadi salah satu basis bagi konsolidasi kekuatan politik PKB, secara khusus konsolidasi kekuatan politik Gus Dur.

Pada saat perbedaan politik mulai menguat dan konflik internal PKB mulai terbuka. Ponpes Langitan kembali dijadikan sebagai arena konsolidasi kekuatan politik. Pada saat konflik episode Mathori, Kiai Faqih masih berada dibelakang Gus Dur. Namun pada saat konflik episode Alwi Shihab, pengasuh Ponpes Langitan berubah sikap dengan membela barisan Alwi dan Saefullah Yusuf. Sikap itu terus dilanjutkan sampai dengan munculnya PKNU. Kiai

Faqih termasuk salah satu figur yang mendorong terbentuknya partai itu bahkan menjadi salah satu deklarator PKNU.

7. Bangkalan Madura

Ponpes ini terletak di Kademangan Bangkalan Madura. Kiai Cholil, pendiri sekaligus pengasuh ponpes Kademangan, bagi kalangan warga NU dikenal sebagai salah *waliyullah*. Banyak cerita yang mengisahkan sosok Kiai Cholil sebagai seseorang yang *waskito dan weruh sadurunge winarah* (tahu sebelum peristiwa itu terjadi). Kiai Cholil juga dikenal sebagai pencetak kiai-kiai besar dan bertangan dingin. Diantara santrinya adalah KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Chasbullah, keduanya pendiri NU. Santri-santri lainnya adalah Kiai Bisri Syansuri (pendiri Ponpes Denanyar), Kiai Mahsum (Pendiri Ponpes Lasem Rembang), Kiai Bisri Musthofa (pendiri Ponpes Rembang dan pengarang kitab terkenal) dsan sebagainya. Jika dirunut dari nenek moyangnya, Kiai Cholil masih termasuk keturunan dari Sunan Gunung Jati.

Sepeninggal Kiai Cholil tidak banyak jejak yang ditorehkan dalam perkembangan pesantren maupun aktifitas sosial kemasyarakatan. Namun demikian, para politisi NU sangat menghormati keberadaan keluarga Kiai Cholil. Kiprah dalam dunia politik dilakukan oleh salah satu keturunannya, yaitu KH Fuad Amin Imron. Kiai Fuad pernah menjadi anggota DPR RI dan saat ini menjabat sebagai Bupati Bangkalan sekaligus sebagai Ketua Dewan Syuro PKB Jatim.

Sebagaimana di Jawa Tengah di luar ponpes tersebut masih banyak ponpes atau kiai lain yang memiliki pengaruh cukup kuat. Jawa Timur dikenal sebagai *gudangnya* ponpes dan kiai. Kiai-kiai itu memiliki otoritas secara mandiri termasuk dalam sikap politiknya. Namun dalam situasi tertentu, para kiai itu dapat berada dalam satu barisan atau kepentingan yang sama.

Tabel 3.2
Pusaran Pengaruh Ponpes dan Kiai di Jawa Timur

Wilayah	Ponpes	Kiai atau Klan
Pantai utara (pantura) Jawa Timur	Langitan Tuban	<p>Dikenal masyarakat dalam konteks politik sejak Gus Dur memunculkan istilah Kiai Langitan sebagai sebutan untuk beberapa kiai <i>sepuh</i> yang dihormati dan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan politik. Penyebutan ini bukan tanpa maksud. Dalam teks politik, penyebutan ini dapat dimaknai sebagai berikut: <i>Pertama</i>, Gus Dur ingin terlihat atau tercitra sebagai figur yang selalu mengedepankan peran dan suara dari para kiai. Sebuah sikap yang selama ini menjadi ciri dan karakter warga NU. <i>Kedua</i>, Gus Dur sekaligus ingin memperoleh dukungan politik dari para kiai dan santri. Ibaratnya sekali langkah dua tiga pulau terlampaui. Melalui pengorganisiran para kiai <i>sepuh</i> akan lebih memudahkan bagi Gus Dur untuk menguatkan dukungan politik dari warga NU pada dirinya. Ketiga, istilah Langitan, selain merujuk pada nama tempat (lokasi salah satu ponpes di daerah Tuban Jawa Timur) juga sekaligus simbolisasi bahwa dukungan itu juga merupakan hasil permenungan dan cerminan suara langit (Tuhan). Artinya, membawa kebenaran yang hakiki.</p> <p>Figur dari ponpes ini adalah KH Abdullah Faqih. Diantara para kiai <i>sepuh</i> itu, Kiai Faqih merupakan salah satu figur yang dihormati. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan para kiai sering diselenggarakan di Ponpes Langitan. Pada masa awal konsolidasi, Gus Dur pun beberap kali berkunjung ke Langitan. Ponpes ini menjadi salah satu basis bagi konsolidasi kekuatan politik PKB, secara khusus konsolidasi kekuatan politik Gus Dur.</p>

		<p>Pada saat perbedaan politik mulai menguat dan konflik internal PKB mulai terbuka. Ponpes Langitan kembali dijadikan sebagai arena konsolidasi kekuatan politik. Pada saat konflik episode Mathori, Kiai Faqih masih berada dibelakang Gus Dur. Namun pada saat konflik episode Alwi Shihab, pengasuh Ponpes Langitan berubah sikap dengan membela barisan Alwi dan Saefullah Yusuf. Sikap itu terus dilanjutkan sampai dengan munculnya PKNU. Kiai Faqih termasuk salah satu figur yang mendorong terbentuknya partai itu bahkan menjadi salah satu deklarator PKNU.</p>
Jawa Timur bagian tengah dan selatan	Tebu Ireng	<p>Ponpes ini termasuk salah satu pesantren tertua di Jawa Timur, didirikan pada 1916 oleh KH Hasyim Asyari, pendiri NU. Sejalan dengan ketokohan sang pendiri, ponpes Tebu Ireng kemudian menjadi rujukan dari berbagai ponpes lainnya di Jawa Timur maupun di Indonesia. Peran strategis dan jejak sejarah Tebu Ireng menempatkan ponpes ini selalu menjadi perhatian dari berbagai kelompok kepentingan, termasuk pemerintah. Pada masa kepemimpinan KH Yusuf Hasyim, anak dari KH Hasyim Asyari dan paman dari KH Abdurrahman Wahid, Tebu Ireng berkembang pesat dan tumbuh menjadi pesantren modern.</p> <p>Pada saat PBNU mendirikan PKB, pengasuh ponpes Tebu Ireng ini juga tidak masuk dalam jajaran struktural partai. Gus Dur memang bersikap keras dan tegas. Orang-orang yang dianggap berseberangan secara pemikiran dan politik, meskipun itu sanak saudara, secara tegas tidak dimasukkan dalam partai baru buatan PBNU itu. Sikap ini yang kemudian mendorong KH Solahudin Wahid, salah satu adik kandung Gus Dur, untuk ikut mendirikan Partai Kebangkitan Umat (PKU). Solahudin Wahid (Gus Solah) pernah menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Azasi</p>

		Manusia (Komnas HAM) dan menjadi calon wakil presiden pada pemilu presiden 2004 bersama Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Pasangan capres dan cawapres dari Partai Golkar ini hanya mampu bertahan sampai putaran pertama.
	Denanyar	Tokoh terkemuka dari Ponpes Denanyar adalah KH Bisri Syansuri yang juga dikenal sebagai salah satu pendiri NU. Sebagai soko guru NU banyak alumni Denanyar yang menjadi pemimpin NU dan PKB. Salah satunya adalah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Muhaimin merupakan santri Denanyar yang memiliki karier politik cemerlang. Berbekal kelimuan selama menjadi santri di Denanyar serta pengalaman berorganisasi di PMII, Muhaimin melejit menjadi Sekretaris Jenderal DPP PKB mendampingi Mathori Abdul Djalil. Sepeninggal Bisri Samsuri, pengaruh Denanyar mulai surut. Meskipun demikian, peran dan sejarah tidak terhapus dari benak para santri-santri Denanyar.
	Lirboyo	KH Mahruz Ali merupakan pendiri sekaligus pengasuh ponpes Lirboyo. Dikenal sebagai sebagai kiai moderat dan juru islah dan diyakini memiliki kekuatan batin yang luarbiasa. Oleh karena itu, Ponpes Lirboyo dikenal tidak hanya sebagai pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama namun juga ilmu kanuragan bagi para santrinya. Dalam masa pergolakan kemerdekaan, KH Mahruz membekali para santrinya dengan ilmu kanuragan dan kekuatan batin untuk menghadapi pertempuran dengan tentara Belanda. Kiai ini juga termasuk salah satu tokoh NU yang ikut melahirkan revolusi jihad yang dicetuskan pada Mukdamar NU Jawa-Madura 1945. Sepeninggal Kiai Mahruz, kepemimpinan pondok dilanjutkan oleh salah satu puteranya, yaitu KH Imam Mahruz. Dalam dunia politik,

		sejalan dengan pembentukan partai baru oleh PBNU, Kiai Imam Mahruz pun ikut memperkuat barisan politisi PKB. Pada saat konflik internal membuahkan PKNU, Kiai Imam ikut terlibat di partai baru itu. Namun keterlibatan itu tidak lama, Kiai Imam kemudian masuk kembali ke jajaran PKB. Dalam konflik PKB episode ketiga yang memunculkan kubu Gus Dur versus Muhamin Iskandar, salah satu pengasuh Ponpes Lirboyo, KH Aziz Mansur terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB versi Muhaimin Iskandar.
	Ploso	Dalam percaturan politik, ponpes ini menjadi lebih dikenal pada publik terutama di luar komunitas NU setelah bergabung dalam wadah komunikasi non formal diantara para kiai, yaitu Poros Langitan. KH Idris Marzuki adalah pengasuh Ponpes Ploso. Pada awal berdirinya PKB, Kiai Idris merupakan salah satu anggota Dewan Syuro DPP PKB. Di masa-masa itulah Kiai Idris memiliki hubungan yang dekat dengan Gus Dur. Bobot kedekatan itu semakin erat pada saat Gus Dur diusulkan oleh kelompok politik yang menyebut dirinya Poros Tengah sebagai calon presiden. Sejalan dengan menguatnya perbedaan pandangan politik dengan Gus Dur, Kiai Idris bersama kiai-kiai yang selama ini bergabung dalam poros Langitan memutuskan mendukung Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf. Hingga saat ini, Kiai Idris termasuk dalam eksponen PKNU.
Madura	Bangkalan	Ponpes ini terletak di Kademangan Bangkalan Madura. Kiai Cholil, pendiri sekaligus pengasuh ponpes Kademangan, bagi kalangan warga NU dikenal sebagai salah <i>waliyullah</i> dan juga dikenal sebagai

		<p>pencetak kiai-kiai besar. Diantara santrinya adalah KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Chasbullah, keduanya pendiri NU. Santri-santri lainnya adalah Kiai Bisri Syansuri (pendiri Ponpes Denanyar), Kiai Mahsum (Pendiri Ponpes Lasem Rembang), Kiai Bisri Musthofa (pendiri Ponpes Rembang dan pengarang kitab terkenal) dan sebagainya. Jika dirunut dari nenek moyangnya, Kiai Cholil masih termasuk keturunan dari Sunan Gunung Jati.</p> <p>Sepeninggal Kiai Cholil tidak banyak jejak yang ditorehkan dalam perkembangan pesantren maupun aktifitas sosial kemasyarakatan. Namun demikian, para politisi NU sangat menghormati keberadaan keluarga Kiai Cholil. Kiprah dalam dunia politik dilakukan oleh salah satu keturunannya, yaitu KH Fuad Amin Imron. Kiai Fuad pernah menjadi anggota DPR RI dan saat ini menjabat sebagai Bupati Bangkalan sekaligus sebagai Ketua Dewan Syuro PKB Jatim.</p>
Tapal kuda	Asembagus Situbondo	<p>Figur utama dari Ponpes Sukorejo Banyuputih Asembagus Situbondo adalah KH As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad merupakan salah satu murid dari KH Cholil di Bangkalan Madura. Dalam sejarah kelahiran NU, As'ad muda dikenal sebagai utusan Kiai Cholil Bangkalan yang datang menemui KH Hasyim Asyari dengan membawa tongkat dan tasbih. As'ad membawa pesan dari KH Cholil bahwa guru dari KH Hasim Asyari itu merestui upaya-upaya mendirikan organisasi bagi kalangan Islam tradisional. Kiai As'ad juga dikenal sebagai penggagas ide untuk menerima Pancasila sebagai azas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan di kalangan NU.</p> <p>Sikap politik yang pada saat itu masih menjadi ajang tarik menarik di antara para kiai pendukung Islam formalis dengan Islam</p>

		<p>kulturalis. Dukungan Kiai As'ad sangat mempengaruhi sikap muktamirin (peserta muktamar) NU pada 1984. Sebagai hasilnya, dalam Muktamar itu, NU menegaskan untuk menerima Pancasila sebagai azas organisasi dan menyatakan sikap kembali ke Khittah 1926.</p> <p>Dikemudian hari, diantara Gus Dur dan Kiai As'ad terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Sangat tajamnya perbedaan itu menyebabkan Kiai As'ad kemudian mengambil sikap untuk memutuskan hubungan politik dan organisatoris dengan Gus Dur. Dalam khazanah NU, dikenal dengan istilah <i>mufaraqah</i>. Sikap Kiai As'ad ini disampaikan satu minggu setelah Muktamar NU ke 28 di Pesantren Krapyak Yogyakarta pada 1989.</p> <p>Namun pada PBNU mendirikan PKB, KH Fawaid, salah satu putera Kiai As'ad ikut berpartisipasi secara aktif di PKB Jawa Timur. Keterlibatan keluarga As'ad memiliki pengaruh cukup kuat untuk mendongkrak perolehan suara PKB pada pemilu 1999. Namun, sejalan dengan konflik internal yang terjadi di PKB, Kiai Fawaid kemudian berpindah kandang ke PPP. Ekses kepindahan itu sangat signifikan bagi penurunan suara PKB pada pemilu 2004 terutama di Situbondo dan sekitarnya.</p>
--	--	--

3.1. Merunut Akar Konflik

Merunut akar konflik tidak mudah, namun setidaknya ada beberapa ukuran yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mengurai konflik itu, yaitu: *Pertama*, ideologi atau sistem nilai yang dijadikan sebagai basis gerakan. *Kedua*, rumusan kepentingan dibelakang kelompok yang saling berkonflik. *Ketiga*, peran pihak luar (intervensi eksternal) di luar organisasi itu.

PKB sebagai partai yang didirikan oleh PBNU menempatkan sistem nilai organisasi sosial keagamaan itu sebagai basis gerakan politik. Hal itu secara tegas dituangkan dalam deklarasi, mabda syiasi dan naskah *baiat* pengurus partai yang semuanya menuangkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan NU. Terdapat hubungan yang unik antara NU dan PKB. Disatu sisi, meski secara resmi PBNU mengakui memfasilitasi berdirinya PKB, namun disisi lain, kedua organisasi itu menyatakan tidak ada hubungan organisatoris. Secara tegas, NU tetap memegang teguh Khittah 1926.

Hubungan NU dan PKB mengalami pasang surut. Pada masa awal kiprahnya, hampir semua pengurus NU dalam segala tingkatan mendukung atau terlibat penuh di PKB. Dukungan dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU dan deklarator PKB tidak diragukan lagi. Begitupula saat tampuk pimpinan PBNU beralih ke KH Hasyim Muzadi. Puncak dukungan itu terlihat pada saat Gus Dur menjabat presiden. Peran KH Hasyim Muzadi pada saat itu lebih banyak dikenal publik sebagai pembela Gus Dur daripada Ketua Umum PBNU. Namun bulan madu itu tidak berlangsung lama, sejak tergusurnya Gus Dur dari kursi presiden, hubungan personal diantara Gus Dur

dan Hasyim Muzadi mengalami keretakan. Tak pelak, retaknya hubungan personal itu mempengaruhi hubungan organisatoris antara PBNU dengan PKB, terutama di level pimpinan nasional.

Konflik internal PKB pun berimbas pada NU sebagai tempat bernaung para kiai/ulama. Citra buruk juga mengimbas ke organisasi tersebut. Sebenarnya, NU sebagai institusi tempat bernaungnya para kiai itu tidak diam dalam menyikapi pergerakan politik para anggotanya.

Setidaknya NU telah mengeluarkan pedoman yang disebut sebagai Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU, yaitu: (1) Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (2) Politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yakni terwujudnya masyarakat adil makmur lahir batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

(3) Berpolitik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. (4) Berpolitik bagi NU dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menunjung tinggi persatuan

Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(5) Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani, moral agama, konstitusional sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. (6) Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan dengan *akhlaqul karimah* sebagai pengamalan ajaran Islam *Ahlussunah wal jama'ah*. (7) Berpolitik bagi NU dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama memecah belah persatuan.

(8) Perbedaan pandangan diantara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu'dan saling menghargai satu sama lain sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU. (9) Berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.⁸⁵

Sembilan pokok pedoman itu secara tekstual sangat normatif namun jika diikuti secara nyata dalam tataran praktik politik, perilaku politik warga NU akan

⁸⁵ Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU dikutip dari; Drs. Choirul Anam. *Seandainya Aku Jadi Mathori*. Surabaya, Bisma Satu Printing, 2002.

menjadi sangat elegan. Tidak hanya dalam relasi di antara sesama politisi NU namun dengan komunitas politik non NU. Namun jika melihat realitas politik, pedoman itu hanya bermakna dalam tataran tekstual. Praktik politik dari warga NU justru terkesan mengabaikan dan bertolakbelakang dengan pedoman itu. Artinya, akar konflik dan awal mula permasalahan tidak terletak pada sistem nilai namun pada praktik dan perilaku politik. Ada keretakan bidang praksis dalam penerapan ideologi di kalangan warga NU.

Hal itu sejalan dengan pernyataan dari salah satu Deklarator PKB KH Muchit Muzadi sebagaimana dikutip dalam NU online⁸⁶, 11 September 2007. Kiai sepuh itu menilai konflik di PKB merupakan akibat kader-kader PKB mengedepankan politik kekuasaan untuk pribadi dan bukan politik kenegaraan untuk kesejahteraan rakyat.

"Saya tidak akan memberi nasehat apa-apa, tapi saya akan berdoa saja agar mereka kembali kepada politik kenegaraan dan bukan politik kekuasaan yang membuat mereka berkonflik seperti selama ini," ujarnya dalam acara "Temu Kangen" memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-84 NU pada 16 Rajab 1428 (31 Juli) di kantor sekretariat PWNU Jatim, Surabaya.

"Saya nggak ingin memberi nasehat, karena mereka bisa marah, saya akan berusaha memberikan teladan dan berdoa," ucap kakak dari Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi itu.

Menurut Mustasyar (penasehat) PBNU itu, kader-kader PKB hendaknya kembali kepada hati nurani dan meneladani para ulama NU yang melahirkannya. Ia menambahkan NU secara institusi tidak boleh dibawa-bawa dalam politik praktis, karena NU merupakan organisasi independen, bebas, mandiri, dan tak menjadi bagian dari organisasi lain. Sejumlah kiai NU pun gerah melihat konflik tersebut. Salah satu

⁸⁶ Dikutip dari nu.or.id, diakses pada 11 Sept 2007.

diantaranya adalah KH Mustofa Bisri (Gus Mus)⁸⁷. Pada prinsipnya, Gus Mus menilai, konflik di tubuh partai berlambang bola dunia itu tidak akan selesai kalau pihak-pihak yang berkonflik tidak bertemu. Pertemuan itu harus didasari inisiatif kedua pihak yang terlibat konflik. Lebih lanjut, budayawan NU ini menyatakan, selama masih ada intervensi pihak luar, masalah dualisme PKB tidak akan pernah selesai.

Membaca statemen itu, dalam pandangan Gus Mus terdapat faktor intervensi dari luar PKB yang ikut memperkeruh konflik tersebut. Faktor intervensi ini acapkali juga dikemukakan oleh sebagian kader PKB sebagai salah satu akar persoalan konflik internal. Dalam masa konflik yang memunculkan Mathori sebagai tokoh antagonis, tudingan intervensi pihak luar ditujukan pada kekuatan politik dibelakang Megawati Soekarnoputeri. Mathori dituduh telah melakukan konspirasi politik dengan elemen-elemen pendukung Megawati untuk mempercepat pergantian kekuasaan dari Gus Dur ke Mega. Pemilihan Mathori sebagai menteri pertahanan dalam kabinet Megawati semakin mempertegas tuduhan itu.⁸⁸

Dalam konflik yang memunculkan Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf, tudingan intervensi pihak luar ditujukan pada orang-orang di lingkaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kedua politisi PKB itu pun kemudian menjadi menteri dalam kabinet Yudhoyono-Kalla. Kritik-kritik Gus Dur terhadap Pemerintahan Yudhoyono sangat keras dan tidak pernah surut meskipun

⁸⁷ Penuturan KH Mustofa Bisri di muat dalam NU online. Diakses penulis pada 15 September 2007.

⁸⁸ Tuduhan terhadap Mathori salah satunya diungkap oleh Choirul Anam dalam buku yang ditulisnya dengan judul *Seandainya Aku Jadi Mathori*. Surabaya, Bisma Satu Printing, 2002.

kemudian salah satu puterinya, Yenny Wahid diangkat menjadi staf khusus presiden dibidang komunikasi politik⁸⁹.

Konflik episode II berakhir dengan kekalahan secara hukum pada pihak-pihak yang berseberangan dengan Gus Dur. Menyikapi kekalahan itu, Alwi Shihab, Choirul Anam dan sebagian para kiai mendirikan partai baru, PKNU, yang sudah dipersiapkan sejak masa konflik. Fenomena agak mengejutkan justru dilakukan oleh Saefullah Yusuf. Sebagai salah satu motor dan inisiator kelompok itu justru pada akhirnya tidak masuk ke PKNU namun memilih berpindah ke PPP. Sikap Saefullah ini mengundang kekecewaan sebagian kiai, terutama KH Abdurahman Chudlori. Saefullah dinilai lepas tangan dan hanya mementingkan dirinya sendiri dengan memilih jabatan di PPP.⁹⁰

Fenomena terbaru dalam konflik PKB adalah munculnya konflik baru pasca berakhirnya konflik era Alwi Shihab. Hal yang ironis, pada saat fase rekonsolidasi pasca konflik belum selesai (termasuk proses *recalling* terhadap kader partai di DPR/D yang menyeberang ke PKNU) dan konsolidasi menjelang Pemilu 2009, konflik internal kembali meletup di tubuh PKB. Konflik ketiga ini memunculkan kubu Gus Dur versus Muhaimin Iskandar.

Sebenarnya, desas-desus ketidakpuasan terhadap kinerja Muhaimin Iskandar sudah muncul lama. Termasuk pada masa konflik dengan barisan Alwi Shihab.

⁸⁹ Setelah terpilih menjadi Sekjen DPP PKB, Yenny kemudian mengundurkan diri dari posisi sebagai staf khusus presiden.

⁹⁰ Ungkapan ini muncul dalam percicangan secara informal dengan beberapa santri/murid dari Mbah Dur.

Muhaimin dituduh banyak berjalan sendiri dan mengabaikan garis partai atau secara khusus kebijakan Gus Dur selaku Ketua Umum Dewan Syuro, pimpinan tertinggi PKB. Muhaimin bahkan diindikasikan hendak menggusur Gus Dur dari posisi Ketua Umum Dewan Syuro dan hendak digantikan oleh Hasyim Muzadi.

Letupan pertama muncul ke publik adalah pada saat diangkatnya Sekretaris Jenderal DPP PKB Lukman Edy sebagai Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) menggantikan Saefullah Yusuf dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Gus Dur menilai Muhaimin mengambil keputusan secara sepihak dalam proses politik itu. Lukman Edy akhirnya diberhentikan dari jabatan sebagai Sekjen dalam rapat pleno DPP PKB. Posisi itu kemudian digantikan oleh Yenny Wahid. Penilaian negatif lainnya terhadap Muhaimin adalah kegagalan menerjemahkan instruksi partai dalam mengelola kepentingan konstituen atau masyarakat dalam proses politik di parlemen.⁹¹

Konflik itu semakin memuncak dengan tindakan pembekuan beberapa kepengurusan di tingkat wilayah dan cabang oleh DPP PKB. Selain pembekuan, DPP juga melakukan pergantian atau reposisi kepengurusan. Bagi sebagian kalangan, pembekuan itu dilakukan untuk mengikis orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Muhaimin Iskandar. Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai basis kekuatan PKB tidak luput dari kebijakan itu. Sebagai contoh; Abdul Kadir Karding,

⁹¹ Rumor dan isu itu terungkap dalam perbincangan dengan sejumlah pengurus DPP PKB dan aktifis badan otonom partai seperti Garda Bangsa dan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB). Salah satu ungkapan perbedaan *style* politik antara Gus Dur dan Muhaimin diibaratkan antara langgam dangdut dengan jazz. Perumpamaan itu dikemukakan oleh Devi, mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Puteri NU (IPPNU). Gaya politik Gus Dur yang lebih merakyat diibaratkannya dengan langgam dangdut sedangkan Muhaimin bergaya *jazzy* yang dinilai lebih elitis.

Ketua DPW PKB Jawa Tengah hasil Musyawarah Luar Biasa (Muswilub) di Kudus dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Yusuf Chudlori.⁹² Karding kemudian ditarik menjadi salah satu ketua di jajaran DPP PKB. Kepengurusan DPW PKB Jawa Timur dibawah Imam Nahrowi juga dibekukan.

Ditingkat pengurus pusat dan badan otonom/sayap kepartaian, DPP PKB memberhentikan Hanif Dhakiri dari jabatan Wakil Sekretaris Jenderal dan Eman Hemawan dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB dan Ketua Umum DKN Garda Bangsa, sayap politik PKB di sektor pemuda. Karding, Nahrowi, Eman dan sebagainya merupakan kader partai yang memiliki kedekatan dengan Muhaimin Iskandar. Kedekatan itu dibangun sejak aktif di PMII. Sebagian besar diantara mereka merupakan pengurus PMII ditingkat wilayah maupun cabang pada masa Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Ketua Umum PB PMII.

Konflik itu mencapai puncaknya dengan diberhentikannya Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB. Pemberhentian ini kemudian menyulut munculnya dua Muktamar Luar Biasa (MLB). MLB versi Gus Dur dilaksanakan di Parung Bogor sedangkan MLB versi Muhaimin Iskandar dilaksanakan di Ancol Jakarta. MLB Bogor menghasilkan kepengurusan baru dengan nakhoda Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro dan Ali Maskur Musa sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Sedangkan pada posisi Sekretaris Dewan Syuro dan

⁹² Sebelum diangkat menjadi Pjs Ketua DPW PKB Jawa Tengah, KH Yusuf Chudlori menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Magelang. Yusuf Chudlori merupakan pengasuh Ponpes Akademi Perguruan Islam (API) Tegalrejo dan adik kandung dari KH Abdurrahman Chudlori, Ketua umum Dewan Syuro DPP PKNU.

Sekretaris Jenderal DPP PKB tetap dipegang oleh Muhyidin Arbusman dan Yenny Wahid. Diluar perubahan komposisi kepengurusan, tidak banyak hal yang dirumuskan dalam MLB Parung.

MLB Ancol yang dilakukan selang satu hari pasca MLB Parung menghasilkan kepengurusan baru dengan Ketua Umum Dewan Syuro dipegang oleh KH Aziz Mansyur.⁹³ Sedangkan jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz tetap dipegang Muhaimin Iskandar sedangkan jabatan Sekjen dipegang kembali oleh Lukman Edy. MLB Ancol juga membentuk lembaga baru di tingkat DPP yaitu Mutasyar atau Dewan Penasehat Partai Lembaga ini diisi oleh para kiai sepuh yang berada di belakang Muhaimin Iskandar. Hasil muktamar lainnya adalah perubahan dalam AD/ART khususnya mengenai kewenangan Dewan Syuro yang tidak lagi tersentralisir pada satu figur namun merupakan kepemimpinan kolektif. Hal lain yang menarik, Lily Wahid, salah satu adik kandung Gus Dur justru mendukung MLB Ancol. Hasil MLB menempatkan Lily Wahid sebagai salah satu Ketua Dewan Syuro DPP PKB.

Tudingan adanya intervensi pihak luar kembali mengemuka dalam konflik episode ketiga ini. Pihak Muhaimin menuduh akar persoalan PKB ada pada Yenny Zannuba Chafsoh atau lebih dikenal dengan sebutan Yenny Wahid, puteri Gus Dur yang menjabat Sekretaris Jenderal DPP PKB. Dalam wawancara dengan TV One di sela-sela MLB Ancol, Lily Wahid mengemukakan kekecewaan dan tindakan tidak

⁹³ KH Aziz Mansur merupakan salah satu pengasuh Ponpes Lirboyo. Sebelum terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB versi Muhaimin Iskandar, KH Aziz Mansur adalah Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur pro Muktamar II Semarang.

terpuji Yenny Wahid yang masih terhitung keponakannya sendiri. Namun Lily Wahid tidak secara jelas mengungkapkan sisi tidak terpuji dari keponakannya itu.

Kubu Muhaimin berpendapat sejak masuknya Yenny Wahid dalam kepengurusan PKB, konflik internal semakin mengemuka. Yenny dituding memecah belah partai dengan serangkaian kebijakan pembekuan, pencopotan dan berbagai kebijakan lainnya. Selain itu, Yenny juga dianggap sebagai boneka dari aktor politik di luar PKB. Tuduhan ini dialamatkan pada figur bernama Sigid Haryo Wibisono.⁹⁴ Sosok agak misterius ini sangat jarang muncul ke publik. Tidak banyak yang tahu tentang kiprah politiknya, namun Sigid dianggap sebagai biang kerok dari perpecahan PKB.

Salah satu temuan Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh DPP PKB versi Muhaimin Iskandar⁹⁵ sempat menyinggung nama Sigid sebagai salah satu aktor yang berperan besar dalam memecah belah PKB. Sigid, mantan politisi Golkar di Jawa

⁹⁴ Menurut informasi dari berbagai sumber, Sigid Haryo Wibisono merupakan salah satu staff khusus Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Kiprah politik Sigid dimulai sejak masa Orba dengan menjadi pengurus Golkar Jawa Tengah. Sigid pernah menjadi anggota DPRD Jawa Tengah dari Golkar. Dikenal dekat dengan kalangan militer dan memiliki jaringan kuat di segenap lini politik dan pemerintahan. Sigid dianggap berjasa dalam membantu Gus Dur dalam menangani konflik dimuka hukum dengan kelompok Alwi Shihab. Selain itu, desas-desus yang berkembang dikalangan PKB, Sigid memiliki kedekatan khusus dengan Yenny Wahid. Kedekatan itu yang kemudian menjadi jalan masuk bagi Sigid untuk mengendalikan PKB melalui Yenny Wahid. Tidak banyak hal yang bisa digali dari informasi ini. Penulis juga tidak dapat memperoleh konfirmasi secara langsung dari yang bersangkutan.

⁹⁵ Tim Pencari Fakta dipimpin oleh Nursyahbani Katjasungkana, anggota FKB DPR RI dan mantan Ketua DPW PKB Jakarta. Nursyahbani sebelum masuk PKB dikenal sebagai aktifis LSM dan dekat dengan Gus Dur. Kedekatan itu membawanya masuk ke PKB dan kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI. Tidak hanya itu, dalam Muswil DPW DKI Jakarta, Nursyahbani terpilih sebagai Ketua DPW. Namun posisi itu tidak terlalu lama dijabatnya, pasca pemilihan Gubernur DKI, DPP PKB membekukan kepengurusan Nursyahbani. Posisi Ketua DPW DKI Jakarta kemudian pegang oleh Pejabat Sementara, yaitu Muslim Abdurrahman. Figur ini erupakan aktifis Muhammadiyah yang kemudian masuk ke PKB. Dalam beberapa kesempatan, Muslim mengakui dirinya sangat dekat dengan Sigid.

Tengah sempat masuk sebagai anggota Dewan Syuro DPP PKB. Namun keberadaannya di Dewan Syuro tidak berlangsung lama. Sejalan dengan munculnya berita *miring* itu, yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri dari keanggotaan di Dewan Syuro. Dalam wawancara dengan Majalah Tempo, Sigid menolak berita negatif seputar dirinya dan menganggap dirinya terlalu kecil untuk dapat mempengaruhi Gus Dur. Sigid juga menyatakan, mengagumi visi Gus Dur terhadap bangsa, oleh karena itu ia dengan sepenuh hati membantu Gus Dur untuk mewujudkan visi tersebut.

Track record PKB dalam konflik internal sangat fenomenal. Tiga orang (Mathori Abdul Djali, Alwi Shihab dan Muhaimin Iskandar) yang pernah menduduki Ketua Umum Dewan Tanfidz mengalami nasib yang sama, dicopot dari jabatan tersebut sebelum masa jabatannya berakhir. Ketiga orang tersebut juga dikenal dekat secara personal dengan Gus Dur, bahkan Muhaimin memiliki hubungan kekerabatan sebagai keponakan. Namun, bagi Gus Dur, kedekatan personal dan hubungan kekerabatan sangat berbeda dengan hubungan politik. Sejarah masa lalu Gus Dur membuktikan hal itu. Hubungan kekerabatan dengan Yusuf Hasyim, tidak lantas menyurutkan sikap politik yang berbeda bahkan cenderung konflik dengan sang paman tersebut. Begitupula sikap Gus Dur pada dua keponakannya, Saefullah Yusuf dan Muhaimin Iskandar serta pada adik kandungnya, Lily Wahid yang memilih berada di belakang Muhaimin Iskandar. Seiring dengan munculnya konflik, MLB pun juga dilaksanakan lebih dari satu kali. Suatu kondisi yang jarang ditemukan dalam partai yang lain.

Kesamaan lainnya, ketiga Ketua Umum Dewan Tanfidz itu juga melakukan perlawanan terhadap Gus Dur. Hasilnya, dalam dua konflik terdahulu Gus Dur memperoleh kemenangan. Mathori mengalami kekalahan telak di pengadilan. Partai baru yang didirikannya pun tidak mampu lulus dari verifikasi KPU. Alwi Shihab mengalami nasib yang sama. Perbedaannya, kali ini Alwi didukung oleh banyak kiai. Sedangkan Muhaimin Iskandar, saat ini tengah bertarung dengan kubu Gus Dur untuk memperebutkan keabsahan PKB di mata hukum. Keputusan kasasi MA, menempatkan Muhaimin sebagai pemenang, begitupula sikap dari lembaga politik seperti Depkumham dan KPU semakin mengukuhkan posisi politik Muhaimin Iskandar.

Konflik-konflik itu kemudian dijadikan legitimasi untuk mengambil sikap politik berbeda. Legitimasi moral dibangun untuk menguatkan pilihan sikap tersebut. Yaitu, keinginan untuk melakukan koreksi terhadap ketidakbenaran. Dalam salah satu artikel yang membahas mengenai konflik PKB dan berdirinya PKNU, KH Abdurrahman Chudlori menyatakan:⁹⁶

“...partai ini mempertontonkan tingkah laku yang melenceng jauh dari cita-cita politik kiai. Akibatnya para kiai yang semuanya merupakan tokoh-tokoh NU terkemuka bersepakat bahwa partai ini tidak dapat lagi dijadikan sebagai alat perjuangan politiknya. Karena, sudah sangat menyimpang dari rancang bangun partai politik yang diharapkan baik dari sisi perilaku, platform, struktur dan terutama ideologi. Sekalipun pembentukannya difasilitasi oleh PBNU, namun akibat dari pelbagai penyimpangan tersebut, pada Muktamar NU ke-30 di Asrama Haji Donohudan Solo PBNU secara tegas menyatakan tidak lagi ada ikatan politik, kultural dan emosional dengan PKB.

Bertolak dari serangkaian pertemuan yang dilakukan secara maraton oleh

⁹⁶ Abdurrahman Chudlori. *Politik Kiai dan PKNU*. Website PKNU, diakses pada 30 Maret 2007.

sejumlah kiai sepuh yang terakui kredibilitas moral dan keilmuannya atas dinamika politik tersebut dan diikuti oleh permohonan petunjuk kepada Allah SWT dicapailah satu kesepakatan bahwa para kiai mendirikan partai baru yang bernama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebagai alat perjuangan bukan untuk meraih kekuasaan. Kelahiran PKNU berarti Kebangkitan Nasional dari (minal) Ulama. Partai ini didirikan oleh para kiai untuk dijadikan sebagai kekuatan penggerak yang paling andal bagi kebangkitan nasional kedua di Indonesia guna melakukan pelbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah rusak.

Perubahan mendasar yang dikehendaki oleh PKNU mencakup perubahan tatanan nilai, system dan kepemimpinan yang pada saat ini sangat mendesak untuk dibenahi. Akad politik para kiai sepuh itu terlaksana di Pesantren Langitan pada tanggal 21 November 2006, ditandatangani oleh tujuh belas kiai yakni : K.H. Abdullah Faqih, K.H. Ma'ruf Amin, K.H. Abdurrochman Chudlori, K.H. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, K.H. M. Idris Marzuki, K.H. A. Warson Munawwir, K.H. Muhaiminan Gunardo, K.H. Abdullah Schal, K.H. Sholeh Qosim, K.H. Nurul Huda Djazuli, K.H. Chasbullah Badawi, K.H. Abdul Adzim Suhaimi MA, K.H. Muhammad Subadar, K.H. Humaidi Dahlan, K.H. Thahir Syarkawi, Habib Hamid bin Hud Al-Attas dan K.H. Aniq Muhammadun.

Akad kiai ini menegaskan bahwa PKNU akan membangun warna baru di pentas politik nasional : politik kiai, yakni partai politik dan politisi bergerak sesuai dengan arahan dan bimbingan para kiai, bukan kiai politik yang cenderung berarti kiai-lah yang terseret arus politik. Hal ini menegaskan bahwa karakter politik kiai dibangun di atas landasan bahwa politik merupakan alat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (iqomatul haq wal 'adli) dengan orientasi kepada amar ma'ruf nahi munkar sehingga bagi PKNU politik lebih dimaknai sebagai ibadah untuk mencari ridlo Allah SWT, sehingga politik bukanlah sekedar mengejar, meraih dan mempertahankan kekuasaan belaka.

Pelanggaran terhadap aturan partai, moralitas politik dan menegakkan kebenaran merupakan bahasa yang dipergunakan dari setiap kelompok yang berkonflik untuk membangun basis legitimasi politiknya. Bangunan argumentasi itu tidak hanya muncul dari mantan kader PKB yang kemudian mendirikan PKNU. Mathori Abdul Djalil dan terakhir dikemukakan oleh Muhamin Iskandar. Dalam wawancara dengan majalah Tempo, Muhaimin menjelaskan sikapnya dalam

menhadapi konflik dengan kubu Gus Dur. Ia menyatakan bahwa persoalannya bukan pada jabatan dan kepentingan pribadi maupun hubungan personal dengan Gus Dur, namun dirinya mengemban amanah dan tanggungjawab untuk mendudukan persoalan secara benar.

Muhaimin berpendapat bahwa amanat dari muktamirin yang telah memilihnya dan aspirasi para kiai yang berada dibelakangnya harus dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban itu adalah dengan melakukan perbaikan dan perubahan pada partai bukan dengan jalan menerima tekanan untuk mundur dari jabatan Ketua Umum DPP PKB.

Sebaliknya, Gus Dur pun juga mengemukakan hal yang tidak jauh berbeda. Meskipun mengaku secara pribadi tidak ada persoalan dengan Muhaimin, namun keponakannya itu oleh Gus Dur dianggapnya sebagai tukang bohong. Gus Dur juga berpandangan bahwa Muhaimin lebih banyak dikendalikan oleh orang-orang disekelilingnya yang memiliki watak tidak jujur. Gus Dur juga sempat membuat artikel yang bernada klarifikasi terhadap terhadap tuduhan nepotisme, otoritarianisme serta demokrasi berwajah ganda di PKB dalam salah satu media massa terbitan Jakarta. Berikut ini kutipan artikel tersebut:⁹⁷

“...Tuduhan itu tentu dialamatkan kepada penulis artikel ini yang sekarang menjadi Ketua Umum Dewan Syura Dewan Pimpinan Pusat parpol tersebut. Adapun sistem kekeluargaan itu dituduhkan kepada Yenny Arifah Chafsoh Wahid, anak kandung penulis yang dipilih pengurus partai menjadi sekretaris jenderal (sekjen) parpol itu. Membaca tulisan di atas tanpa mempertimbangkan artikel yang ada di tangan pembaca ini, akan merencanakan pandangan tentang keadaan PKB sebagai parpol

⁹⁷ KH Abdurahman Wahid. *Prasarat Demokrasi: Kejujuran*. Seputar Indonesia, 28 September 2007.

pada saat ini. Sebenarnya banyak hal yang patut dipertimbangkan dalam soal ini.

Hal yang perlu diperhatikan, pertama, Yenny, anak kandung penulis, bukanlah orang yang penulis kehendaki menjadi sekjen partai. Penulis mengusulkan kepada sidang rapat gabungan Dewan Syura dan Tanfidz PKB agar Anisa Mahfudz ditunjuk sebagai pengganti sekjen parpol tersebut. Tetapi melalui pemungutan suara, sidang itu memilih Yenny sebagai sekjen. Apakah ini dapat dinamakan sistem keluarga atau bukan adalah sesuatu yang harus dipersoalkan terlebih dahulu.

Penulis opini tersebut juga berkesimpulan bahwa ada perkembangan baru, yaitu kepemimpinan otoriter penulis artikel ini di partai tersebut. Ini haruslah dibicarakan secara teliti, karena penulis opini tersebut tidak pernah memperhatikan sebuah prasyarat lain bagi demokratisasi, yaitu kejujuran. Tindakan-tindakan yang diambil Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB seluruhnya didasarkan pada aspek kejujuran ini.

Penulis artikel ini baru mengetahui bahwa ada semacam permainan dalam tubuh PKB yang sebenarnya juga dijalani oleh parpol-parpol lain, yaitu merajalelanya penggunaan uang dalam kerja-kerja berbagai parpol itu. Nah, kalau penulis bercita-cita menegakkan demokrasi dalam kehidupan politik di Indonesia, dapatkah itu terlaksana kalau parpolnya sendiri masih “menggunakan” uang secara besar-besaran dalam kehidupan mereka?

3.5. Konflik Dalam Pandangan Pihak Luar.

Dari sudut pandangan dari luar aktifis PKB, konflik internal yang tidak kunjung usai ini sebenarnya berujung pada kekuasaan. Sebagaimana dikemukakan peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi⁹⁸, masalah utama yang dihadapi PKB adalah terkurasnya energi partai untuk menangani konflik internal. Situasi itu tidak dapat dilepaskan dari watak kekuasaan yang bermuka dua, mempesona sekaligus merusak. Konflik dalam tubuh PKB juga melanda antara murid (Mathori Abdul Djilil) dengan sang guru, Gus Dur. Dalam

⁹⁸ J. Kristiadi. *Pergulatan dan Tantangan PKB Memenuhi Harapan Bangsa dalam 9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan*. Jakarta; Panitia Harlah ke 9 PKB, 2007. Hal. 126-127.

kasus ini, watak kekuasaan benar-benar mengejawantah dalam perseteruan antara murid dan guru. Pokok persoalan perseteruan itu sendiri sejauh yang dicermati, bukanlah hal yang terlalu prinsip, dalam arti menyangkut prinsip-prinsip perjuangan partai. Konflik lebih banyak terjadi karena perbedaan perspektif dalam menanggapi isu-isu politik yang berkembang.

Pengamat politik Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Muhammad Asfar MSi menilai konflik itu bukan hanya konflik politik, tapi juga konflik hubungan personal, sebab ada kiai yang merasa tak dihargai dan tak dihormati. Artinya, ada kepentingan politik beberapa kiai.⁹⁹

Hal yang sama meski tidak secara tegas diungkapkan pula oleh Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Sunardi Rinakit.¹⁰⁰ Ia mengemukakan pada awalnya PKB memiliki modal sosial yang bagus dan kuat, yaitu kekuatan simbol sebagai partai tengah karena berada di median kontinum nasionalis dan Islam. Selain itu juga didukung oleh anak-anak muda NU yang terdidik yang berkehendak membuat simpul sejarah baru yaitu mempertegas eksistensi sebagai sungai budaya politik di Indonesia. Namun, sebuah simpul sejarah akhirnya mencatat, entah karena alasan perbedaan visi atau kuatnya waham berkuasa, mimpi baru dan bangkitnya generasi muda NU sekolahan akhirnya tersendat. Sungai budaya yang awalnya berair jernih pun akhirnya berubah menjadi keruh.

Melihat realitas itu, terjawab sudah akar konflik yang ada di PKB. Bukan

⁹⁹ Dikutip dari NU online. Diakses pada 7 September 2007.

¹⁰⁰ Sukardi Rinakit. *PKB, Sebuah Sungai Budaya*. *Ibid*, hal 134-135.

persoalan ideologis namun benturan berbagai kepentingan pragmatis diantara para kadernya dan ditambah dengan adanya campur tangan dari pihak eksternal. Namun faktor eksternal inipun tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh PKB jika unsur dari dalam partai itu tidak mengundang atau setidaknya menerima adanya tangan-tangan dari luar partai. Proses ideologisasi yang belum selesai, proses kaderisasi partai yang tidak berjalan dan mandulnya fungsi-fungsi kepartaian dalam struktur PKB menjadi katalisator rentannya partai ini terhadap konflik internal.

Deskripsi singkat konflik PKB dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 3.3
Akar Konflik PKB

Episode Konflik	Latar Belakang dan Pemicu Konflik	Faktor-faktor penyebab Konflik		
		Ideologi	Kepentingan pragmatis	Intervensi Pihak Luar
Mathori Abdul Djalil	Perbedaan sikap politik antara Mathori Abdul Djalil dan pendukung Gus Dur dalam peristiwa pemakzulan GusDur dari Presiden pada SI MPR. Perbedaan itu berbuah pada pemecatan Mathori dari Ketua Umum DPP PKB. Konflik ini sempat menghasilkan dualisme kepengurusan dan kelembagaan PKB mulai dari tingkat pusat sampai cabang. Pasca keputusan pengadilan yang memenangkan kubu Gus Dur, Mathori mendirikan PKD namun partai itu tidak lulus verifikasi KPU.	Tidak ditemukan faktor ideologis yang menyangkut azas partai, mabda syiasi maupun landasan ideologis partai lainnya.	Perebutan pengaruh dan kekuasaan	Ditengarai pihak luar ikut bermain dalam konflik ini. Beberapa tokoh PKB mempercayai Aliansi Politik Poros Tengah yang dimotori Amien Rais menjadi faktor luar yang ikut mempengaruhi konflik internal. Selain itu juga Taufik Kiemas, Megawati dan tokoh-tokoh PDIP. Kelompok-kelompok itulah yang memiliki keuntungan politik dari munculnya konflik PKB. Keyakinan itu semakin menguat ketika Mathori diangkat menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Megawati. Dalam konflik ini, hanya sebagian kecil kiai yang mendukung Mathori Abdul Djalil. Gus Dur pun sadar, dukungan politik terhadap dirinya menyurut drastis, termasuk dari TNI/Polri. Puncak deligitimasi kekuasaan Gus Dur terjadi pada saat Dekrit Presiden yang diumumkannya tidak berjalan efektifnya dan SI MPR yang terlaksana dengan lancar. Kerusakan dalam partai yang disebabkan

				oleh konflik episode Mathori tidak terlalu parah. Proses konsolidasi dengan cepat dilakukan oleh kader-kader PKB yang masih setia di belakang Gus Dur.
Alwi Shihab-Saefullah Yusuf	<p>Pemberhentian Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf dari posisi Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB. Keduanya diberhentikan karena diangkat menjadi menteri dalam kabinet SBY-Kalla. Pada saat itu, DPP PKB memutuskan siapapun yang masuk dalam jajaran kabinet harus mengundurkan diri dari jabatan di partai.</p> <p>Pada saat pemberhentian Alwi Shihab relatif tidak ada gejolak namun reaksi politik itu menjadi mengeras pada saat Saefullah juga diberhentikan dari jabatan Sekjen DPP PKB.</p>	Tidak ditemukan faktor-faktor atau alasan yang menyangkut sisi ideologis sebagai penyebab konflik dan perpecahan.	Alwi dan Saeful ditengarai melakukan 'deal-deal' politik dengan SBY-JK tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Gus Dur.	<p>Pendukung Gus Dur meyakini bahwa kelompok politik di sekitar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla turut memfasilitasi atau mendukung kubu Alwi dan Saeful.</p> <p>Persekutuan politik diantara Alwi dan Saefullah Yusuf mampu menggalang dukungan para kiai sepuh yang selama ini dibelakang Gus Dur. Imbasnya, sebagian besar kiai yang tergabung dalam kelompok kiai langitan kemudian beralih mendukung kubu Alwi-Saeful. Penggalangan politik itu tentu memerlukan dukungan logistik yang tidak sedikit. Hal itu juga semakin menguatkan asumsi bahwa pihak luar ikut mendukung pendanaan penggalangan. Menyikapi hal itu, Gus Dur mencoba membuat wacana tanding dengan memobilisasi kiai-kiai langgar dan mushola yang ia sebut dengan nama kiai kampung. Pada akhirnya, setelah keluarnya keputusan MA yang memenangkan kubu Gus Dur, kubu Alwi kemudian mendeklarasikan berdirinya PKNU. Namun, perpecahan kecil</p>

				pun sempat terjadi di PKNU. Saefullah Yusuf yang juga menjadi salah satu motivator para kiai langitan, pada detik-detik akhir justru memilih meninggalkan PKNU dan masuk ke PPP.
Muhaimin Iskandar- Lukman Edy	Pemberhentian Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum DPP PKB. Sebelumnya, Lukman Edy telah diberhentikan terlebih dahulu sebagai Sekjen setelah yang bersangkutan diangkat sebagai Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) menggantikan Saefullah Yusuf.	Tidak ditemukan faktor-faktor atau alasan yang menyangkut sisi ideologis sebagai penyebab konflik dan perpecahan.	Perbedaan kepentingan dan pandangan politik antara Muhaimin dan Yenny.	Dalam konflik episode Muhaimin Iskandar, aktor luar yang diyakini menjadi operator penyebab konflik adalah Sigid Haryo Wibisono. Hal itu dikemukakan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk oleh Muhaimin Iskandar. Ketua TPF Nusyabani Katjasungkana menyebutkan ada 7 anasir jahat dalam PKB yang telah merusak dan menyebabkan perpecahan partai. 7 orang itu berasal dari dalam dan luar PKB, pihak luar yang disebut sebagai penyebab konflik berinisial SHW yang diyakini sebagai inisial dari Sigid Haryo Wibisono.

Sejak didirikan pada 23 Juli 1998, PKB tidak luput dari guncangan yang datang silih berganti. Namun sampai saat ini, guncangan itu berhasil dilalui dengan baik oleh PKB. Buktinya, partai ini masih tetap eksis. Bahkan dalam dua kali pemilu (1999 dan 2004) PKB berhasil menduduki peringkat ketiga dalam perolehan suara secara nasional. Sesungguhnya, PKB memiliki modal yang sangat kuat yaitu; kekuatan ideologis, politis dan kultural dari *jami'yah* dan *jama'ah* NU, ditambah dengan kekuatan non NU. Sinergi itu akan menjadi kekuatan politik yang luarbiasa. Namun, realitas konflik internal yang tak kunjung henti membuat kita jadi berpikir, mampukah PKB mengoptimalisasi modal yang dimiliki itu untuk kebesaran partai? Sejarah yang akan mencatatnya kemudian.

BAB IV

PENGARUH KONFLIK DAN PEMIKIRAN PENYELESAIAN

4.1. Pengaruh Konflik Bagi PKB

Konflik internal partai di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh PKB. Beberapa partai lainnya seperti Golongan Karya (Golkar), PDI Perjuangan dan PPP juga mengalami hal serupa. Pasca pemerintahan Soeharto, konflik di Golkar terjadi antara kubu Akbar Tandjung dengan Edi Sudrajat yang kemudian membuahkan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). PDI Perjuangan mencatat sejarah konflik yang jauh lebih lama. Bahkan konfliklah yang mendasari kelahiran partai ini. Konflik di PPP berujung pada didirikannya Partai Bintang Reformasi (PBR). Konflik internal juga tidak hanya melanda partai besar. Situasi yang sama juga terjadi dalam tubuh partai-partai kecil, seperti Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), PAN dan PBB.¹⁰¹

Satu pertanyaan mendasar dalam menyikapi konflik di partai politik adalah bagaimana pengaruhnya pada perolehan suara dalam pemilu. Logikanya adalah konflik yang berkepanjangan akan mempengaruhi citra partai politik. Citra akan berpengaruh terhadap persepsi pemilih dalam memandang partai dan menjadi salah satu referensi dalam menjatuhkan pilihan.

Selain pengaruh pada perolehan suara, potensi imbas konflik lainnya adalah terciptanya segregasi di kalangan masyarakat, khususnya para pendukung fanatik dan konstituen tradisional. Pertanyaannya adalah apakah konflik PKB membuahkan penurunan suara sekaligus terjadinya segregasi di kalangan konstituennya? Jawaban pertanyaan itu menjadi bagian dari bab ini.

¹⁰¹ Salomo Simanungkalit (ed). *Indonesia Dalam Krisis, 1997-2002*. Jakarta; Penerbit Buku Kompas, hal 195.

Pada pemilu 1999, partai ini mencatat hasil yang cukup mengesankan. Dari sisi perolehan suara secara nasional, PKB menduduki peringkat ketiga sedangkan dari perolehan kursi menduduki peringkat keempat. PKB mampu mengumpulkan 13.335.982 suara (12,6 persen), merebut 51 kursi di DPR RI dan lebih dari 1500 kursi DPRD di seluruh Indonesia. Fakta lainnya, komunitas NU di Jawa terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan penyumbang suara terbesar bagi partai ini.

Pasca pemilu 1999, di tengah upaya menyiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2004, konflik internal mulai melanda PKB. Konflik episode Mathoril Abdul Djaliil ini membuahkan perpecahan secara struktural seperti dualisme kepemimpinan. Gesekan horizontal di kalangan para kiai dan ulama juga terjadi. Pada saat itu, peta dukungan politik dari kalangan struktural partai, basis massa dan kalangan kiai jauh lebih banyak di belakang Gus Dur daripada Mathori. Konflik itu dapat diselesaikan melalui jalur hukum sebelum memasuki pemilu 2004 dengan keputusan pengadilan yang memenangkan kubu Gus Dur.

PKB mengikuti pemilu 2004 dengan berbekal semangat konsolidasi internal partai dan reposisi hubungan dengan NU. Sebagai imbas gesekan politik antara Gus Dur dengan Hasyim Muzadi, kader PKB menyiasatinya melalui cara membangun komunikasi secara langsung dan lebih intensif dengan kalangan kiai. Jalur struktural NU tidak begitu banyak digunakan jika kader NU yang menduduki posisi itu tidak mendukung PKB.

Dengan kondisi sedemikian itu, PKB mengikuti pemilu 2004. Hasilnya, perolehan suara PKB secara nasional mengalami penurunan sekitar 2,5 juta suara. Meskipun mengalami penurunan perolehan suara, PKB tetap menduduki nomor tiga

dalam urutan perolehan suara nasional. Sedangkan dari sisi jumlah perolehan kursi di DPR RI , PKB berhasil menambah 1 kursi dari 51 pada pemilu 1999 menjadi 52. Sedangkan pada pemilu 2004, PKB mengumpulkan 11.989.546 suara (10,57 persen), merebut 52 kursi di DPR, 1753 kursi DPRD dan 120 Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

Bagi sebagian elite PKB, faktor utama penyebab penurunan suara itu tidak disebabkan oleh konflik internal. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam sambutannya pada pembukaan Seminar dan Workshop ‘Mencari Sistem Pemilu yang Berbasis Kedaulatan Rakyat’ di Jakarta 14 Desember 2006 menegaskan, penurunan suara merupakan fenomena kejenuhan rakyat terhadap situasi politik. Hasil pemilu 2004 memperlihatkan dukungan konsisten terhadap PKB. Dukungan itu berasal dari konstituen tradisional yang tidak akan goyah kesetiiaannya kepada partai. Sebagian kalangan juga berpendapat konflik internal partai bukan merupakan faktor tunggal dalam mempengaruhi penurunan perolehan suara. Karena disaat yang sama sebagian besar partai lainnya pun kehilangan suara. Kejenuhan masyarakat terhadap perkembangan politik, fenomena menguatnya apatisisme politik dengan salah satu indikatornya adalah suara golput, ditengarai menjadi salah satu faktor menurunnya suara pemilih PKB.

Tabel 4.1
Perbandingan Hasil Pemilu 1999 dan 2004

Partai	1999				2004			
	Jml Suara	%	Jml	%	Jml Suara	%	Jml	%

			Kursi				Kursi	
PDI-P	35.689.073	33.74	151	32.97	20.710.006	18.31	109	19.82
P Golkar	23.741.749	22.44	118	25.76	24.461.104	21.62	128	23.27
PKB	13.336.982	12.6	51	11.14	12.002.885	10.61	52	9.45
PPP	11.329.905	10.71	58	12.66	9.226.444	8.16	58	10.55
Demokrat					8.437.868	7.46	55	10
PAN	7.528.956	7.12	34	7.42	7.255.331	6.41	53	9.64
PKS	1.065.686	1.01	7	1.53	8.149.457	7.20	45	8.18
PBR					2.944.529	2.60	14	2.55

Sumber : Workshop Mencari Sistem Pemilu Berbasis Kedaulatan Rakyat.

Dari tabel itu terlihat beberapa partai politik mengalami penurunan suara seperti PKB, PDI-P, PPP dan PAN. Sedangkan partai yang mengalami kenaikan perolehan suara adalah Partai Golkar dan PKS. *Performance* politik PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 1999 yang kurang mengesankan pada saat memegang kekuasaan, ditengarai menjadi salah satu faktor hilangnya suara dalam pemilu 2004. Diperkirakan suara hilang itu sebagian besar beralih ke Golkar. PPP mengalami penurunan sekitar 2 juta suara. Meskipun dalam perolehan kursi tetap konsisten namun berkurangnya suara PPP, diyakini sebagai imbas konflik internal yang kemudian melahirkan Partai Bintang Reformasi (PBR). Perolehan suara PBR pun nyaris sama dengan jumlah suara yang hilang dari PPP. Suara PKB yang hilang (sekitar 2,5 juta) diyakini menyebar ke beberapa partai lain atau menjadi bagian dari

pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang sering disebut sebagai golongan putih (golput).

Mengutip data dari M. Fadjroel Rachman dalam 'Golput, Pemenang Pemilu 2004'¹⁰², jumlah pendukung golput 34.509.246, terdiri dari pemilih terdaftar yang tidak datang ke TPS 23.551.321, ditambah suara tidak sah 10.957.925. Persentasenya 23,34 persen terhadap total pemilih terdaftar. Jumlah ini lebih besar dari perolehan parpol pemenang pemilu, seperti Partai Golkar 24.480.757 (16,54 persen), PDI-P 21.026.629 (14,21 persen), dan PKB 11.989.564 (8,10 persen). Jumlah pemilih terdaftar untuk pemilu legislatif 5 Juli 2004 adalah 148.000.369, sesuai keputusan KPU No 23/2004. Menurut perhitungan manual yang dilakukan KPU 23 April-4 Mei 2004, jumlah pemilih yang menggunakan haknya 124.449.038 (83 persen), suara yang sah 113.498.755, dan suara tidak sah 10.957.925 (8,81 persen).

Konflik di tingkat basis massa juga tidak sekeras pada saat konflik PKB dengan PPP pada pemilu 1999. Nyaris tidak ada gesekan secara fisik di lapis konstituen. Namun imbas konflik telah mengganggu penataan organisasi dan fungsi-fungsi partai politik lainnya. Program-program partai tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kerangka itu, DPP PKB telah merumuskan strategi konsolidasi dan perumusan program kerja partai yang dibagi dalam 4 tahap **Road Map PKB**. Tahap pertama adalah road map 2006. Secara garis besar berisi tentang upaya penuntasan problem internal dan pembangunan citra partai. Tahap kedua adalah road map 2006-2007 tentang imej baru PKB sebagai partai terbuka, partai anak muda yang berbasis

¹⁰² M. Fadjroel Rachman. *Golput, Pemenang Pemilu 2004*. Kompas, 15 Mei 2004.

religius nasionalis sebagai landasan gerak untuk mengembangkan sayap partai di luar NU. Tahap ketiga adalah road map 2007-2008 berbicara tentang nasionalisasi gerakan partai. Diharapkan PKB dapat menjaga basis lama sekaligus membuka basis baru dan mengikatnya dengan berbagai program kerja partai. Tahap keempat, road map 2008-2009 berbicara tentang pembentukan Kader Penggerak Partai (KPP) PKB dan strategi pemenangan pemilu 2009.

Road map itu kemudian di operasikan dalam bentuk program kerja. Ada 5 pokok isu utama, yaitu: *Pertama*, konsolidasi partai meliputi; membenahan kepengurusan di berbagai tingkatan, penguatan sumberdaya manusia pengurus, pemenuhan infrastruktur kantor dan pola hubungan dan komunikasi di dalam struktur partai (DPP, DPW, DPC, DPAC dan DPRt). *Kedua*, kaderisasi meliputi; sistem kaderisasi, sistem distribusi dan promosi kader dan *fund rising* (pendanaan). *Ketiga*, pembentukan citra partai meliputi; membangun jaringan dengan media massa. Keempat, kebijakan publik partai meliputi; regulasi yang mengatur hajat hidup orang banyak, ekonomi kerakyatan dan pengembangan desa. Kelima adalah hubungan dengan pesantren. Ada dua isu program yaitu, penyusunan data base dan pola pengawalan.¹⁰³

Konflik telah menguras energi kader partai, hal itu diakui oleh Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah Nursyamsudin maupun Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB sekaligus Ketua Umum DKN Garda Bangsa Eman Hermawan dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Hanif Dhakiri¹⁰⁴. Ketiganya merupakan pengurus partai yang

¹⁰³ Dokumen DPW PKB Jawa Tengah.

¹⁰⁴ Perbicangan dengan Eman Hermawan, Hanif Dhakiri dan Nursyamsuddin dilakukan disela-sela pelaksanaan kaderisasi DPW PKB Jawa Tengah, 25 Juni 2006 di Kota Semarang. Eman Hermawan selain sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB juga menjabat Ketua Umum Dewan Koordinasi

menggeluti dan bertanggungjawab pada bidang kaderisasi. Konflik telah merusak pola kaderisasi yang telah dibangun oleh kalangan muda kader partai.

Hal yang ironis adalah di tengah target meraih 100 kursi parlemen pada pemilu 2009¹⁰⁵ dan dengan road map partai seperti dikemukakan diatas, konflik internal justru berlanjut dalam episode yang berbeda. Kali ini adalah episode Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf. Konflik ini cukup menghabiskan energi kader-kader PKB dan juga menyeret kalangan kiai-kiai sepuh NU. Buah dari konflik internal episode Alwi melahirkan partai baru yakni Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Dalam konflik episode kedua ini, kubu Gus Dur kembali memetik kemenangan secara hukum dan legitimasi politik.

Situasi yang lebih ironis lagi adalah munculnya konflik episode ketiga. Tidak lama usai episode Alwi berakhir, muncul konflik baru dan membuahkan dualisme kepemimpinan yaitu kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin Iskandar. Konflik terbaru ini mengemuka setelah DPP PKB memberhentikan Muhaimin Iskandar dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP PKB. Konflik-konflik internal telah membuahkan sejarah yang unik di PKB. Semua Ketua Umum DPP PKB, yang *notabene* secara personal merupakan orang yang dekat dengan Gus Dur, baik secara hubungan politik, hubungan guru-murid atau bahkan kedekatan kekerabatan, pada titik perjalanan

Nasional (DKN) Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), sayap politik pemuda PKB. Hanif Dhakiri selain menduduki posisi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB juga menjadi staf ahli Menteri Transmigrasi Erman Suparno (mantan Bendahara Umum DPP PKB). Eman dan Hanif dikenal sebagai lingkaran dekat Muhaimin Iskandar. Pada masa Yenny Wahid menduduki posisi Sekretaris Jenderal DPP PKB, DPP memutuskan mencopot Eman dan Hanif dari jabatan struktural DPP PKB dan Garda Bangsa. Keduanya juga dipecat keanggotaannya dari PKB. Dalam masa konflik episode Muhaimin Iskandar, Eman dan Hanif dipulihkan kembali jabatannya dalam struktur DPP PKB oleh Muhaimin Iskandar. Pemulihan itu dikuatkan kembali dalam Muktamar PKB kubu Muhaimin Iskandar di Ancol. Nursyamsudin merupakan salah satu konseptor dibidang kaderisasi baik di DPW PKB Jawa Tengah maupun DPP PKB.

¹⁰⁵ Muhaimin Iskandar. Pidato Politik dalam pembukaan Seminar dan Workshop 'Mencari Sistem Pemilu yang Berbasis Kedaulatan Rakyat' di Jakarta 14 Desember 2006

politiknya di kemudian hari justru berseteru dengan Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB tersebut. Bahkan Choirul Annam, mantan Ketua DPW PKB Jawa Timur dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKNU pada masa konflik episode Mathori pernah menulis buku berjudul *Seandainya Aku Jadi Mathori* berisi kritik keras terhadap langkah Mathori yang melawan Gus Dur, pada akhirnya juga harus berhadapan dengan Gus Dur.

Setelah dua episode konflik kubu Gus Dur selalu memenangkan pertarungan di pengadilan maka pada konflik kali ini justru kubu Muhaimin (untuk sementara) yang keluar sebagai pemenang. Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) No 441/Kasasi/PDT.SUS/2008 menyatakan pemecatan A. Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART, karena itu harus dipulihkan harkat, martabat, dan kedudukannya sesuai dengan keputusan Menkum HAM No M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 (artinya status PKB dikembalikan pada kondisi sebagaimana produk Muktamar II Semarang). Selain itu, MA juga memutuskan pemecatan Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB dinyatakan tidak syah. Untuk itu, jabatan Sekretaris Jenderal dipulihkan kembali pada Lukman Edy. Keputusan ini tertuang dalam putusan kasasi No 442/Kasasi/PDT.SUS/2008).

Meskipun MA menyatakan MLB Parung (kubu Gus Dur) dan MLB Ancol (kubu Muhaimin Iskandar) namun dengan putusan kasasi yang mengembalikan status partai pada hasil Muktamar II Semarang merupakan pukulan telak bagi Gus Dur. Apalagi dalam kebijakan partai selanjutnya, kubu Muhaimin tidak lagi melibatkan Gus Dur. Pasca keluarnya putusan MA, Muhaimin melakukan penataan organisasi

seperti melakukan pembekuan DPW, penggantian kepengurusan di DPP dan sebagainya tanpa melibatkan Gus Dur. Tim mediasi yang dibentuk oleh kubu Gus Dur untuk menjembatani komunikasi antara kedua kubu tidak mendapat respon yang berarti dari pihak Muhaimin. Lembaga politik lainnya seperti KPU juga hanya mengakui semua produk politik yang ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB, dalam hal ini adalah Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy. Bahkan dalam persoalan politik yang sangat penting seperti pendaftaran calon legislatif untuk pemilu 2009, KPU hanya mengakui daftar caleg yang diajukan oleh Muhaimin Iskandar.

Konflik internal PKB juga memperlihatkan bahwa “kesetiaan” dalam politik merupakan hal yang sulit untuk ditemukan. Ada tiga tipologi yang dapat ditemukan dalam konflik PKB. *Pertama*, kader partai yang tetap memegang teguh sikap dan prinsip politiknya. Misalnya, sejak dari awal menentukan sikap berada dalam barisan Gus Dur , Mathori, Alwi atau Muhaimin, akan tetap menjaga konsistensi sikap ini meskipun resiko politik yang dihadapi cukup pahit seperti pemecatan sebagai kader partai atau sanksi politik lainnya yang mempengaruhi karir politik. Secara kuantitas, kader yang termasuk dalam tipologi ini tidak banyak. *Kedua*, kader partai yang sedemikian mudah menyatakan dukungan pada satu pihak namun sangat cepat pula merubah dukungan itu sesuai dengan arah angin kekuasaan. Secara kuantitas, jumlah ini lebih besar.¹⁰⁶ Dalam konflik episode Muhaimin, terlihat beberapa orang yang

¹⁰⁶ Dalam beberapa kesempatan dialog informal dengan sebagian pengurus DPC-DPC PKB di Jawa Tengah, mengungkapkan kebijakan yang ditempuhnya dalam menyikapi konflik. Mereka memilih menunggu atau mengikuti kedua pihak yang berkonflik. Misalnya, jika ada acara dari kubu Gus Dur, mereka mengirimkan wakilnya untuk mengikuti acara tersebut, demikian pula hal yang sama dilakukan terhadap kubu Alwi. Dalam konflik episode Muhaimin, beberapa kader PKB yang semula dikenal

dikenal sangat dekat dengan Yenny Wahid dan Gus Dur serta bersuara sangat lantang menentang Muhaimin Iskandar sangat cepat berbalik arah begitu keputusan pengadilan berada dipihak Muhaimin.

Ketiga adalah kader partai yang selama konflik berlangsung hanya menjadi penonton, tidak mau bersikap memilih salah satu kubu. Sikapnya adalah diam atau mengikuti kedua belah pihak yang berkonflik sambil menunggu arah angin yang menguntungkan. Kader yang termasuk dalam kategori ini sangat banyak. Sebagian besar merupakan pengurus partai di daerah, tingkat cabang dan ranting.

Implikasi lain dari konflik PKB menjelang pemilu 2009 diproyeksikan akan menguntungkan partai lainnya. Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari setidaknya ada tiga partai yang berpeluang besar menanggung keuntungan dari konflik PKB, yaitu; PKNU. partai ini merupakan partai yang paling dekat dengan PKB. Sejumlah tokoh NU berada di partai itu. Di Jawa Timur, PKNU mulai menggerogoti basis PKB dengan menggandeng sejumlah kiai berpengaruh yang tadinya mendukung PKB.

Partai lainnya adalah Partai Golkar dan PPP. Alasan yang diajukan Qodari untuk kedua partai ini sama. PPP merupakan partai basis dari semua partai Islam di Indonesia, sedangkan Golkar menjadi pilihan tradisional para pemilih. Sebagai partai modern, PKB telah gagal membangun sistem dalam tubuh internalnya. Gagal melakukan konsolidasi organisasi dan gagal membesarkan organisasi.¹⁰⁷

4.2. Peran Kiai dalam Konflik PKB

dekat dengan Yenny Wahid dan cukup keras mengecam Muhaimin, kemudian berbalik arah begitu MA memutuskan pemecatan Muhaimin tidak syah dan mengembalikan ke hasil Muktamar II Semarang.

¹⁰⁷ Dikutip dari Inilah.com. diakses pada 5 Oktober 2008, 04.23 WIB.

Kiai merupakan figur yang sangat berpengaruh di PKB. Salah satu pilar yang menopang kekuatan partai ini ada pada kiai. Pada awal masa pendirian PKB, para kiai ini diharapkan dapat memerankan dua fungsi, pertama sebagai sumber rujukan atau legitimasi teologis dalam pengambilan kebijakan partai dan kedua sebagai pendulang suara. Dalam peran yang pertama meliputi juga sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internal. Setiap kali hendak mengambil keputusan politik yang sangat penting, para elite PKB termasuk Gus Dur terlebih dahulu menyampaikannya atau mendiskusikan sikap politik itu kepada kiai-kiai yang berpengaruh dan sangat dihormati di masyarakat.

Dalam menghadapi konflik pun juga demikian, kader partai yang terlibat konflik selalu mencari solusi, nasehat atau apapun namanya dari kiai. Meskipun pada akhirnya, yang kemudian banyak terjadi adalah bulan mencari rujukan namun mencari dukungan dan legitimasi yang dapat mengamankan posisi politiknya. Kiai itu juga tidak harus orang yang duduk dalam struktur PKB namun yang pasti adalah orang yang memiliki pengaruh kuat di kalangan NU. Pendapat senada dikemukakan oleh pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Kacung Maridjan MA, berpendapat kunci konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada di tangan para kiai atau ulama. "Kuncinya terletak pada kiai, apakah para kiai itu membuka diri atau merasa menang sendiri," kata kandidat doktor di Australian National University (ANU) itu di Surabaya, sebagaimana dikutip oleh NU online¹⁰⁸.

Menurut pengamat NU itu, jika para kiai membuka diri tentu akan mengembalikan penyelesaian persoalan kepada tradisi atau kultur NU yakni para kiai

¹⁰⁸ Website PBNU. NU online. Diakses pada 7 September 2007.

melakukan silaturahmi antar kiai dari kedua pihak. "Tapi, kalau merasa menang sendiri, maka para kiai dapat saja memakai alasan hukum saat pertama kali ada konflik dan setelah kalah secara hukum di pengadilan maka dapat mencari alasan moral, dan seterusnya," katanya. Dosen Fisip Unair Surabaya itu menilai konflik di tubuh partai yang kelahirannya dibidani PBNU itu sebenarnya dipicu dari konflik elit partai di Jakarta, bukan konflik kiai.

Namun, katanya, para elit PKB telah menyeret para kiai berpengaruh untuk masuk ke dalam pusaran konflik dan hal itu tak disadari para kiai yang sebenarnya tak terlalu politis itu. "Para kiai itu sebenarnya hanya dijadikan semacam 'cantolan' yang dibawa-bawa para elit partai. Seharusnya, para kiai itu tak ikut-ikutan, tapi justru menjadi 'jembatan' antar elit yang konflik," katanya. Ia menyatakan terseretnya sejumlah nama kiai berpengaruh ke dalam pusaran konflik politik itu bukan tanpa dampak, karena dampak yang akan terlihat adalah menurunnya kepercayaan masyarakat atau kredibilitas kiai.

Namun menjadi seperti buah simalakama manakala para kiai itu pun terlibat atau menjadi bagian dari konflik itu. Konsep sebagai rujukan pun tidak lagi dapat dimaknai secara obyektif. Bahkan kadangkala saran, pendapat atau tausiah dari kalangan kiai yang tidak terlibat konflik pun tidak selalu dipatuhi. Misalnya dalam kasus konflik episode Alwi Shihab yang menyeret sebagian besar kiai sepuh NU ke dalam pusaran konflik, hampir semua kiai NU yang berpengaruh memberikan saran, nasehat dan pemikirannya. Diantaranya adalah KH Hasyim Muzadi Ketua Umum PBNU. Namun bagi sebagian pendukung Gus Dur, Hasyim tidak lagi dapat bersikap obyektif dalam memandang konflik PKB. Para kiai sepuh yang tergabung dalam

Poros Langitan juga menjadi bagian dari konflik itu sehingga posisinya tidak lagi netral namun jelas memihakkan diri pada kubu Alwi Shihab.

Kiai lainnya adalah KH Mustofa Bisri (Gus Mus), salah satu deklarator PKB yang memilih untuk tidak terlibat politik praktis telah banyak memberikan saran. Namun hampir semua saran itu diabaikan oleh kader-kader PKB. Sebagaimana dituturkan dalam website NU¹⁰⁹, Ia menyarankan penyelesaian konflik seharusnya dilakukan secara internal tidak perlu melalui jalur hukum. Namun, saran itu diabaikan. Kekhawatiran Gus Mus terbukti. Meski sudah melalui berbagai proses hukum, konflik PKB justru makin runyam. “Kalau penyelesaian PKB diserahkan ke orang luar, kepentingannya lain,” tandas Gus Mus. Bagi Gus Mus, tidak ada alasan untuk tidak bertemu. “Ketemu dululah. *Podho sedulure* (sesama saudara). Bicara bagaimana baiknya. Kalau tidak semua tokohnya, minimal Gus Dur, kiai-kiai, (Choirul) Anam, Muhaimin (Iskandar), dan Saiful (Yusuf),” ujar pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibien, Rembang, Jawa Tengah itu. Gus Mus yakin, kalau kedua pihak bertemu, kasusnya akan selesai meski pertemuan berjalan sangat panas. “Mau perang seperti apa, yang penting *marem* (nyaman). Kalau sudah ketemu, semuanya akan jelas,” katanya. Sementara Gus Mus sendiri menolak mempertemukan kedua kubu. Sebab, dia tidak merasa sebagai orang yang berada di pusaran konflik PKB. Pendapat yang sama juga dilontarkan keponakan Gus Mus yang juga mantan juru bicara Gus Dur, Yahya C Staquf, menyarankan Gus Dur dan Muhaimin *sowan* ke kiai-kiai untuk meminta maaf. Selain Gus Mus, deklarator lainnya adalah KH Muchid Muzadi, kakak kandung dari KH Hasyim Muzadi. Namun saran dari Muchid Muzadi

¹⁰⁹ Wawancara dengan KH Mustofa Bisri mengenai konflik PKB dikutip dari Website PBNU. *NU online*. Diakses pada 7 September 2007

pun seperti angin lalu.

Gus Dur, sebagai bagian dari keluarga kiai besar sangat memahami peran kiai di masyarakat khususnya di mata konstituen PKB. Menghadapi konflik dengan Mathori, Gus Dur menghimpun para kiai sepuh melalui forum kiai langitan. Semua kiai sepuh dan berpengaruh di masyarakat memilih berdiri di belakang Gus Dur. Pada saat konflik dengan Alwi Shihab yang didukung oleh para kiai langitan, Gus Dur mencoba mengimbangnya dengan menghimpun kiai di level *grass root* yang disebutnya sebagai kiai kampung. Forum Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat (Masura) atau Forum Kiai Kampung, Ngaji Bersama Gus Dur, secara marathon dilaksanakan diberbagai daerah. Pesan (*message*) yang ingin disampaikan Gus Dur adalah kiai yang sesungguhnya adalah berperan sebagai penggembala umat di lapis bawah, tidak berada di awang-awang. Pesan lainnya kiai kampung merupakan antitesa kiai langitan.¹¹⁰

Salah satu imbas dari konflik yang menyeret para kiai adalah memudarnya citra kiai atau bahkan terjadi pembusukan citra kiai. Memudarnya citra kiai akan berpengaruh pada citra dan keberadaan pesantren yang diasuhnya. Keberadaan pesantren yang mengakar di tengah-tengah masyarakat inilah yang membuat pesantren sesungguhnya punya ikatan sosial yang kuat dengan lingkungannya. Terlebih dengan kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan agama, pesantren semakin dipercaya masyarakat sebagai sumber pranata sosial, tidak hanya ajaran-ajaran agama. Masyarakat kerap memosisikan kiai sebagai tokoh yang bisa memberikan arahan terhadap semua aspek kehidupan, dari mulai masalah rumah tangga, mengurus sawah,

¹¹⁰ Uraian mengenai kiai kampung dikutip dari Ichwan Ar, *Kiai Kampung Dalam Komunikasi Politik*, Suara Merdeka, 6 Maret 2007.

dan tentunya masalah ritual-ritual keagamaan. Selain memberi petunjuk kepada masyarakat, pesantren juga menjadi penerjemah tunggal terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Semua itu menggambarkan bagaimana pesantren dan kiai sangat dipercaya oleh masyarakatnya. Namun krisis kepercayaan itu mulai muncul setelah para kiai terlibat dalam politik praktis.¹¹¹

Pergeseran peran kiai dalam PKB sebenarnya tidak hanya pasca Muktamar II Semarang, namun sejak awal partai ini didirikan “benih-benih” pergeseran itu telah terjadi. Kekuasaan yang besar dalam struktur partai sangat mendukung bagi kiai untuk memainkan peran politiknya. Posisi Dewan Syuro memberikan peluang lebih besar untuk mengatur partai sesuai dengan kehendak kiai. Sebagai contoh, suara kiai sangat menentukan dalam proses penyusunan calon legislatif. Kadang kala, suara itu lebih mengemuka karena memperjuangkan orang ‘dekat’nya, bukan karena pertimbangan faktor kompetensi dan kapasitas yang diperlukan sebagai legislator.¹¹²

Dalam desain ideal sesuai dengan AD/ART PKB, Dewan Syuro memiliki wewenang dan kewajiban untuk merumuskan kebijakan umum partai mencakup basis ideologis kebijakan partai, rujukan teologis dan moralitas dalam perilaku serta sebagai pedoman berpolitik. Penjabaran secara teknis berada di tangan Dewan Tanfidz.

Kekuasaan yang besar di lembaga Dewan Syuro tercerminkan dalam pemilihan dan penyusunan kepengurusan partai. Pemilihan kepemimpinan di PKB dimulai dari pemilihan Ketua Dewan Syuro yang dapat dipilih secara langsung melalui

¹¹¹ Acep Zamzam Noor. *Pesantren Rusak karena Politik*. Republika.co.id. Di akses pada 7 September 2007.

¹¹² Beberapa anggota FKB DPRD Jawa Tengah merupakan anak, kerabat atau orang dekat kiai berpengaruh di Jawa Tengah. Merujuk pada informasi dari anggota fraksi lain yang berada dalam komisi yang sama mengemukakan bahwa kinerja yang bersangkutan jauh dari standar. Hal senada diungkapkan Cholidy Ibhar, staf ahli DPRD Jawa Tengah sekaligus Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah.

pemungutan suara atau aklamasi. Babak berikutnya baru pemilihan Ketua Dewan Tanfidz yang dilakukan melalui pemungutan suara. Sebagai catatan, para calon Ketua Dewan Tanfidz harus mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Syuro terpilih. Penyusunan kepengurusan partai di luar Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz dilakukan oleh formatur yang dipimpin oleh Ketua Dewan Syuro terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih sebagai Sekretaris Formatur.

Dalam penyusunan calon anggota legislatif, tim penyusun terdiri dari 5 orang, yaitu Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro, Ketua Dewan Tanfidz, Sekretaris Dewan Tanfidz dan unsur Perempuan Kebangkitan Bangsa. Semakin besar pengaruh atau ketokohan kiai yang menjabat Ketua Dewan Syuro maka semakin besar pula pengaruhnya dalam pengambilan keputusan di tim tersebut.

Realitas yang banyak terjadi adalah tumbuhnya dualisme kepemimpinan di antara Syuro dan Tanfidz. Kadangkala Syuro merasa Tanfidz berjalan sendiri dan melampaui kewenangan yang dimilikinya. Di sisi lain, Tanfidz menilai Syuro terlalu jauh terlibat dalam urusan teknis operasional partai. Situasi ini hampir terjadi dalam segala tingkatan partai.

Muktamar II Semarang menjadi pemicu karena konflik menjadi lebih terbuka dan menyeret banyak keterlibatan kiai, baik yang berada dalam struktur partai (Dewan Syuro) maupun yang ada di luar struktur partai. Situasi itu dipertajam lagi dalam konflik episode Muhaimin Iskandar. Lembaga politik seperti KPU justru mengakui kepemimpinan partai berada di tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan

Pengurus Pusat Partai. Padahal bagi PKB, sebutan itu diperuntukkan bagi Dewan Tanfidz yang secara struktural berada di bawah Dewan Syuro.

4.3. Pemikiran Solusi

Konflik internal yang berkepanjangan akan sangat melelahkan bagi kader PKB. Hal itu juga disadari oleh sebagian elitnya. Salah satu pemikiran solusi digagas oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI. Sebagaimana dimuat dalam website FKB,¹¹³ Ketua FKB DPR RI Effendy Choirie atas nama seluruh anggota fraksi mengemukakan solusi yang diberi judul *Menuju PKB Satu*.

Berikut ini kutipan seutuhnya usulan solusi itu yang menyentuh 4 kerangka, yaitu; ideologis, yuridis, politis dan sosio kultural. *Pertama*, kerangka ideologis. PKB merupakan aset bangsa, penjaga NKRI, pluralisme, dan penjaga kontinum aspirasi Islam-kebangsaan. Oleh karena itu, secara ideologis, PKB harus ada sebagai kekuatan tengah dalam pendulum politik Indonesia. PKB, mewakili antusiasme publik, lahir langsung menjadi partai besar yang dibuktikan dengan hasil pemilu 1999 dan 2004. Melihat *platform* ideologis dan potensi politiknya, PKB akan membesar, jika tidak dikerdilkan.

Kedua, kerangka yuridis. Putusan kasasi No 441/Kasasi/PDT.SUS/2008 (*in kracht*): pemecatan A. Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP

¹¹³ Pemikiran-pemikiran solusi ini sepenuhnya dikutip dari Effendy Choirie dalam artikel berjudul *Menuju PKB Satu* yang dimuat dalam Website FKB DPR RI. Diakses pada 08 Agustus 2008 18:26:58. Effendy Choirie merupakan salah satu pengurus DPP PKB. Pada saat terjadi perpecahan antara kubu Gus Dur dengan Muhaimin, Effendy memilih merapat ke Gus Dur. Beberapa kali tampil di media elektronik mewakili kubu Gus Dur dan ikut mengawal pelaksanaan MLB di Parung (kubu Gus Dur). Namun begitu keluar putusan kasasi MA, Effendy merupakan orang pertama dari kubu Gus Dur yang menyerahkan berkas pencalegkannya melalui kubu Muhaimin Iskandar. Alasan yang dikemukakan adalah sebagai langkah awal menuju *islah* dan mematuhi keputusan hukum.

PKB tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART, karena itu harus dipulihkan harkat, martabat, dan kedudukannya sesuai dengan keputusan Menkum HAM No M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 (produk Muktamar Semarang). Putusan kasasi kedua No 442/Kasasi/PDT.SUS/2008) (*in kracht*): pemberhentian M. Lukman Edy sebagai Sekjen DPP PKB tidak sah karena tidak sesuai AD/ART dan harus dipulihkan harkat, martabat, dan kedudukannya sesuai dengan keputusan Menkum HAM No M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 (produk formatur Muktamar Semarang).

Putusan PN Jaksel 30 Juni 2008 (dalam proses kasasi): MLB Parung (30 April – 1 Mei 2008) dan MLB Ancol (2 – 4 Mei 2008) dua-duanya tidak sah, karena digelar tanpa Gus Dur (Ketua Umum Dewan Syura) dan tanpa Muhaimin (Ketua Umum Dewan Tanfidz). Dasar hukum lainnya adalah SK Menkumham RI Nomor M.HH-67.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 24 Juli 2008 yang memulihkan jabatan A. Muhaimin Iskandar dan M. Lukman Edy sebagai Ketua Umum dan Sekjen Dewan Tanfidz DPP PKB sesuai dengan SK Menkum HAM No M-02.UM.06.08 Tahun 2005 (produk Muktamar Semarang). UU Pemilu No 10/2008 Pasal 14 (2): “Pendaftaran partai politik peserta pemilu diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik”.

Pijakan hukum yang bersifat internal AD/ART PKB DPP menyebutkan pimpinan tertinggi partai bersifat kolektif (Pasal 12 Ayat 1 ART), yang terdiri dari Dewan Syura dan Dewan Tanfidz (Pasal 16 AD). Dewan Syura adalah pimpinan tertinggi partai yang membuat dan menetapkan pedoman umum kebijakan utama

partai (AD Pasal 17 Ayat 1). Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif partai yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis partai (AD Pasal 17 Ayat 3). DPP dapat membekukan DPW, DPP membekukan DPC dengan memperhatikan rekomendasi dari DPW (ART Pasal 14 Ayat 1). Pengambilan keputusan pembekukan oleh DPP kepada Dewan Pengurus Partai di tingkat bawahnya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai (ART Pasal 14 Ayat 4).

Ketiga, kerangka politis. Pengaruh Gus Dur masih sangat besar di PKB. Fakta memperlihatkan, konstituen PKB masih menjadikan Gus Dur sebagai ikon politik yang menempati tempat khusus dalam ruang batin pendukung-pendukung setianya. Beberapa daerah yang potensial menjadi basis baru PKB, seperti Papua dan NTT, terbentuk karena wibawa Gus Dur, bukan karena kerja partai. Mengeliminasi Gus Dur dapat berarti melepas separo 'nyawa' PKB.

Keempat, kerangka sosial kultural. Saat ini terjadi disharmoni hubungan kelembagaan NU-PKB, padahal PKB terhubung dengan NU secara historis, kultural, dan aspiratif. Sebagai ilustrasi adalah perbandingan perolehan suara dalam pemilu. Partai NU meraih 18.4 persen pada pemilu 1955 dan 18.7 persen pada pemilu 1971. PKB meraih 12.6 persen pada pemilu 1999 dan 10.57 persen pada pemilu 2004. Ada gejala kemerosotan. Berdasarkan hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) tahun 2007, sebanyak 33 persen dari jumlah pemilih Indonesia mengaku sebagai orang NU. Namun hanya sekitar 29 persen warga NU yang memilih PKB pada pemilu 2004. Selebihnya, warga NU memilih ke Partai Golkar (16%), PDI Perjuangan (12%), PPP (11%), Partai Demokrat (7%), PKS (6%), dan lain-lain (19%). Data lainnya, 85 persen pemilih PKB dalam pemilu 2004 adalah orang NU dan 71 persennya berasal dari

Jawa dan etnik Jawa, separuh dari etnik Jawa itu berasal dari Jawa Timur. Salah satu imbas dari memburuknya hubungan NU-PKB adalah kekalahan-kekalahan beruntun di sejumlah perhelatan politik, sejak Pilpres 2004 hingga Pilkada. Kekalahan telak PKB di Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah pelajaran berharga dari perang egoisme kelembagaan NU-PKB.

Beranjak dari kerangka itu, maka diusulkan formula islah sebagai berikut; yaitu mengikuti putusan pengadilan demi menegakkan aturan hukum, baik yang mengikat ke dalam (AD/ART PKB) maupun ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Oleh karena itu semua warga PKB harus patuh pada putusan hukum yang memerintahkan formasi kepengurusan DPP PKB dikembalikan ke Muktamar II Semarang. Putusan itu diberlakukan karena MA berpendapat dua MLB PKB, Parung dan Ancol, semuanya dianggap cacat hukum (mengacu pada putusan PN Jaksel yang sedang dalam proses kasasi ke MA).

Sebagai konsekuensinya maka semua produk hukum dan politik yang dihasilkan MLB itu dianggap tidak pernah ada, termasuk formasi kepengurusan DPP PKB baru yang dihasilkan dari dua MLB yang tidak sah itu. Seluruh kerangka pengambilan kebijakan partai harus mengacu pada aturan internal partai (AD/ART PKB) sebagaimana ditetapkan dalam Muktamar Semarang 2005. Ketua Umum Dewan Syura tetap Gus Dur, yang memegang otoritas tertinggi di PKB. Sekretaris Dewan Syura dijabat Muhyiddin Arbusman dan Ketua Umum serta Sekjen Dewan Tanfidz DPP PKB dipegang A. Muhaimin Iskandar dan M. Lukman Edy.

Oleh karena seluruh mekanisme partai dikembalikan ke Muktamar Semarang, maka harus dilakukan moratorium yang menyangkut kebijakan penting partai yang

telah dilakukan tanpa melibatkan otoritas Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Seluruh produk dari kebijakan strategis partai harus melalui administrasi yang di tandatangani oleh Gus Dur-Muhyiddin Arubusman (Ketua Umum Dewan Syura-Sekretaris Dewan Syura) dan Muhaimin Iskandar-Lukman Edy (Ketua Umum dan Sekjen Dewan Tanfidz). Ketentuan ini berlaku untuk kebijakan pembekuan DPW/DPC dan pencalegan. Pembekuan DPW/DPC hanya boleh dilakukan berdasarkan rapat pleno yang disetujui dan ditandatangani oleh Gus Dur-Muhyiddin Arubusman dan Muhaimin Iskandar-Lukman Edy. Pembekuan yang dilakukan pasca putusan kasasi MA tanpa mekanisme ini harus dinyatakan tidak sah dan menyalahi AD/ART.

Untuk proses pencalegan, menggabungkan aturan internal partai dan UU Pemilu No 10/2008, DCS dan DCT partai harus disetujui dan ditandatangani oleh Gus Dur-Muhyiddin Arubusman (Ketua Umum Dewan Syura-Sekretaris Dewan Syura) dan Muhaimin Iskandar-Lukman Edy (Ketua Umum dan Sekjen Dewan Tanfidz). Untuk tingkat DPW dan DPC, rekrutmen pencalegan disusun bersama oleh kubu yang menyokong MLB Parung dan Ancol (yang dianggap tidak pernah ada), dengan mempertimbangkan formula kompromi dalam hal persentase, misalnya *fifty-fifty* (50:50 persen). Untuk menuntaskan proses islah di PKB, semua kader PKB harus membuang *mindset* Parung dan Ancol, dan kembali kepada produk hukum dan politik hasil Mukhtar Semarang 2005. Hanya dengan membuang ego masing-masing kubu, islah PKB akan mencapai kemajuan.

Pemikiran solusi itu sangat ideal namun dalam prakteknya tidak mudah. Masing-masing kubu tetap melakukan proses politik secara terpisah. Misalnya, penyusunan dan pendaftaran caleg. Kubu Gus Dur dan Kubu Muhaimin masing-

masing melakukan sendiri dan mendaftarkannya ke KPU juga secara terpisah. Pada akhirnya KPU hanya menerima berkas caleg yang ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy (tanpa melibatkan Gus Dur dan Muhyidin Arubusman). Jika terdapat nama-nama yang sama dalam daftar caleg yang diterima KPU tersebut, hal itu bukan hasil islah secara organisatoris namun merupakan sikap pribadi dari kader PKB yang semula berada di kubu Gus Dur kemudian berpindah ke kubu Muhaimin Iskandar. Situasi yang sama juga terjadi di daerah. Proses penyusunan dan pendaftaran caleg dilakukan oleh kedua kubu secara terpisah. Beberapa KPUD seperti Jawa Timur sebagaimana dikemukakan salah satu anggota KPUD Jawa Timur Didik Prasetyono menyikapinya dengan menunggu hasil konsultasi antara KPUD dengan KPU.

Ketersinggungan Gus Dur karena tidak dilibatkan dalam penyusunan caleg memuncak dengan munculnya seruan untuk mengepung kantor-kantor KPUD di seluruh Indonesia. Gus Dur juga mengancam akan menjadi golput jika hak-haknya dinistakan.

BAB IV P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan oleh representasi para kiai/ulama yang tergabung dalam organisasi Nahdhatul Ulama (NU). Didirikannya PKB dimaksudkan sebagai salah satu alat perjuangan politik warga organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) itu. Jika NU bergerak dalam wilayah sosial keagamaan maka PKB berada dalam ranah politik praktis.

Meskipun didirikan oleh PBNU, namun PKB didesain sebagai partai terbuka. Dibuktikan dengan basis ideologi partai yang dipilih adalah Pancasila, bukan Islam. Namun keterbukaan PKB bersifat unik karena nuansa Islam tradisional masih menyelimuti gerak langkah keseharian partai. Simbol-simbol partai, bahasa komunikasi politik dan atribut partai lainnya menegaskan bahwa keterbukaan PKB berada dalam payung tradisi NU.

Ada beberapa pokok kesimpulan sebagai hasil penelitian ini, antara lain: *Pertama*, PKB sebagai partai modern telah gagal melakukan konsolidasi dan membangun sistem dalam tubuh PKB. Konflik demi konflik dan perpecahan demi perpecahan menjadi bukti dari kegagalan itu.

Kedua, akar konflik internal di tubuh PKB disebabkan oleh benturan kepentingan pragmatis dari masing-masing kader partai yang tengah memegang kekuasaan dalam struktur PKB. Latar belakang konflik tidak berangkat dari perbedaan ideologi, nilai atau hal-hal yang lebih mendasar yang menjadi visi dan misi

perjuangan partai. Konflik yang terjadi adalah berlatarbelakang benturan terhadap hal-hal yang bersifat pragmatis yang dikemas dalam balutan argumentasi ideologis.

Ketiga, terjadi perubahan posisi dan peran kiai dalam konflik PKB. Semula keberadaan kiai dan ulama dalam struktur partai maupun di luar partai ditempatkan sebagai sumber rujukan untuk pengambilan kebijakan strategis partai dan menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan di internal maupun eksternal partai sekaligus sebagai perekat keutuhan partai. Dalam perkembangannya, sebagian besar kiai dan ulama justru menjadi bagian dari persoalan atau bagian dari konflik tersebut. Ibaratnya peran dan posisi kiai yang seharusnya menjadi media perekat namun kemudian justru bermetamorfosis menjadi bagian dari benda yang seharusnya direkatkan. Sejak saat itulah maka posisi dan peran yang diembannya menjadi hilang. Keterlibatan kiai dalam konflik menjadi faktor penyebab tergerusnya citra kiai di mata masyarakat.

Keempat, pola konflik yang terbangun di PKB bersifat struktural dan kultural. Sisi struktural menyentuh kelembagaan partai dan kelembagaan di NU. Sedangkan sisi kultural terkait dengan relasi di antara para kiai dan relasi antara kiai dengan santri atau mantan santri. Konflik yang membelah struktur partai mengakibatkan dualisme kepengurusan, pertikaian sesama kader (tidak jarang melibatkan tindakan kekerasan). Dalam tataran kultural, konflik telah membuat polarisasi di kalangan kiai dan santri. Karakter pesantren dan kiai yang bersifat otonom semakin mempercepat atau memperkuat terjadinya fragmentasi tersebut.

Kelima, konflik internal PKB memperkuat pandangan bahwa proses institusionalisasi dalam partai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi yang

terjadi adalah institusi berubah menjadi sangat personal atau dominasi personal jauh melebihi kekuasaan institusi. Imbasnya struktur partai tidak berfungsi secara optimal. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di PKB namun juga terjadi di hampir semua partai yang menggantungkan diri pada kharisma pemimpin dan dukungan dari konstituen tradisional.

Keenam, konflik hanya akan dapat diselesaikan secara konstruktif jika ada kematangan, kedewasaan berpolitik dan komitmen kolektif mengenai masa depan PKB. Jika hal itu tidak terpenuhi maka potensi untuk mengulang terjadinya konflik sangat besar. Tigakali episode konflik yang terjadi di PKB menjadi fakta tak terbantahkan. Dari serangkaian konflik dapat ditemukan tipologi kader PKB. *Pertama* adalah kader yang memegang teguh prinsip dan sikap. Misalnya, sekali menentukan sikap keberpihakannya maka akan seterusnya berada dalam posisi itu dengan segala konsekuensi dan resiko yang harus ditanggung. *Kedua* adalah kader yang dapat bermetamorfosis secara cepat sesuai dengan pergerakan bandul kekuasaan. Dalam area ini, seseorang yang semula membela mati-matian salah satu pihak bisa mudah dengan cepat berpindah ke lawan politik begitu angin kekuasaan berbalik arah. *Ketiga*, kader yang memiliki sikap untuk kemana-mana. Semua pihak diikuti sampai pada akhirnya muncul salah satu pihak sebagai pemenang, maka kader ini akan secepatnya menentukan sikap yang sejalan dengan sang pemenang.

Merujuk catatan sejarah konflik PKB, pada akhirnya muara konflik tidak mencapai tahap integrasi namun justru memilih segregasi sebagai jalan terakhir penyelesaiannya.

5.2. Saran

Saran-saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, mengkonstruksi ulang peran dan keterlibatan kiai dalam ranah politik. Keterlibatan kiai dalam konflik menjadi faktor penyebab tergerusnya citra kiai di mata masyarakat. Dalam konteks ini ada dua pilihan, yang pertama, kiai sama sekali tidak memasuki wilayah politik praktis. Kedua, tetap masuk dalam aras politik praktis namun catatan harus dilihat, dipandang dan diperlakukan sebagaimana layaknya politisi. Dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, memandang kiai yang terjun ke kancah politik sebagai politisi akan membantu melepaskan beban sosial yang harus ditanggung kiai tersebut.

Kedua, upaya membangun partai ke arah sistem dan kultur sebagai partai modern serta rasional justru membuahkan konflik sebagai akibat dari benturan antara kekuatan sayap tradisional yang bertahan pada konsep lama dan kekuatan sayap modern yang menginginkan perubahan secara radikal. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal serupa terjadi di masa depan maka titik temunya adalah memadukan aspek modernitas dan konstruksi pola pikir rasional dengan nilai dan tradisi NU yang selama ini menjadi “ruh” bagi kehidupan warga PKB.

Ketiga, pendidikan politik bagi kader PKB merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk menopang dan membantu dalam pengelolaan manajemen partai dan politik secara modern. Disisi lain, pendidikan politik juga dapat membekali kader-kader PKB sehingga secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan dalam kiprah politiknya di lembaga-lembaga politik, baik itu legislatif, eksekutif atau lembaga politik yang lain.

Keempat, beranjak dari kekalahan politik dalam berbagai pilkada maka perlu dilakukan reposisi dan rekonstruksi pola komunikasi dan relasi antara PKB dengan NU. Hubungan sejarah diantara keduanya tidak dapat dihapus. Hanya saja, perlu dilakukan komunikasi yang intensif dan kontinyu sehingga tercipta satu pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing dalam kehidupan politik dan sosial kemasyarakatan. Jika hal itu dilakukan maka perbedaan-perbedaan politik terutama dalam aspek pragmatisme politik seperti pencalonan dalam pilkada dan sebagainya tidak akan terulang.

Demikian, beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Sebagai kata penutup, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak memuat kebenaran yang mutlak namun justru membuka kemungkinan untuk penambahan informasi, data dan fakta atau bahkan direvisi sepenuhnya sehingga menjadi sempurna.

Semarang, September 2008

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Anam, Choirul, 1999, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama*, Bisma Satu Printing, Surabaya.
- _____, 2002, *Seandainya Aku Jadi Mathori*, Bisma Satu Printing, Surabaya.
- Asfar, Muhammad (Ed), 2003, *Islam Lunak Islam Radikal, Pesantren, Terorisme dan Bom Bali*, PuSDeHam dan JP Press, Surabaya.
- Ar, Ichwan, 2006, *Sketsa Pergolakan GMNI*, BP UNDIP-DPC GMNI Semarang-Patriot Centre, Semarang.
- Budiardjo, Miriam, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bulkin, Farchan (Pengantar), 1985, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Pilihan Artikel Prisma*, LP3ES, Jakarta.
- Chilcote, Ronald H, 2004, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dhofier, Zamakhsyari, 1984, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cetakan Ketiga, LP3ES, Jakarta.
- Fealy, Greg, 2003, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, LKiS, Yogyakarta.
- _____, Greg Barton, 1997, *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, LKiS, Yogyakarta.
- Haidar, Ali M, 1998, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husaini, Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, 2004*, PT Bumi Aksara, Bandung.
- Ida, Laode, 1980, *Anatomi Konflik NU, Elite Islam dan Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Iskandar, A. Muhaimin, 2001, *Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa*, Pustaka Bumi Selamat, Jakarta.

- Kantaprawira, Rusadi, 2004, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Cetakan Kesembilan, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Karim, A. Gaffar, 1995, *Metamorfosis, NU dan Politisasi Islam Indonesia*, LKiS, Yogyakarta.
- Lombard, Denys, 1996, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Edisi 2, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- LP2KS DPW PKB Jawa Tengah, 2004, *Partai Untuk Rakyat*, DPW PKB Jawa Tengah dan Aneka Ilmu, Semarang.
- Ma'shum, Saefullah (Ed), 1998, *Karisma Ulama, Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, Penerbit Mizan dan Yayasan Saefuddin Zuhri, Bandung.
- Marsh, David and Gerry Stoker, 1995, *Theory and Methods in Political Science*, Macmillan Press LTd, London.
- Marijan, Kacung, 1992, *Quo Vadis NU setelah Kembali ke Khittah 1926*, Erlangga, Jakarta.
- Nata, H. Abudin (Ed). 2002, *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Grasindo dan UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Noer, Deliar, 1983, *Islam, Pancasila dan Azas Tunggal*, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta.
- Noer, Deliar, 1982, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cetakan Kedua LP3ES, Jakarta.
- O'Donnel, Guilermo and Philippe C. Schmitter, 1986, *Transitions From Authoritarian Rule; Tentative Conclusions About Uncertain Democracies*, John Hopkins University Press, Baltimore.
- Patoni, H. Achmad, 2007, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Iman Toto K dan Herdianto WK, 2001, *Bung Karno, Gerakan Massa dan Mahasiswa*, Grasindo, Jakarta.
- Ranuwihardjo, A. Dahlan, 2002, *Revolusi, Anti Imperialisme dan Pancasila*, Intrans, Jakarta.
- Rainer, Adam, 2005, *Menangkan Pemilu! Petunjuk Praktis Bagi Kandidat*, Friedrich Naumann Stiftung (FNS) Indonesia, Jakarta.

- Rakhmat, Jalaluddin, 1985, *Psikologi Komunikasi*, Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Sarbini, 2005, *Islam di Tepian Revolusi, Ideologi, Pemikiran dan Gerakan*, Pilar Media, Yogyakarta.
- Simanungkalit, Salomo (Ed), 2002, *Indonesia Dalam Krisis. 1997-2002*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Suminto, H. Aqib, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda, Het Kantoor voor Inlandsche zaken*, LP3ES, Jakarta.
- Supriadi, 2001, *Kyai, Priyayi di Masa Transisi*, Penerbit Pustaka Cakra, Surakarta.
- Schroder, Peter, 2005, *Strategi Politik*, Friedrich Naumann Stiftung (FNS) Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.
- 'Ulum, Bahrul, 2002, *Bodohnya NU apa NU Di Bodohi? Jejak Langkah NU Era Reformasi; Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, Ar Ruzz Press & PW IPNU Jawa Tengah, Semarang.
- Wahid, KH Abdurrahman, 2006, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Cetakan Kedua, Wahid Institut, Jakarta.
- Wahid, Yenny Zannuba, A. Effendy Choirie, M. Kholid Syeirazi (Ed), 2007, *9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan*, Panitia Harlah Ke-9 PKB, Jakarta.

Sumber Data Lainnya:

- Ar, Ichwan, 6 Maret 2007, *Kiai Kampung Dalam Komunikasi Politik*, Suara Merdeka, Semarang.
- _____, 17 Juli 2007, *Sistem Pemilu Berbasis Suara Rakyat*, Radar Surabaya.
- _____, 2006, *Jalan Baru Pergerakan Kebangsaan*, Buletin Praksis, Edisi 04 Mei, Semarang.
- Coulombis and Wolfe, 1985. Materi Kuliah Magister Ilmu Politik UNDIP.
- Dhakiri, M. Hanif, 18 September 2007, *Islam dan Wajah Ganda PKB*, Harian Seputar Indonesia, Jakarta.

- DPP PKB, 2004, *AD/ART dan Mabda' Siyasiy Partai Kebangkitan Bangsa*, DPP PKB, Jakarta.
- _____, 2005, *Dokumentasi Hasil Mukthamar II Partai Kebangkitan Bangsa*, Semarang.
- _____, Website.
- _____, 2000, *Modul Pelatihan dan Orientasi Politik DPC-DPW, Modul Orientasi Ideologi DPP PKB*, Jakarta.
- DPP PDI Perjuangan, *Lahirnya Pancasila, 1 Djuni 1945*, DPP PDI Perjuangan, tanpa tahun dan tanggal penerbitan, Jakarta.
- Kristiadi, J, 2006, *Kehidupan Kepartaian di Indonesia*, Makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam Seminar politik pada acara Deklarasi Partai Pergerakan Kebangsaan, Semarang.
- Laporan Tim Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Tengah, 2004.
- SBM, Nugroho, 16 September 2004, *Memahami Perilaku Politik lewat Teori Ekonomi Politik*, Harian Suara Merdeka, Semarang.
- Tohir, Mudjahirin, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makalah tidak diterbitkan, disampaikan sebagai bahan workshop Peneliti Tenaga Edukatif di IAIN Walisongo, Semarang.
- Tim Lima PBNNU, 1998, *Menyambut Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa*, Penerbit Panitia Deklarasi PKB, Jakarta.